

D.N. AIDIT

DEKON

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH !

D.N. Aidit



DEKON

DALAM UDJIAN

- * DEKON DAN SJARAT² PELAKSANAANNJA
- * DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON !
- * KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH !
 - * SELAMATKAN DEKON !
 - * DEKLARASI EKONOMI



JAJASAN „PEMBARUAN“
DJAKARTA 1963

penerbit progresif
PEMBARUAN

PENGANTAR PENERBIT

Dalam brosur ini dimuat tiga buah tjeramah Ketua CC PKI Kawan D.N. Aidit sekitar *Deklarasi Ekonomi* dan tjara² pelaksanaannja. Tjeramah pertama berdjul *Dekon dan Sjarat² Pelaksanaannja* jang diberikan dalam pertemuan jang diselenggarakan oleh Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Dalam tjeramah ini Kawan Aidit sudah mentjanjangan adanja pertjobaan² untuk menjelewengkan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi itu dan menjerukan Rakjat mempertinggi kewaspadaannja.

Tjeramah kedua berdjul *Dekon dalam bahaya, selamatkan Dekon!* adalah tjeramah dalam Musjawarah Besar Mengenai Ekonomi dan Keuangan jang diadakan oleh Madjelis Usaha Veteran Indonesia (MUVI), sedangkan tjeramah ketiga berdjul *Kaum Buruh Adalah Pembela Dekon Jang Gigih!*, jaitu tjeramah dihadapan para pegawai Departemen Perburuhan. Kedua tjeramah ini diberikan setelah pengumuman peraturan² 26 Mei dan berbagai penetapan tarif dan harga, jang semua dikatakan „untuk pelaksanaan Dekon“. Maka dalam kedua tjeramah itu dibuktikan oleh Kawan Aidit bahwa peraturan² ekonomi 26 Mei dan kenaikan tarif dan harga samasekali tidak sesuai dengan semangat Dekon, bahkan merupakan pelanggaran dan penjelewengan terhadap Dekon. „Penjelewengan 26 Mei“ itu berusaha mendiskreditkan Dekon dimata Rakjat. Tapi Dekon „tahan udjian“ itu. Rakjat bangkit membela Dekon dan memulai perjuangan untuk melawan penjeleweng²nja.

Demi mendorong maju perjuangan Rakjat itu, guna pelaksanaan Dekon setjara sesungguhnya dan konsekwen, maka dibukukan ketiga tjeramah Kawan Aidit ini dengan diberi judul *Dekon Dalam Udjian*. Pernjataan Politbiro CC PKI *Selamatkan Dekon!* dan *Deklarasi Ekonomi (Dekon)* itu sendiri dilampirkan pula, sehingga lebih lengkaplah bahan²nja untuk membuka kedok para „Dekonis munafik” dan untuk menegakkan Dekonisme sedjati.

Djakarta, Djuli 1963

DEKON DAN SJARAT-SJARAT PELAKSANAANNJA

Pertama-tama, perkenalkanlah saja mengutjapkan penghargaan atas inisiatif jang diambil oleh Himpunan Sardjana Indonesia (HSI) dalam mengadakan rangkaian tjeramah ini guna mendengar ulasan² dari partai² NASAKOM tentang Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Inisiatif ini membuktikan bahwa Sdr², sebagai sardjana-sardjana jang ingin menjumbangkan keahliannya masing-masing dalam pekerdjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi itu, memang mengerti betapa erat hubungannya soal pelaksanaan itu dengan kekuatan-kekuatan Rakjat jang terorganisasi, jaitu dengan persatuan nasional atau kegotongrojongan nasional jang berporoskan NASAKOM.

Sebagai wakil daripada salahsatu partai NASAKOM, jaitu wakil PKI, saja menjedari sepenuhnya betapa berat tanggungjawab jang terletak diatas pundak Partai jang saja wakili untuk ber-sama² dengan partai² lain dan ber-sama² dengan semua golongan, mengadakan usaha² jang sungguh² untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa ini. Dalam pekerdjaan besar ini, para sardjana kita djuga mempunyai rasa tanggungjawab jang dalam, dan saja yakin bahwa rangkaian tjeramah² ini akan merupakan satu langkah maju lagi dalam mengerahkan seluruh potensi Rakjat sesuai dengan apa jang diserukan didalam Deklarasi Ekonomi.

Saja djuga merasa gembira mendengar, bahwa HSI akan menjelenggarakan suatu Seminar Ekonomi dengan maksud menghimpun sumbangan² fikiran masyarakat guna membantu pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Mudah-mudahan Seminar itu mentjapai sukses.

Tjeramah ini akan saja bagi dalam dua bagian. Jang *pertama* mengenai pengertian² setjara umum tentang prinsip² Dekon, dan jang *kedua* berupa sumbangan fikiran tentang pelaksanaan langkah² jang ditetapkan didalam Dekon sebagai kebidjaksanaan djangka pendek.

PRINSIP² POKOK DEKLARASI EKONOMI

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Sukarno telah mengumumkan Deklarasi Ekonomi yang menentukan *strategi dasar ekonomi Indonesia* serta menetapkan kebidaksanaan jangka pendek dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa ini. Peristiwa ini merupakan salahsatu peristiwa yang terpenting dalam perkembangan-perkembangan politik di Indonesia sedjak diumumkannya Manifesto Politik Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959.

Dekon telah disambut dengan hangat sekali oleh seluruh Rakjat Indonesia. Sambutan² dari seluruh lapisan Rakjat sudah mulai mengalir sedjak beberapa djam sadja setelah Dekon diumumkan. Sampai sekarang sambutan-sambutan masih mengalir, malahan berbagai organisasi sudah mengadakan konferensi² dan seminar tentang Dekon.

Ini adalah wadjar, karena Dekon menjangkut dua segi dari Revolusi Indonesia yang sangat penting, jaitu disatu fihak ikut melempangkan pengertian tentang Revolusi dengan menegaskan sekali lagi adanya dua tahapan Revolusi kita, dan mendjelaskan tentang watak daripada susunan ekonomi yang harus kita bangun pada tahap pertama daripada Revolusi, sedangkan difihak lain Dekon menjangkut perutnja seluruh Rakjat karena menetapkan tjara² yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi yang sudah sedemikian djauhnya dan menjebabkan penderitaan² yang sedemikian beratnja.

Disamping sambutan² hangat dari Rakjat, ternjata bahwa di-kalangan² tertentu, Dekon disambut dengan suara² sinis. Kalangan² itu berusaha menimbulkan perasaan ketjewa terhadap Dekon karena, katanja, „tidak ada sesuatu yang baru didalamnja“, „semuanja itu telah ber-ulang² dikatakan dan toh keadaan tidak menjadi lebih baik, malahan sebaliknya“. Kalangan² itu memang berusaha keras untuk menggagalkan setiap

usaha yang mau didjalankan oleh Bung Karno ber-sama² Rakjat untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi pada saat ini. Mereka berusaha membikin Rakjat ketjewa terhadap Bung Karno dan mau membikin Bung Karno tidak pertjaja pada kekuatan Rakjat. Mereka mengetahui benar bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno memang akan dapat mendobrak keadaan yang suram yang sedang menjengkeram negeri kita, dan bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno akan dapat mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme yang merupakan *conditio sine qua non* atau sjarat mutlak untuk perbaikan ekonomi.

Kaum sinis terhadap Dekon sebenarnja dapat dibagi dalam dua golongan. *Satu golongan*, mereka yang dengan sadar memang berusaha menggagalkan perjuang-an Rakjat pada saat ini untuk menjiptakan suatu kekuasaan politik gotongrojong berporoskan NASAKOM, yang benar² sesuai dengan susunan ekonomi yang mau dibangun. Kaum sinis ini mewakili kepentingan² kaum imperialis dan feodal yang telah ditetapkan sebagai sasaran utama dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini; mereka terdiri dari kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah yang kepentingan²nja memang harus dikorbankan dalam proses pelaksanaan Dekon demi kepentingan massa Rakjat yang luas. Kaum sinis ini ternjata pula mendapat angin dan inspirasi dari bahan² ratjun berbentuk buletin² atau stensilan² periodik yang pada saat ini diedarkan oleh pengchianat Sumitro dan agen²nja di-kalangan² pegawai perusahaan² negara, kantor² Pemerintah dan lain² bagian daripada aparatur pemerintahan dan ekonomi negeri kita. Kaum Manipolis munafik djuga termasuk dalam golongan sinis ini. Mereka hanya dalam kata² menjatakan menerima dan menjokong Dekon tetapi dalam praktek menjelewengkan pelaksanaan Dekon atau „atasnama Dekon“ mengadakan tindakan² yang anti-Dekon, yang merugikan Rakjat banyak.

Golongan kedua, adalah orang² sinis yang memang ternjata tidak mengerti Dekon itu dan karena melihat didalamnja rumusan² yang pernah diutjapkan sebelumnya, maka menganggap bahwa tidak mengandung hal² yang baru dan karena itu menganggapnya tidak berguna. Mereka tidak mengerti bahwa Dekon merupakan dan memang dimaksudkan pula sebagai suatu

dokumen yang mentjerminkan keinginan² Rakjat banjak yang telah lama dinjatakan dalam berbagai bentuk. Sedjak tahun yang lalu, sedjak keadaan ekonomi mulai merosot dengan sangat tjepat, dan chususnja sedjak pidato *Tahun Kemenangan* (Takem) dimana Bung Karno menjatakan kesanggupannya untuk memberi perhatian yang khusus terhadap tugas menanggulangi kesulitan² ekonomi, chususnja sandangpangan, jaitu Program pertama dari Triprogram Pemerintah. Rakjat kita telah setjara giat membitjarakan soal² ekonomi dan merumuskan usul² mereka dalam bentuk pernjataan², resolusi², hasil² berbagai seminar, konferensi² produksi yang diadakan achir² ini dan djuga didalam dokumen² resmi yang disusun oleh DPRGR. Djika ternjata bahwa Dekon memang dalam banjak hal memuat usul² yang diadakan oleh Rakjat dalam berbagai bentuk itu, malahan pada pokoknja didasarkan pada usul² tersebut, ini samasekali tidak merupakan alasan untuk mentjemoohkan Dekon itu dengan mengatakan „tidak mengandung sesuatu yang baru“. Sebaliknja, ini menggambarkan suatu kemenangan penting bagi Rakjat Indonesia karena dengan ini berarti bahwa untuk pertama kalinya Rakjat kita setjara langsung dan aktif ikut menjusun politik Pemerintah dibidang ekonomi, jaitu suatu bidang yang selama ini dianggap sebagai bidang terlarang untuk Rakjat, suatu bidang yang katanja hanya dapat difikirkan dan diperbintjangkan oleh tenaga² ahli tertentu yang sudah terbukti samasekali tidak berhasil mengatasi kesulitan² ekonomi dan keuangan selama ini.

Untuk mengambil satu tjontoh sadja, Dekon dengan tegas menetapkan bahwa Pemerintah tidak akan menjalankan devaluasi atau tindakan² moneter yang drastis. Penetapan ini benar² mentjerminkan perasaan dan tuntutan Rakjat yang kepentingan²nja telah berulang kali dirugikan oleh adanya devaluasi² serta tindakan² moneter yang lalu. Djika sebelumnya, „ahli² ekonomi“ dibidang keuangan dapat mengambil langkah² yang demikian penting itu atas kerugian Rakjat, maka untuk pertama kalinya penolakan Rakjat terhadap devaluasi dan tindakan² moneter yang merugikan telah dapat menentukan politik Pemerintah. Bukankah ini merupakan kemenangan konsepsionil yang penting? Bukankah ini merupakan sesuatu yang baru, suatu pukulan bagi pihak² yang sebenarnja sudah lama mengandjurkan supaya se-

kali lagi dijalankan suatu devaluasi terbuka sesuai dengan desakan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan maksud lebih memperkuat dominasi dolar atas ekonomi dan keuangan Indonesia dan mengontrol serta membikin perdagangan luarnegeri kita lebih tergantung lagi pada dolar Amerika Serikat? Tetapi ini tidak berarti bahwa kita sudah terlalu puas dan tidak perlu waspada terhadap muslihat² lain dibidang moneter, dan bahwa kemenangan tersebut tidak perlu diperkuat dan dikonsolidasi lebih lanjut. Djangan² misalnja, devaluasi sudah resmi ditolak, tahu² masih terus sadja diadakan perubahan² dalam peraturan² export dan import dengan berbagai matjam transaksi-kurs yang pada hakekatnja tidak lain daripada devaluasi yang diselimuti.

a) STRATEGI DASAR EKONOMI DAN KEBIDJAKSANAAN DJANGKA PENDEK MERUPAKAN SATU KESATUAN

Seperti diketahui, Dekon terdiri dari dua bagian; yang pertama menentukan strategi dasar ekonomi Indonesia, dan yang kedua menetapkan kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. Dalam menilai Dekon sangat perlu ditekankan tentang taker-pisah²kannja kedua bagian ini. Djika hal ini dilupakan, dan djika ada tendens untuk hanya memberi perhatian kepada kebidjaksanaan djangka pendek karena ini dianggap sebagai satu²nja bagian yang langsung dapat mempengaruhi keadaan ekonomi, sedangkan strategi dasar dianggap sepi dan diremehkan, maka ini berarti menghilangkan hakekat dan arti pokok daripada Dekon itu. Demikian pula adalah keliru untuk meremehkan kebidjaksanaan djangka pendek dan hanya menganggap penting strategi dasar ekonomi. Strategi dasar ekonomi hanya dapat dilaksanakan melalui sesuatu atau beberapa kebidjaksanaan djangka pendek.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, susunan ekonomi yang harus dibangun pada tahap pertama daripada Revolusi Indonesia ialah „susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa exploitation de l'homme

par l'homme." (lihat *Deklarasi Ekonomi*, fasal 3).

Penegasan strategi dasar ini bukan hanya berarti bahwa tahap pertama harus diselesaikan sebelum kita bisa mulai dengan tahap kedua; ia juga berarti bahwa karena Sosialisme merupakan perspektif daripada Revolusi Indonesia, maka langkah² yang diambil untuk menyelesaikan tahap pertama tidak boleh berlawanan atau merintangi tugas membangun ekonomi Sosialis yang menjadi tugas tahap kedua.

Penegasan strategi dasar ekonomi Indonesia ini mempunyai arti yang sangat penting. Sudah terlalu lama ada orang² bitjara pandjang lebar tentang membangun Sosialisme Indonesia, tentang membangun ekonomi Sosialis, tetapi tidak bitjara tentang mutlak perlunya ekonomi Indonesia lebih dulu dibersihkan dari sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme. Mereka bitjara setjara gagah²an tentang „menghantjurkan kapitalisme“, tapi diam dalam seribu bahasa tentang menghantjurkan sisa² imperialisme dan feodalisme. Ini adalah sama dengan omongkosong, karena membangun Sosialisme didalam satu masyarakat dimana masih terdapat sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme adalah tidak mungkin samasekali, atau akan merupakan „Sosialisme imperialis“ dan „Sosialisme feodal“. Malahan jika ada orang² berbitjara mengenai membangun Sosialisme tanpa berbitjara tentang mutlak-perlunya membersihkan ekonomi Indonesia dari imperialisme dan feodalisme, ini pada hakekatnya berarti melindungi imperialisme dan feodalisme atas nama „Sosialisme“.

Tentu saja, yang diperlukan bukan hanya berbitjara mengenai mutlak-perlunya membersihkan masyarakat Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme, melainkan lebih² mengambil tindakan kongkrit guna membersihkan sisa² itu. Bukankah salahsatu tjiri orang revolutioner ialah satunja kata² dengan perbuatan?

Mengapa strategi dasar ekonomi Indonesia dan kebidaksanaan jangka pendek seperti yang dikemukakan didalam Dekon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di-pisah²kan? Kebidaksanaan jangka pendek dibidang ekonomi adalah langkah² praktis dan segera yang harus diambil oleh Pemerintah dan Rakjat Indonesia dalam rangka menjusun ekonomi anti-imperialisme dan anti-feodalisme, sedangkan kebidaksanaan jangka

pendek hanya akan dapat direalisasi jika dilakukan sesuai dengan strategi dasar, yaitu dengan berpegang teguh pada prinsip² membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme harus menjadi dasar dalam menentukan setiap langkah dibidang kebidaksanaan jangka pendek.

Dekon selanjutnya menegaskan bahwa „Agar tercapai kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi, maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakjat yang terorganisasi“ dan pula bahwa pengintegrasian itu selanjutnya dapat ditjapai „dengan mengintensifkan rituling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah²,, dibawah pimpinan saja sendiri“ (Presiden Sukarno) (lihat Dekon, fasal 34). Penegasan² ini merupakan salahsatu bagian yang amat penting daripada seluruh Deklarasi Ekonomi. Kalau bagian pertama tentang strategi dasar ekonomi menetapkan rintangan² strategis yang harus disingkirkan dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini, yaitu imperialisme dan feodalisme, sedangkan kebidaksanaan jangka pendek menetapkan tugas² yang sangat urgen yang harus segera diselenggarakan dibidang ekonomi, maka penegasan² tentang kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM, pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi serta pelaksanaan rituling dibawah pimpinan Presiden Sukarno adalah merupakan sjarat² mutlak guna melaksanakan Dekon.

Gelombang sambutan sedjak segera sesudah Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret 1963 ditandai bukan hanya oleh pernyataan² dukungan terhadap Dekon itu melainkan lebih² ditekankan didalam hampir setiap pernyataan sambutan bahwa sjarat-sjarat pelaksanaan untuk program yang baik ini harus ada, yaitu supaya segera dibentuk Kabinet Gotong Royong yang berporoskan NASAKOM. Tuntutan ini mentjerminkan kesadaran dan kejakinan tekad Rakjat yang sudah lama timbul berdasarkan pengalaman kegagalan berbagai program dibidang ekonomi. Tentu sebab² dari kegagalan itu matjam². Ada yang disebabkan karena program² itu sendiri mengedjar tudjuan² yang tidak tepat sehingga tidak didukung malahan dilawan oleh Rakjat dan dengan sendirinya tidak dapat ditjapai. Ada

jang menetapkan tudjuan² jang tepat tetapi tjara² jang ditentukan untuk mentjapai tudjuan² itu tidak tepat, tidak berdasarkan kenjataan² jang kongkrit, tidak berdasarkan kekuatan² Rakjat atau merugikan kepentingan² Rakjat.

Dengan diumumkannja Dekon, maka Rakjat Indonesia sekarang mempunyai program ekonomi dengan tudjuan² dan tjara² pelaksanaannja jang tepat, jang pada pokoknja berdasarkan kepentingan dan kekuatan Rakjat. Tetapi djika sjarat² mutlak bagi pelaksanaannja, terutama dibidang politik, tidak terwujud, maka program itupun tidak akan berhasil dan akan mengalami nasib jang sama dengan ber-matjam² program ekonomi sebelumnya.

Djika saja berbitjara dimuka Sdr², dimuka para sardjana, tentang pentingnja sjarat² pelaksanaannja, maka ini berarti bahwa kita tidak mengakui adanja garis pemisah antara dalil² ilmiah dengan sjarat² pelaksanaan, antara masalah ekonomi dengan masalah politik. Dan bahwasanja Sdr.² mengundang saja untuk berbitjara tentang Dekon berarti bahwa Sdr.² sendiri djuga sama sekali tidak berpegang pada gagasan jang palsu, jang memisahkan dalil² ilmiah dengan pelaksanaan, jang memisahkan soal² ekonomi dari soal² politik. Memang ada sardjana² jang berpendapat bahwa tugas mereka terbatas kepada merumuskan dalil², sedangkan mengenai pelaksanaan adalah urusan kaum politisi, atau berpendapat bahwa soal² ekonomi harus dipetjahkan setjara ekonomi dan oleh sardjana² ekonomi, tak perlu dihubungkan dengan soal² politik, tak mungkin dipetjahkan oleh kaum politisi. Sardjana² jang demikian, menurut pendapat saja berbuat bertentangan dengan prinsip² ilmiah. Apa gunanja sesuatu dalil, betapapun sempurna, lengkap, indah dan mengagumkan, djika konsepsi itu tidak sekaligus menetapkan sjarat² pelaksanaannja, djika dalil² itu tidak sesuai dengan sjarat² jang mungkin ditjptakan, atau dengan perkataan lain djika dalil² atau teori² itu terpisah dari politik. Sebagaimana kita ketahui, politik adalah pusat pentjerminan dari ekonomi, atau sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan politik bukanlah tudjuan revolusi tetapi hanja suatu „djembatan emas“ atau alat untuk membangun suatu sistim ekonomi jang membebaskan Rakjat kita dari penghisapan dan kemiskinan. Sardjana² me-

mang perlu setjara aktif memperhatikan dan berurusan dengan kal² pelaksanaan dan dengan sjarat² jang diperlukan untuk mendjamin pelaksanaan sesuatu dalil. Ini berarti benar² memenangkan prinsip „ilmu untuk Rakjat“ dan mengalahkan prinsip „ilmu untuk ilmu“.

Ketetapan-hati jang timbul dikalangan Rakjat untuk memperdjua sjarat², terutama sjarat² politik bagi pelaksanaan Dekon karena tidak mau melihat program ekonomi jang baik ini mengalami kegagalan, adalah berlainan samasekali dengan semangat apatisme dan defaitisme jang sengadja di-sebar²kan oleh kaum reaksi-oner jang sinis. Mereka sengadja memobilisasi tjontoh² kegagalan daripada program ekonomi dan keuangan selama ini untuk men-tjoba² mejakinkan bahwa Rakjat Indonesia tidak mampu mengatasi kesulitan² ekonomi jang sedang menimpa negerinja. Tudjuan lebih djauh jalah untuk menjebarkan konsepsi mereka supaja kita mendasarkan usaha² kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada penanaman modal monopoli asing, pada „bantuan“ ekonomi AS setjara langsung atau tak langsung dengan sjarat² politik anti-NASAKOM serta anti-ekonomi terpimpin berdasarkan Manipol. Pada hakekatnja, sinisme mereka bersumber pada penolakan mereka terhadap prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme jang djustru mendjiwai Dekon. Dekon mengharuskan adanja semangat patriotisme dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dan Dekon menetapkan bahwa kesulitan² itu hanja dapat diatasi dengan mendasarkan diri pada kekayaan alam negeri kita sendiri, pada kekuatan² dan potensi Rakjat, pada kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM. Sedangkan bagi Rakjat djustru prinsip dan semangat ini, djustru ketentuan ini membuka kemungkinan bagi berhasilnja Dekon itu.

Jang penting bagi Rakjat sekarang jalah mendjamin supaja sjarat² pelaksanaannja berwujud, jaitu *Kabinet Gotong Rojong jang berporoskan NASAKOM*. Gagasan NASAKOM telah terwujud didalam banjak Lembaga Negara, jaitu didalam DPRGR, MPRS, MPN, MPPR, Depernas, DPA, dibanjak DPRD dan BPH. Demikian pula, NASAKOM merupakan poros didalam Front Nasional jang bertugas untuk menghimpun kekuatan² Rakjat dan jang harus memegang peranan penting dalam pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Malahan pimpinan Bank Pembangunan Indonesia se-

karang sudah berkomposisi NASAKOM. Kenyataan² ini merupakan kemajuan yang penting sekali dalam perjuangan Rakyat Indonesia untuk mentjapai perubahan lapangan sistim politik. Tetapi kemajuan² ini hanya akan berubah menjadi suatu kemenangan yang pasti jika telah tertjapai tuntutan Rakyat supaya poros NASAKOM diwujudkan pula didalam badan eksekutif negara, yaitu didalam Kabinet yang merupakan badan negara yang menentukan dan yang setjara langsung bertanggungjawab atas semua tindakan pemerintahan disemua bidang.

Negeri kita telah mentjapai kemerdekaan politik yang sekanang dilengkapi lagi dengan berahirnya riwayat kolonialisme Belanda di Irian Barat. Tetapi kemerdekaan politik tidak bisa penuh, ia hanya setengah², selama kemerdekaan ekonomi belum tertjapai. Tugas terpenting didalam tahap pertama daripada Revolusi Indonesia, seperti ditetapkan didalam Dekon, ialah untuk menjusun suatu ekonomi yang nasional dan demokratis, atau yang bersih dari imperialisme dan feodalisme. Tugas ini adalah sama dengan mentjapai kemerdekaan ekonomi yang berarti untuk membikin penuhnya kemerdekaan politik. Atau dengan kata² lain, jika tahap pertama telah diselesaikan, maka negeri kita akan menjadi negeri yang merdeka penuh, dan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 dapat diselesaikan sampai ke-akar²nja.

Oleh karena itu, kuntji daripada suksesnja tahap pertama itu ialah perjuangan untuk mentjapai ekonomi nasional dan demokratis. Tetapi kuntji daripada suksesnja perjuangan ini ialah terbentuknja kekuasaan politik yang sesuai dengan susunan ekonomi yang harus dibangun. Jika dikatakan bahwa Kabinet berporoskan NASAKOM adalah merupakan kekuasaan politik yang sesuai dengan susunan ekonomi yang mau dibangun, ini adalah karena poros NASAKOM merupakan djaminan bagi suatu kekuasaan politik yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Adalah tidak mungkin samasekali untuk menjusun suatu ekonomi yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme tanpa suatu kekuasaan politik yang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme pula.

Dengan demikian djelaslah bahwa pembentukan Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM merupakan sjarat mutlak, baik untuk tertjapainja strategi

dasar ekonomi Indonesia maupun untuk berhasilnja kebidjaksanaan djangka pendek. Sudah tentu kekuasaan politik berporoskan NASAKOM ditentang keras oleh kaum imperialis dan kakitangan²nja, karena kekuasaan demikian bisa konsekwen anti-imperialis. Soalnja sekarang ialah, mendengarkan otjehan dan gertakan imperialis atau memenuhi tuntutan Rakyat.

b) ARTI TUGAS MEMBERSIHKAN EKONOMI INDONESIA DARI SISA² IMPERIALISME DAN FEODALISME

Saja ingin mengemukakan beberapa hal yang lebih kongkrit mengenai tugas untuk membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Dengan adanya Dekon, maka telah ditetapkan dengan sangat tegas bahwa setiap usaha yang diambil dalam bidang ekonomi harus didjwai oleh prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Dekon dengan sangat tegas mengatakan bahwa sisa² imperialisme dan feodalisme harus *dibersihkan*, harus *dikikis habis*. Dibersihkan berarti benar² bersih, tidak ada bekas²nja. Dikikis habis menekankan, harus *habis*; bukan hanya dikikis, tetapi dikikis *habis*.

Ini adalah merupakan tugas yang tidak ringan yang meminta perhatian dan perjuangan yang terus-menerus. Dan perjuangan itu tidak akan bisa dilakukan apalagi mentjapai sukses jika kita tidak mengetahui dengan djelas lebih dahulu imperialisme² yang mana yang harus dibersihkan, dikikis habis, jika tidak diketahui setjara kongkrit tjara² yang dipergunakan oleh imperialisme untuk mempertahankan dirinja didalam ekonomi kita dan untuk memperluas sajanja ataupun untuk memulihkan posisinya.

Setelah riwayat imperialisme Belanda di Irian Barat habis, sedangkan posisi² pokok modal Belanda telah dapat dirombak dengan pengambilalihan perusahaan² Belanda (ketjual modal Belanda dalam Shell dan Unilever), maka imperialisme yang paling berbahaya bagi Rakyat Indonesia dan oleh karena itu menjadi musuhnja yang nomor satu, adalah imperialisme Amerika Serikat. Imperialisme AS mempunyai kedudukan² penting didalam ekonomi kita, terutama dibidang minyak (Stanvac, Caltex). Mereka tidak hanya memegang monopoli ber-sama² dengan modal Inggris-Belanda (Shell) melainkan djuga memperoleh hak² istimewa mengenai

penggunaan devisa. Minyak kita yang dikuasai oleh mereka merupakan sumber keuntungan yang sangat besar bagi kaum kapitalis monopoli AS. Eksport minyak mentah setahun rata² 30% dari seluruh eksport Indonesia. Disamping itu, imperialisme AS sudah lama mengadakan hubungan² ekonomi dengan Indonesia dengan memberikan apa yang dinamakan „bantuan“ ekonomi kepada Indonesia (sebanjak \$ 639 juta sedjak 1950, menurut Duta Besar AS di Djakarta, H. Jones). Hingga sekarang AS masih merupakan trading partner Indonesia yang terpenting. Kita mengetahui pula bahwa imperialisme AS sedang berusaha keras untuk memperdalam dan memperkuat posisinya melalui „bantuan“ ekonomi yang lebih banyak dan melalui matjam² tjara penetrasi seperti misalnya pengiriman „peace corps“ terutama diperguruan tinggi, keolahragaan dan sebagainya.

Jang sangat perlu diperhatikan pada saat ini ialah usaha² imperialisme AS untuk mentjampuri hal² ekonomi kita melalui „bantuan ekonomi“ jang mau diberikan kepada kita. Sudah menjadi rahasia umum bahwa „bantuan ekonomi“ tersebut disertai dengan berbagai sjarat dibidang politik luarnegeri dan politik dalam-negeri, dan diselubungi dengan apa jang dinamakan „program stabilisasi ekonomi“. Apakah jang menjadi tudju² pokok daripada „program stabilisasi ekonomi“ kaum imperialis Amerika itu? Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bahan jang disusun oleh kalangan² pemerintah AS, termasuk rombongan ahli² ekonomi jang pernah berkundjung ke Indonesia dalam tahun 1961. Hal ini bisa kita pelajari dari bahan jang terkenal dengan nama „Humphrey Report“ jang telah beredar luas sehingga sudah menjadi rahasia umum.

„Program stabilisasi ekonomi“ buatan AS itu berarti a.l.: meniadakan artipenting serta menghentikan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. II mengenai Pola Pembangunan jang bersifat anti-imperialis dan anti-feodal itu karena dianggap „tidak mutlak“, „tidak realistis“, „terlalu ambisius“ dan matjam² lagi; tidak meneruskan usaha² untuk mentjapai self-sufficiency dalam bahan² sandangpangan jang pokok, terutama beras dan tekstil karena menurut kaum imperialis AS, Indonesia „lebih beruntung“ djika tetap membeli bahan² itu dari luarnegeri; tidak membangun industri dasar; tidak mewe-

judkan politik supaya negara memegang peranan memimpin dalam ekonomi, baik mengenai sektor negara, jaitu perusahaan negara dibidang produksi dan distribusi jang vital, maupun mengenai peranan negara dalam memimpin perkembangan² ekonomi pada umumnya; menghentikan segala usaha untuk mengendalikan harga-harga dan membiarkan harga² sepenuhnya ditetapkan oleh faktor² didalam pasaran; menaikkan pajak² jang memberatkan beban Rakyat; memperbesar penanaman modal AS didalam ekonomi Indonesia dengan djaminan² tentang transfer² keuntungan² dsb; menghentikan politik luarnegeri jang anti-imperialis. Demikianlah setjara ringkas pokok² „program stabilisasi ekonomi“ jang mau dipaksakan kepada Indonesia.

Deklarasi Ekonomi djika dilaksanakan sungguh² merupakan suatu penolakan jang tegas terhadap „program stabilisasi ekonomi“ jang sedang giat diandjurkan oleh kaum imperialis AS dan kakitangan²nja dalam negeri.

Beberapa minggu jl. kita semua dikedjutkan oleh kurangadjaran penasehat Presiden Kennedy, Djenderal Louis C. Clay jang mengandjurkan supaya Indonesia djangan diberikan „bantuan ekonomi“ sebelum Indonesia mau „menghentikan petualangan² internasional“ (maksudnja perlawanan kita terhadap gagasan Federasi Malaysia dan terhadap imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme pada umumnya) dan sebelum Indonesia mau „membereskan ekonomi dalam negeri“. „Nasehat“ itu seluruhnja satu nada dengan saran² jang dimuat dalam „Humphrey Report“. Bedanja hanya, bahwa „Humphrey Report“ berusaha menjelimiti saran² jang kurangadjar itu dengan segala matjam pernjjataan „setudju“ dengan ekonomi terpinpin, ekonomi gotong-rojong dsb, sedangkan Djenderal Clay tidak ambil pusing dengan kemunafikan itu, dan menjatakan pendapat kaum imperialis AS tanpa tedeng aling².

Seperti sudah dikatakan diatas, tidak bisa diharapkan bahwa kaum imperialis akan membantu kita untuk membangun suatu ekonomi jang bersih dari sisa² imperialis, akan membantu kita untuk mengikis habis sisa² imperialisme itu. Dengan ini terasa betapa tepatnja Dekon jang menekankan bahwa dalam mengatasi kesulitan² ekonomi, kita harus berlandaskan dan berorientasi setjara mutlak pada potensi dan kekuatan Rakyat, kepada usaha² untuk menggali kekayaan alam negeri kita sen-

diri.

Kemerdekaan ekonomi hanya akan bisa ditjapai jika prinsip ini dipegang teguh. Betapa prinsip ini digero-woti dan diputarbalikkan oleh kaum imperialis dapat kita lihat dari "Humphrey Report" yang dengan tidak tahu malu, berbitjara mengenai kejaminannya tentang *„kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui bantuan asing"* ("Humphrey Report"). „Kemerdekaan" dimata kaum imperialis AS berarti ketergantungan kepada kaum imperialis AS seperti halnya „dunia merdeka" adalah dunia yang tergantung kepada mereka. Apa yang baru saja kutip dari "Humphrey Report" membuktikan betapa besar peranan „bantuan" AS dalam mempertahankan „kemerdekaan" yang tergantung itu.

Selanjutnya, mengingat hal² yang saya gambarkan diatas, ketetapan Dekon bahwa bilamana kekuatan² kita sendiri tidak mentjukupi maka barulah ditjari kredit² luar negeri, haruslah diartikan, bahwa, sesuai dengan dasar² ekonomi yang anti-imperialis, hanyalah negara² yang anti-imperialis pula, terutama negara² Sosialis, bisa diharapkan membantu kita sebagai partner yang sederajat berdasarkan prinsip² persamaan hak dan saling menguntungkan, bisa diharapkan membantu kita dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dan dalam membangun suatu ekonomi nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Hanya si Pandir dan kaum Manipolis munafik yang suka omongkosong bahwa kaum imperialis dapat membantu dalam membangun ekonomi yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Perjuangan untuk membersihkan ekonomi kita dari sisa² imperialis memang merupakan perjuangan yang banyak meminta perhatian dan tenaga. Perjuangan ini harus dilakukan tidak hanya terhadap sisa² imperialis yang masih ada didalam ekonomi kita, melainkan pula terhadap usaha² kaum imperialis untuk memperbesar peranan mereka didalam ekonomi kita dengan melalui tjara² baru, yaitu neo-kolonialisme, dengan menggunakan sisa² imperialis itu sebagai pangkalan dan mengambil untung dari kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Jika hal itu dibiarkan, maka ini berarti bahwa sisa² itu bukannya dikikis habis tapi malahan dikembangkan. Djadi, dalam melaksanakan kebidjaksanaan jangka pendek, sesuai dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, kita

sudah harus melawan neo-kolonialisme.

Dalam hubungan ini, saya merasa perlu menjinggung peranan Dewan Moneter Internasional (IMF) dimana Indonesia masih menjadi anggotanya. DMI itu merupakan suatu organisasi yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menggunakan kesulitan² moneter negara² didunia kapitalis yang timbul sebagai akibat adanya krisis² ekonomi periodik, untuk memaksakan politik moneter yang diandjurkan oleh DMI dan dengan demikian memudahkan kaum monopoli AS untuk mengontrol dan menjampuri setjara intensif politik moneter negara² anggota² DMI.

DMI itu sebenarnya apa? DMI benar-benar merupakan organisasi yang sepenuhnya dikuasai negara² imperialis, terutama imperialisme AS. Karena djumlah suara masing² anggota ditentukan menurut kwota uang sero masing² dan bukan menurut prinsip „satu negara satu suara", maka Amerika Serikat sendiri memegang tidak kurang dari 28% daripada suara didalam DMI, dan Inggris memegang 13,4%, sehingga dua negara imperialis itu sudah memegang lebih dari 41% daripada suara didalam DMI. Jika ini ditambah dengan negara² imperialis lainnya di Eropa Barat, maka jelaslah bahwa negara² imperialis itu mempunyai mayoritas yang mutlak. Djangan ditanya mengenai persentase Indonesia dalam suara DMI; satusetengah persentase pun tidak sampai.

Tak dapat disangkal bahwa keanggotaan Indonesia didalam badan tersebut yang sepenuhnya dikuasai oleh "the old established forces" samasekali tidak sesuai dengan politik luar negeri kita; ia juga membuka kemungkinan lebar bagi kaum imperialis untuk ikut menentukan politik negeri kita dalam bidang yang begitu penting, yaitu bidang moneter.

DMI itulah yang paling giat mengandjurkan supaya Indonesia suka mengadakan devaluasi. DMI itulah yang setiap tahun mengadakan penelitian² yang dalam mengenai keadaan devisa kita. DMI itulah yang setjara terang² mau dipergunakan oleh imperialisme AS untuk ikut memaksa negeri kita supaya suka menjalankan „program stabilisasi ekonomi" yang telah saja sebut tadi. DMI itulah yang sekarang mau dipergunakan oleh kaum monopoli Belanda untuk mendesak negara kita supaya mau membayar „ganti-kerugian" yang

ajak" kepada perusahaan² Belanda yang telah diambil-alih.

Bukankah semuanya ini membuktikan, bahwa DMI merupakan salahsatu „sisa imperialis" atau lebih tepat imperialis itu sendiri yang benar² harus „dikikis habis"?

Sifat ketergantungan ekonomi Indonesia pada pokoknya terletak dalam kenyataan bahwa sektor import-eksport masih memegang peranan yang sangat menentukan dalam seluruh ekonomi, terutama sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sumber barang² konsumsi yang pokok serta barang² yang diperlukan untuk berlangsungnya seluruh sektor produksi, termasuk produksi industri. Selama sifat ini belum diakhiri, adalah tidak mungkin untuk membangun suatu ekonomi yang benar² merdeka. Untuk mentjapai tujuan ini, Dekon memberikan dasar² yang sangat kokoh, yaitu dengan menetapkan bahwa „yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar² untuk industrialisasi", dan bahwa „..... kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertumbuhan" (lihat Dekon pasal 6), atau dalam kata² lain, kita harus membangun ekonomi nasional dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis dan dengan industri sebagai tulang punggung.

Disamping usaha² yang mutlak perlu didalam negeri untuk mentjapai tujuan ini, maka perubahan² dalam struktur perdagangan luarnegeri kita juga sangat dibutuhkan. Sifat ketergantungan tersebut diatas memang timbul sebagai akibat politik kaum kolonialis Belanda dalam memperkembangkan hubungan² ekonomi negeri kita dengan luarnegeri yang terus-menerus mempertahankan posisi kita sebagai sumber bahan² mentah dan sebagai pasaran barang² industri negara² kapitalis yang maju. Hubungan² ekonomi dengan negara² kapitalis yang manapun selalu pada pokoknya mengedjar tujuan² yang demikian, karena negara² itu sangat berkepentingan supaya negara² yang ekonominya masih terbelakang (termasuk Indonesia) tetap menjadi pasaran bagi barang² hasil industrinya sendiri dan karena itu berkepentingan untuk menghambat perkembangan² industri yang dapat menjadi saingan bagi industri mereka sendiri.

Hubungan² dagang Indonesia dengan luarnegeri masih untuk sebagian yang terbesar sekali ditunjukkan ke-

negara² kapitalis. Disamping hal² diatas, ini juga berarti bahwa ekonomi kita selalu sangat dipengaruhi oleh naik-turunnya tingkat kegiatan ekonomi di-negeri² kapitalis yang makin sering dilanda oleh krisis. Oleh karena itu semua, perubahan² fundamental dalam struktur perdagangan luarnegeri memegang peranan penting dalam mentjapai ekonomi yang bersifat nasional-demokratis, ekonomi progresif. Seperti dinjatakan didalam Dekon, maka „pelayanan kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk memperkuat politik bebas dan aktif" (Dekon, pasal 23). Dekon juga dengan sangat tepat menekankan tentang bahajanya blok² ekonomi (yang dimaksudkan dengan ini ialah khususnja Pasaran Bersama Eropa) karena „menimbulkan diskriminasi lapangan perdagangan antar negara, dan dengan demikian memperkuat dominasi ekonomi dari 'the old established forces'". Selandjutnja dinjatakan pula bahwa „Pemerintah berusaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, yang tidak hanya menghambat kelantjaran perdagangan internasional, akan tetapi yang disamping itu ter-lebih² menekan perkembangan pembangunan ekonomi di-negara² yang baru saja memasuki alam kemerdekaan". (pasal 10).

Dengan demikian Dekon memberi petunjuk² yang sangat jelas mengenai politik perdagangan luarnegeri Republik kita. Satu²nja dasar yang kokoh bagi politik perdagangan luarnegeri kita ialah memperluas hubungan-hubungan ekonomi, khususnja hubungan² dagang dengan "the new emerging forces" berdasarkan prinsip² persamaan dan saling menguntungkan, terutama dengan negara² Sosialis. Belakangan ini, disamping Indonesia, sudah banyak negara² Asia-Afrika yang menentang Pasaran Bersama Eropa karena tindakan² diskriminasi kaum monopoli Eropa Barat terhadap negara² bukan anggota PBE yang sangat merugikan negara² yang ekonominya terbelakang. Adalah samasekali tidak tepat fikiran sementara orang bahwa satu²nja tjara untuk mengatasi diskriminasi negara² kapitalis, terutama PBE, ialah dengan mengadakan sematjam asosiasi dengan PBE itu atau malahan untuk menjadi anggotanja. Ini berlawanan samasekali dengan tujuan² menghapuskan sifat ketergantungan ekonomi kita. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa ide supaya Indonesia ber-

asosiasi dengan atau menjadi anggota PBE ternyata menjadi idam²an kaum kapitalis monopoli Belanda yang sedang berusaha untuk menjusup kembali kedalam ekonomi Indonesia.

Kalau dibidang olahraga saja kita sudah bersempojan "games of the new emerging forces" (Ganefo), maka dibidang perdagangan luarnegeri sudah lebih daripada semestinya jika kita bersempojan "*trade with the new emerging forces*". Sembojan ini dengan sendirinya tidak berarti bahwa Indonesia seharusnya menghentikan perdagangannya dengan negara kapitalis, tetapi ia menggambarkan *orientasi yang seharusnya dikembangkan dalam hubungan² dagang berdasarkan prinsip² persamaan hak dan saling menguntungkan*. Hanya perdagangan luarnegeri yang berorientasi kepada "the new emerging forces" dan tidak pada "the old established forces" seperti yang berlaku sekarang ini, dapat merupakan sendi kuat bagi usaha² kita untuk mentjiptakan suatu ekonomi nasional yang benar² merdeka.

c) MENGIKIS HABIS SISA² FEODALISME

Demikianlah beberapa pokok mengenai pelaksanaan Dekon yang khususnya berhubungan dengan tugas mengikis habis sisa² imperialisme. Disamping tugas itu, Dekon juga menetapkan tugas untuk mengikis habis sisa² feodalisme sebagai rintangan strategis dalam tudjuan kita pada tahap pertama ini untuk membangun suatu ekonomi yang nasional dan demokratis. Memang benar demikian. Adanya sisa² feodalisme yang masih meradjalela dalam ekonomi Indonesia bukan hanya merupakan dasar sosial daripada imperialisme — dan oleh karena itu memang sengadja dipertahankan dan dipupuk oleh kaum kolonialis Belanda — ia juga merupakan penghambat dalam membangun ekonomi yang berindustri dimana sektor pertanian menjadi basis yang kokoh dan bukan sumber kemiskinan dan penghisapan kolonial dan feodal seperti halnya sekarang.

Jika saja katakan bahwa sektor pertanian (disamping perkebunan) harus menjadi basis daripada ekonomi negeri kita, ini berarti bahwa sektor pertanian harus dapat menjediakan bahan² pokok, khususnya pangan. Sektor pertanian harus dikembangkan begitu rupa sehingga tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri, melainkan juga untuk dapat dieksport dan dengan demikian menghasilkan devisa untuk membeli barang² modal serta lain² kebutuhan industri. Selama sektor pertanian belum mampu memegang peranan ini, negeri kita akan terus-menerus tergantung kepada import untuk sebagian dari bahan² pangan dan tidak akan bisa memperbesar daya penghasilannya supaya dapat menjukupi kebutuhan² kita dalam masa pembangunan.

Penghambat yang terpokok dalam mentjapai tudjuan ini ialah justru masih bertjokolnya sisa² feodalisme, yang harus disapu bersih itu. Sisa² feodalisme yang pada pokoknya berupa sistim monopoli pemilikan tanah oleh tuantanah² merupakan sebab utama mengapa produksi pertanian dinegeri kita masih sangat terbelakang.

Dekon dengan tepat menyebut Undang² Perdandjian Bagi-Hasil dan Undang² Pokok Agraria sebagai landasan-landasan terpenting dalam menanggulangi persoalan ekonomi. Kedua undang² ini disokong dan dituntut pelaksanaannya oleh PKI. Undang² Perdandjian Bagi-Hasil memberi kemungkinan bagi kaum tani untuk memperoleh sebagian yang lebih besar daripada hasil tanaman mereka, sedangkan Undang² Pokok Agraria ditudjukan untuk membatasi pemilikan tanah tuantanah². Kedua Undang² ini merupakan alat yang penting dalam tangan kaum tani, khususnya bagi tanimiskin dan tani tak bertanah, untuk mengurangi penghisapan feodalisme. Adanya dua Undang² ini merupakan langkah² penting dalam memobilisasi kaum tani untuk berdjung melawan sisa² feodalisme dan untuk menuntut langkah² yang lebih radikal lagi guna mengachiri samasekali sisa² feodalisme, yaitu melalui suatu landreform atau perubahan tanah yang benar² mengikis habis sisa² feodalisme.

Undang² Pokok Agraria berbeda dengan Program Agraria PKI. UU Pokok Agraria hanya bertudjuan untuk membatasi penghisapan feodal agar dapat menguntungkan kaum tani, sedangkan Program Agraria PKI menuntut pensitaan tanah tuantanah serta pembagian tanah tuantanah itu kepada kaum tani, terutama tanimiskin dan buruhtani, dengan tjuma².

Jang sangat penting pada waktu ini ialah untuk mendjamin supaya kedua undang² tersebut dilaksanakan dengan konsekwen dan benar² dapat diselesaikan pe-

laksanaannya tepat pada waktunya. Ternyata bahwa pelaksanaan Undang² Pokok Agraria berjalan dengan sangat lambat. Manipulasi banjak terdjadi, negara ditipu oleh tuantanah² dengan setjara formil mem-bagi² tanah² jang luas kepada anggota² keluarga jang bukan penggarap. Dari tanahlebih dan tanah² lain seluas kira² 1 djuta Ha jang harus dibagikan sebelum achir tahun ini, belum 1% jang telah selesai dibagikan. Selain daripada itu, tjara membagikan tanahlebih sering tidak sesuai dengan penetapan undang², sehingga jang menerima tanahlebih itu malahan seringkali adalah keluarga tuantanah sendiri jang bukan penggarap. *Semua ini dimungkinkan, karena operasi jang dijalankan bukan operasi radikal.* Selanjutnya perlu ditjatat bahwa sjarat² pembayaran sering sangat memberatkan kaum tani jang menerima tanahlebih sehingga dibeberapa daerah mereka merasa lebih beruntung dengan pelaksanaan Undang² Perdijandjian Bagi-Hasil karena memperoleh bagian jang lebih besar dari hasilnya daripada djika harus membayar tjtijilan untuk tanahlebih jang mereka dapat. Kaum tani telah menjambut baik pernjjataan Menteri Agraria dan Pertanian beberapa minggu jl. jang mendjandjikan bahwa pembagian tanahlebih dalam rangka UUPA, akan selesai dilaksanakan sebelum achir tahun ini. Bagi kaum tani tidak djelas langkah² apa jang akan diambil oleh Menteri, tetapi karena sesuai dengan kepentingannya, kaum tani telah menjatakan kesanggupannya untuk berdjuang terus guna mendjamin suksesnya pelaksanaan UUPA tepat pada waktunya. Sikap ini adalah sangat sesuai dengan Dekon.

Sampai sekarang masih banjak sekali rintangan jang dialami kaum tani dalam perdjuangannya untuk melaksanakan kedua undang² ini, karena ternyata bahwa aparatur pemerintahan di-daerah² jang diserahi tugas dalam hal ini masih banjak mewakili kepentingan² tuantanah. Disamping itu, kaum kapitalis birokrat ternyata sekarang makin banjak terdjalin kepentingan²nya dalam mempertahankan sisa² feodalisme sebagai sumber penghisapan bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, kaum tani dalam perdjuangannya melawan sisa² feodalisme harus melakukan perdjjuangan jang terus-menerus melawan kaum penghisap besar, jaitu kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah.

Dalam hubungan dengan hal ini, memang dikalangan

sardjana² tertentu terdapat pendapat bahwa pemilikan tanah feodal pada umumnya tidak merupakan persoalan di Indonesia dan dengan demikian mereka berusaha membantah pendirian bahwa di Indonesia terdapat sisa² feodalisme jang kuat. Kaum tani sendiri jang mengalami penghisapan feodal setiap hari telah memberi djawaban jang tepat terhadap pendapat, jang sangat keliru ini dengan mengadakan berbagai, bentuk aksi terhadap tuantanah. Saja berpendapat, bahwa para sardjana djuga dapat memberikan sumbangannya jang berharga sekali dalam ikut mengadakan penelitian mengenai hubungan agraria, dilihat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial dan kebudajaan. Dengan demikian, para sardjana akan bisa ikut setjara aktif dalam pekerjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi.

d) PERANAN SEKTOR KOPERASI DAN SEKTOR SWASTA

Sebelum saja mengachiri bagian pertama dari tjera-mah ini mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia, saja ingin memberi beberapa pendjelasan mengenai ketentuan Dekon jang menjatakan bahwa: *„Dalam perdjjuangan untuk menjelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunya untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Negara”.* (Lihat Dekon, fasal 5). Ini berarti bahwa pada tahap pertama revolusi kita, ekonomi harus terdiri dari tiga sektor, jaitu *sektor negara* jang memegang posisi komando, *sektor koperasi* dan *sektor swasta*.

Umumnya sudah ada pengertian jang boleh dikatakan merata mengenai posisi memimpin jang harus dipegang oleh sektor negara. Jang masih sering kurang djelas ialah fungsi serta posisi daripada sektor koperasi dan sektor swasta. Adakalanya kedua sektor itu hanya dibedakan dalam arti bentuk-juridis daripada perusahaan jang bersangkutan. Koperasi sering dianggap sebagai salahsatu bagian daripada sektor swasta; bahkan tidak sedikit „koperasi” jang sebenarnya adalah gabungan perusahaan² swasta jang menjalahgunakan nama koperasi guna memperoleh berbagai fasilitas.

Pengertian ini adalah keliru. Sektor koperasi djustru mempunyai suatu fungsi tertentu jang sangat berbeda dengan sektor swasta, jaitu untuk mempersatukan Rakjat pekerdja menurut lapangan penghidupannya masing² dan untuk menghambat proses diferensiasi antara produsen-produsen ketjil, dan melalui persatuan dan kerdjasama ini Rakjat pekerdja dapat mengurangi penghisapan tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, tengkulak dan kapitalis² atas diri mereka. Dengan demikian, sektor koperasi membantu Rakjat pekerdja, terutama kaum produsen ketjil untuk membela diri terhadap penghisapan feodal dan terhadap penghisapan kapitalis. Tugasnya terbatas pada mengurangi penghisapan dan bukan menghapuskannya. Penghisapan baru dihapuskan pada tahap kedua, jaitu dalam ekonomi Sosialis. Tetapi sektor swasta dengan sendirinya tidak mempunyai tugas untuk mengurangi penghisapan, apalagi untuk menghapuskannya. Tugas sektor swasta ialah untuk menghimpun "funds and forces" nasional dan domestik dalam melawan imperialisme dan feodalisme. Penghisapan masih tetap terdjadi disektor swasta. Jang perlu bagi kaum buruh ialah memperoleh atau memperluas hak² demokrasi² untuk membela kepentingan²nya dalam batas² jang tidak merugikan perdjjuangan melawan musuh bersama seluruh Rakjat, jaitu imperialisme dan feodalisme.

Dalam menghambat proses diferensiasi antara produsen ketjil, maka koperasi dengan demikian menghambat lahirnya kapitalis² baru atas kerugian mereka jang ekonominya lebih lemah. Djika ini berhasil, maka koperasi dapat membawa produsen² ketjil langsung menudju ke-koperasi² Sosialis setelah tahap pertama revolusi selesai. Demikianlah fungsi daripada sektor koperasi pada tahap pertama, jaitu tahap untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis.

Dengan pendjelasan ini, maka mendjadi teranglah bahwa bentuk² koperasi jang terpenting ialah *koperasi kredit* untuk melepaskan produsen ketjil dari tjengkekaman tukang² idjon dan lintahdarat, *koperasi produksi* untuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan atau kerajinan tangan, dan *koperasi djual-beli* untuk membela kepentingan² bersama produsen ketjil dalam marketing dan dalam memperoleh bahan² jang mereka perlukan bagi usaha² produktif mereka. Koperasi² jang

demikian memegang peranan jang penting dalam usaha² untuk mempertinggi produksi sehingga sangat sesuai dengan tudjuan Dekon dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini.

Disamping itu, kaum buruh dan pegawai djuga sangat membutuhkan *koperasi konsumsi* guna melindungi kepentingan²nya sebagai konsumen dan melawan kenaikan² harga.

Demikian setjara singkat mengenai sektor koperasi pada tingkat revolusi sekarang. Sekarang beberapa pendjelasan mengenai sektor swasta.

Ada orang jang merasa sangat heran mengapa PKI menjetudjui adanya sektor swasta, dan malahan merasa tjuriga, apakah ini bukan suatu tipumuslihat jang lihay. Perlu saja menjatakan dengan tegas disini bahwa PKI tidak hanya menjetudjui adanya sektor swasta (nasional dan domestik) tetapi malahan mengandjurkannya. Dan sikap ini bukanlah sikap baru bagi PKI, ia merupakan sikap jang tegas dinjatakan dalam Program Umum PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI jang dilangsungkan dalam tahun 1954 dan jang kemudian diperkuat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (1959), jaitu sbb. :

"Ekonomi Indonesia disamping mengutamakan ekonomi sektor negara jang memimpin, tidak seharusnya menentang industri dan perdagangan jang diselenggarakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan terus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis dan feodal. Proteksi dan fasilitas harus diberikan kepada kapitalis² nasional, untuk berkembang dalam batas² jang tidak dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara, dan disamping itu ekonomi individuil Rakjat pekerdja harus dibantu".

Menurut PKI, persoalannya dalam ekonomi Indonesia ialah bukannya bahwa terdapat terlalu banjak kapitalis² nasional atau pengusaha² nasional, tetapi sebaliknya, masih terlalu sedikit. Kaum pengusaha nasional terutama mereka jang berusaha dibidang industri, harus diadjak untuk mengerahkan potensi²nya dalam membangun suatu ekonomi jang anti-imperialis dan anti-feodal. Kaum pengusaha nasional sangat berkepentingan dalam usaha² untuk mengachiri sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme, sebab ke-dua²nya merupakan halangan besar, halangan strategis, bagi perkembangan industri² nasional.

Sisa² imperialisme sangat membatasi perkembangan industri dalam negeri karena kaum imperialis berkepentingan untuk tetap memelihara negeri kita sebagai pasaran bagi hasil² industri mereka sendiri, sedangkan sisa² feodalisme merupakan penghalang terpenting dalam menjapai kesatuan pasaran nasional yang stabil yang merupakan sjarat mutlak bagi perkembangan industri nasional. Oleh karena itu, setjara objektif kaum pengusaha nasional, terutama pengusaha² industri memang dapat diadjak ikutserta dalam perjuangan Rakjat Indonesia melawan sisa² imperialisme dan feodalisme itu.

Kaum pengusaha nasional terutama dapat memainkan peranan yang penting dalam membangun sektor industri yang djustru sangat lemah sebagai akibat politik kolonial. Dengan demikian, kaum pengusaha nasional dapat membantu dalam menaikkan taraf produksi yang merupakan kuntji bagi kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Dengan adanya industri nasional yang giat, maka makin banjaklah bahan² mentah hasil kita sendiri yang akan bisa diolah didalam negeri, makin besar kemungkinan untuk mengurangi import barang² industri, dan makin luas lapangan kerdja bagi kaum buruh. Pada saat ini, mengerahkan potensi swasta, seperti yang ditetapkan dalam Dekon, harus berarti chususnja membuka kembali kemungkinan² bagi industri nasional yang sudah ada untuk menjapai kegiatan² pada tingkat kapasitas penuh, mengingat bahwa ada perusahaan² yang sudah terpaksa tutup atau bekerdja pada tingkat kapasitas yang sangat rendah karena kekurangan atau tidak adanya bahan² baku yang mereka perlukan, yang terlalu sering merupakan objek spekulasi, terutama oleh kaum kapitalis birokrat. Disamping itu, ia harus berarti pula melindungi industri² yang sudah ada, memberikan fasilitas² yang lebih luas kepada mereka serta memungkinkan dibangunkannya industri² baru dengan mempergunakan modal nasional dan domestik.

Dalam menentukan sikap kita terhadap sektor swasta, selalu perlu diingat, seperti ditegaskan pula didalam Dekon, bahwa perspektif daripada Revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Ini berarti bahwa sektor swasta harus memegang peranan sebagai pembantu sektor negara dan bahwa ia tidak mempunyai perspektif untuk berkembang menjadi kapitalisme monopoli yang menguasai seluruh kehidupan ekonomi.

Mendorong perkembangan swasta nasional samasekali tidak berarti membiarkan kapitalis² komprador yang hidup dari djasa² mereka dalam memelihara hubungan erat dengan kaum imperialis, dan djuga tidak dimaksudkan untuk membiarkan kapitalis² birokrat yang djustru merupakan salahsatu penghambat bagi perkembangan industri nasional.

Selanjutnja, perlu djuga ditekankan bahwa kaum imperialis sangat menentang adanya sektor negara yang memimpin didalam ekonomi kita, sudah dan akan terus berusaha untuk mendapatkan partner-partner mereka dalam sektor swasta guna melakukan penetrasi ekonominja dinegeri kita. Oleh karena itu, dari kaum pengusaha nasional sangat diharapkan semangat patriotisme, semangat menolak untuk memainkan peranan kaki-tangan imperialis, peranan menghambat penyelesaian Revolusi Agustus 1945.

Sektor swasta nasional yang patriotik hanya akan bisa berkembang djika diantara sektor itu dengan sektor negara terdapat hubungan yang erat dan yang saling membantu. Pemerintah membantu sektor swasta dengan memberikan fasilitas², perlindungan, pesanan² dan lain sebagainya, sedangkan sektor swasta membantu sektor Negara dengan mengerahkan seluruh potensinja untuk membangun industri nasional, dalam mempertinggi produksi nasional dan dalam menjediakan lapangan kerdja yang lebih luas. Perlu ada ketetapan yang djelas tentang bidang² bergerak bagi swasta nasional, tentang bidang² yang mana yang terbuka bagi swasta nasional dan bidang mana yang hanya terbuka bagi negara sadja.

Demikian beberapa pokok yang ingin saja kemukakan mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia seperti ditetapkan dalam Deklarasi Ekonomi. Dari uraian ini, dapat kita simpulkan setjara kongkrit sebagai berikut : *Usaha² untuk menjapai susunan ekonomi yang anti-imperialis dan anti-feodal, untuk menjapai susunan ekonomi yang progresif, harus dilakukan dengan mengorbankan kepentingan² mereka yang mewakili dan membela imperialisme dan sisa² feodalisme, jaitu dengan mengorbankan kepentingan² kaum penghisap besar di-kota² dan di-desa², atau kongkritnja tuantanah², kapitalis² birokrat dan kaum komprador, dan dengan membela kepentingan² Rakjat. Kemampuan seseorang untuk setjara ichlas dan sungguh² melaksanakan Dekon harus diukur berdasarkan kesungguhannya dalam melakukan tugas ini.*

II

HAL² JANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIDJAKSANAAN DJANGKA PENDEK

Didalam bagian kedua daripada tjeramah ini, ingin saja mengemukakan beberapa pandangan mengenai hal² jang perlu mendapat perhatian khusus dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek. Per-tama² saja ingin menekankan kepada tiga hal jang harus mendjadi pegangan bagi setiap usaha Pemerintah dalam rangka kebidjaksanaan djangka pendek ini :

Pertama, langkah² jang diambil tidak boleh bertentangan, malahan harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip anti-imperialisme dan anti-feodalisme, sesuai dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, dan ini berarti merealisasikan tujuan untuk membersihkan sisa² imperialisme dan feodalisme. Djadi, tidak boleh memperkokoh posisi ekonomi kaum imperialis dengan djalan membuka pintu bagi penanaman modal monopoli asing setjara klasik atau setjara neo-kolonialisme.

Kedua, faktor jang paling menentukan dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini, dan dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek ialah usaha² untuk menaikkan tingkat produksi dengan berorientasi pada tenaga produktif jang pokok, jaitu kaum buruh dan kaum tani. Ini harus berarti bahwa tidak boleh ada tindakan² jang merugikan tenaga² produktif itu, karena ini dengan sendirinja akan berarti bertentangan dengan tujuan untuk mentjapai kenaikan produksi.

Ketiga, usaha² untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini harus berdasarkan mobilisasi kekuatan dan potensi Rakjat dengan mentjiptakan kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM disegala bidang, dan menggali serta mengexploitasi kekayaan alam Indonesia sendiri. Merehabilitasi semua potensi ekonomi jang ada dan menggunakan segala dana rupiah dan devisa jang ada atau bisa disediakan setjara efektif dengan men-

tjegah pemborosan serta memberantas salahurus disegala bidang ekonomi dan keuangan.

Dekon dengan setjara tepat mengemukakan prinsip jang harus dipegang dalam menghadapi persoalan² ekonomi seperti inflasi, kekurangan devisa dsb. dengan mengatakan sbb. : *„Keadaan jang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah jang berdiri sendiri. Lebih² tidak mungkin kita atasinja hanya dengan tindakan moneter konvensional belaka. Sebaliknya, tidak ada djalan mudah jang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuali atas dasar menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita“*. (lihat Dekon, fasal 13).

Dengan demikian Dekon dengan tegas menolak pandangan sementara orang, termasuk pula ahli² ekonomi Indonesia tertentu jang masih berpegang pada teori² liberal atau burdjuis, bahwa kesulitan² ekonomi jang kita hadapi sekarang adalah merupakan suatu "viciouse cirkel" atau lingkaran jang tak berujung-pangkal. Pandangan ini saja anggap sangat perlu mendapat perhatian sardjana² progresif, terutama sardjana² ekonomi. Berpegang pada pandangan "viciouse cirkel" berarti beranggapan bahwa satu²nja tjara untuk mengatasi kesulitan ekonomi dewasa ini ialah dengan mengundang penanaman modal serta „bantuan“ ekonomi dari negara-negara imperialis. Berpegang pada pandangan "viciouse cirkel" berarti beranggapan bahwa hanya tindakan-tindakan teknis-moneter jang drastis saja jang akan mampu mengachiri keadaan kritis pada dewasa ini, jaitu tindakan² jang merugikan Rakjat dan menguntungkan modal monopoli asing karena memperkuat posisi dolar didalam ekonomi kita.

Sikap jang diambil didalam Dekon seperti saja kutip diatas merupakan dasar jang kuat bagi usaha² menjelajahi kesulitan² ekonomi sesuai dengan semangat patriotisme, sesuai dengan penolakan dan perlawanan terhadap neo-kolonialisme jang selalu siap pada setiap saat untuk „membantu“ kita keluar dari "viciouse cirkel" dan dengan demikian memasukkan kita kedalam perangkap mereka.

Kebidjaksanaan djangka pendek pada pokoknja ber-kisar disekitar usaha² untuk dengan selekas mungkin menjediakan pangan jang tjukup, terutama beras, dan

untuk menjediakan bahan² baku dan penolong serta spare-parts bagi industri dan sektor produksi. Dua hal itu ditentukan sebagai prioritas utama dalam djangka waktu 2 tahun ini. Dekon djuga menetapkan bahwa dua hal tersebut harus dibiayai dengan kekuatan kita sendiri, dan hanya „bilamana itu tidak mentjukupi, maka barulah ditjariakan kredit² luar negeri dengan sjarat² sesuai dengan ketentuan² dalam Ketetapan MPRS No. II, tahun 1960” (lihat Dekon fasal 30).

Ada pihak yang menarik kesimpulan bahwa Dekon merupakan sematjam program 2 tahun. Ini samasekali tidak benar. Kesimpulan sematjam ini menundjukkan bahwa Dekon samasekali tidak difahami. Dekon adalah merupakan program untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia tahap pertama. Program untuk menyelesaikan sesuatu revolusi dengan sendirinja tidak bisa diikat dengan waktu. Ini tergantung seluruhnja dari keadaan objektif serta imbangan kekuatan.

a) TENTANG "IRON STOCK" BERAS

Dekon menetapkan bahwa „Pemerintah harus mempunyai dan menguasai 'iron stock' beras” (fasal 30). Ini pada pokoknja berarti bahwa Pemerintah harus dapat menguasai persediaan dan distribusi beras pada umumnya. Maksud-tudjuan "iron stock" ialah untuk dapat menguasai pasaran beras guna mentjegah kenaikan harganya. "Iron stock" dipergunakan untuk mengachiri perdagangan gelap beras dan untuk memungkinkan seluruh Rakjat membeli beras yang dibutuhkannya dengan harga resmi. Djadi, maksudnja ialah untuk menurunkan kembali ongkos² hidup yang sudah sedemikian tinggi itu.

Karena hal ini merupakan sesuatu yang perlu diselenggarakan dengan segera, maka usaha² kearah tudjuan ini harus meliputi tindakan² djangka pendek untuk dengan segera menaikkan produksi pangan, terutama beras. Hal yang demikian memerlukan fasilitet² segera kepada kaum tani, untuk membantu usaha² produktif mereka, dan terutama mendirikan Dewan² Produksi dimana kaum tani yang terorganisasi diikutsertakan. Dalam rangka ini pula, perlu segera diambil tindakan² untuk mengachiri rintangan² yang dihadapi oleh kaum tani, chususnja rintangan² yang timbul karena penguasa² daerah yang berwatak feodal atau kapitalis birokrat.

Sumber "iron stock" beras yang paling tepat ialah dari produksi beras dalam negeri dan ini dengan sendirinja berarti bahwa disamping usaha² untuk mensukseskan target kenaikan produksi padi harus pula diadakan penindjauan kembali setjara seksama mengenai pembelian padi pemerintah yang mengalami kegagalan dalam tahun yang lalu.

Karena kesimpangsiuran yang sangat meradjalela di bidang statistik maka kita menghadapi kenyataan bahwa angka yang dapat dipertjaja mengenai produksi padi dalam tahun 1962 tidak ada. Yang ada ialah angka Biro Pusat Statistik jaitu 17.8 djuta ton, angka Komisi Djuned (Menteri Research Nasional) jaitu 18.3 djuta ton dan angka Departemen Agraria dan Pertanian 19.8 djuta ton dan 20.1 djuta ton. Entah yang mana yang benar, tetapi yang djelas ialah bahwa dari semua angka ini tidak ada satu yang mentjapai target produksi padi untuk tahun 1962 seperti yang ditetapkan oleh MPRS, jaitu 20.4 djuta ton. Program "self-supporting beras" telah diakui suatu kegagalan dan Padi Sentra ternyata telah menjadi sentra² korupsi dan ketidakberesan yang sangat merugikan.

Saja berpendapat bahwa bidang statistik masih dihindangi kesimpangsiuran serta tjara² mengumpulkan statistik ternyata masih berdasar metode² kaum kolonialis Belanda dulu dengan samasekali mengabaikan pengalaman tenaga² produktif sendiri, chususnja kaum tani dan kaum buruh di-pabrik². Hal yang tidak memuaskan ini patut mendapat perhatian yang serius daripada sardjana Indonesia. Perentjanaaan dan penelitian tanpa statistik adalah laksana membikin kuwe tanpa bahan². Tetapi lebih tjelaka lagi ialah perentjanaaan dan penelitian dengan statistik yang salah, sebab perentjanaaan dan penelitian sematjam itu dapat dipastikan akan meleset dari sedjak semula. Mudah²an para sardjana akan berhasil dalam ikut memperbaiki keadaan yang tidak memuaskan di bidang statistik ini, dan akan mengadakan penelitian ber-sama² dengan tenaga² produktif, untuk mengumpulkan bahan² statistik yang benar, chususnja di bidang produksi pangan. Ini akan merupakan suatu sumbangan kongkrit yang sangat berguna bagi pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.

Seperti halnja dengan program kenaikan produksi padi, maka pembelian padi pemerintah djuga telah

mengalami kegagalan, karena kaum tani sebagai produsen padi ternyata tidak diadjak untuk berunding mengenai penetapan djatah jang masukakal dan mengenai harga jang pantas. Sedangkan pada umumnja tidak di-djalankan usaha² untuk melaksanakan pembajaran dengan tjara² jang mudah dan tjepat dengan disertai usaha² efektif dalam membantu kaum tani untuk membeli kebutuhannja dengan harga pantas, seperti misalnja garam, ikan asin, minjaktanah, tekstil, alat² pertanian, pupuk dan sebagainja. Dibeberapa daerah Pemerintah belum melunasi harga² padi jang dikumpulkan dari kaum tani.

Pada pokoknja kegagalan² jang dialami dalam mentjapai kenaikan produksi beras dan dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah disebabkan karena usaha² itu tidak didasarkan setjara kokoh pada tenaga produktif disektor pertanian, jaitu kaum tani. Saja berpendapat, bahwa lebih² daripada di-bidang² lain, ketentuan Dekon mengenai mutlak perlunja *„menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat“* harus di-djalankan dengan konsekwen dibidang produksi pangan, chususnya padi. Potensi dan kekuatan Rakjat akan bisa digerakkan dibidang pertanian djika *kepentingan² kaum tani dibela dan kepentingan² kaum tuantanah serta kapitalis birokrat dikorbankan*. Ini merupakan hal jang sangat urgen, ini merupakan sjarat mutlak untuk mentjapai kenaikan produksi, untuk mensukseskan program pembelian padi dan untuk mendjamin adanja "iron stock" beras ditangan Pemerintah. Perlu ditekankan bahwa satu-nja djaminan untuk mentjapai sukses dibidang produksi pangan jalah djustru dengan mengikis habis sisa² feodalisme itu. Dengan demikian djelaslah kiranja betapa satunja tugas mengatasi persoalan pangan dengan tugas menyelesaikan tuntutan² revolusi pada tahap sekarang ini, tahap nasional demokratis.

Dalam hubungan dengan tugas untuk menguasai suatu "iron stock" beras ada beberapa tafsiran jang mengartikan hal ini sebagai andjuran untuk memperbesar import beras sebagai satu-nja djalan memperoleh beras itu. Saja tidak membantah bahwa dalam keadaan jang sangat mendesak dimana terdapat kekurangan² beras sehingga mengganggu kelantjaran roda ekonomi, maka import beras mendjadi suatu keharusan. Tetapi menggantungkan diri pada import beras sadja tidak me-

rupakan djalan keluar jang tepat. Malahan djika perhatian terlalu banjak diarahkan kesana, sektor pertanian kita sendiri dapat mengalami kerugian² besar. Setiap kali Pemerintah mengimport beras, ini berarti suatu kegagalan dibidang produksi dalam negeri, karena masih terlalu banjak devisen digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengorbankan sektor produktif. Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu achir² ini import beras telah mentjapai volume jang sangat besar, jaitu 1.3 djuta ton dalam tahun jang lalu. Apakah dengan demikian persoalan pangan telah diatasi? Samasekali tidak! Malahan sebaliknya! Volume import beras telah mentjapai rekord dalam tahun 1962, tetapi kekatjauan dalam persediaan dan distribusi beras djuga telah mentjapai rekord dalam tahun itu!

Dalam hubungan dengan persoalan ini, saja ingin pula menjebut suatu pendapat jang sangat keliru tentang pengaruhnja sesuatu inflasi terhadap pertanian. Menurut ahli² ekonomi tertentu, sesuatu inflasi dianggap hanya merugikan golongan² jang berpenghasilan tetap, jaitu kaum buruh dan pegawai, sedangkan tenaga produktif dibidang pertanian tidak mengalami kerugian² karena, katanja, harga penghasilan mereka selalu disesuaikan dengan kenaikan harga jang terdjadi dalam rangka inflasi itu. Teori ini dipergunakan untuk menjebarkan ide bahwa kaum tani Indonesia tidak mengalami kesulitan² sebagai akibat inflasi pada saat ini.

Pandangan ini adalah sangat keliru dan samasekali mengabaikan kenjataan bahwa disektor pertanian kita masih terdapat sisa² feodalisme jang berat. Seandainja halnja memang demikian, saja rasa Rakjat Indonesia jang lk. 70% hidup dari pertanian, tidak akan begitu berkeberatan djika terdjadi inflasi sebab, menurut teori itu, jang rugi hanya sebagian ketjil sadja.

Pandangan ini hanya berlaku terhadap tuantanah dan tanikaja, tetapi samasekali tidak berlaku terhadap kaum tanimiskin dan mereka jang tidak mempunjai tanah samasekali, jaitu buruhtani, sedangkan djumlah tanimiskin dan buruhtani djustru meliputi bagian terbesar daripada mereka jang hidup dideja. Tanimiskin dan buruhtani mengalami kesulitan² jang amat besar karena hampir semua kebutuhan mereka harus dibeli, termasuk pula beras. Kaum tani dipedusunan di Djawa dan Madura telah mengalami kenaikan harga jang sangat be-

rat sekali sedjak tahun 1960 seperti jang dapat dilihat dari index harga 12 barang makanan pokok dan barang² tekstil didaerah pedusunan, sbb.:

Tahun	12 bahan makanan pokok	Tekstil
1960	388	926
1961	1243	836
1962 (Maret)	1910	1176

Sumber: BPS

1953 = 100

Disamping itu, sistim distribusi barang sandang-pangan jang sedikit atau banjak mulai berdjalan dibeberapa kota besar, walaupun dengan berbagai kematjetan, samasekali tidak didjalankan di-desa². Kaum tani djuga mendjadi sasaran tengkulak² lama dan tengkulak² baru alias kapitalis² birokrat jang dengan tepat sudah dinjatakan oleh kaum tani sendiri sebagai „tikus kaki-dua“.

Kaum tani djuga mengalami kesulitan² jang sangat besar karena makin rusaknja seluruh aparatatur pengangkutan termasuk djalan². Ada berita misalnja disalahsatu daerah di Sumatera Selatan jang banjak menghasilkan bahan² hasil ekspor bahwa satu²nja tjara jang tinggal untuk mengangkut hasil² mereka itu jalah dengan tenaga manusia sadja.

Teori, atau lebih tepat dikatakan „dongengan“ mengenai tidak ruginja kaum tani diwaktu inflasi ini, sebenarnya hanya meneruskan kebohongan jang suka disebarkan oleh kaum kolonialis Belanda dulu bahwa Rakjat Indonesia umumnja tidak menderita diwaktu krisis ekonomi karena selalu bisa ditampung oleh desa. Orang² atau sardjana² jang masih pertjaja pada dongengan² ini perlu „turun kebawah“ untuk melihat dengan mata kepalanja sendiri betapa kemelaratan di-desa² pada saat ini.

Inflasi djustru memperkuat posisi ekonomi kaum tuan-tanah dan kaum penghisap lainnja di-desa² dan membikin lebih berat lagi kehidupan kaum tani, terutama tanimiskin dan buruhtani. Kenyataan ini harus diperhitungkan dalam menetapkan langkah² untuk menaikkan produksi pangan.

b) USAHA² UNTUK MEMULIHKAN KEMBALI APARAT PRODUKSI

Tudjuan kedua daripada kebidjaksanaan djangka pendek jalah untuk „menjempurnakan aparat produksi jang ada, untuk mempertahankan dan mempertinggi tingkat produksi masa sekarang ini“. Tugas ini, disamping tugas untuk menjediakan „iron stock“ beras, dinjatakan harus diberi prioritas utama dalam waktu² tahun ini. Kedua tugas ini dimaksudkan „supaja dapat memperbesar daya-produksinja, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjalin bertumbuhnja peredaran barang didalam masjarakat sebagai imbalan daripada beredarnya uang“ (Dekon, fasal 30).

Penegasan ini berarti bahwa prinsip pokok daripada Dekon dalam menanggulangi kesulitan² ekonomi jalah untuk mentjapai kenaikan tingkat produksi. Penegasan ini adalah sangat penting dan harus didjadikan dasar bagi setiap langkah jang mau diambil. Kongkritnja, prinsip ini berarti bahwa pada pokoknja, mulai dengan diutjapkannya Dekon, setiap tindakan dibidang ekonomi dan dibidang politik pada umumnja harus ditinjau dari sudut: apakah tindakan itu mendorong produksi ataukah sebaliknya, menghambat produksi; apakah tindakan itu menguntungkan tenaga² produktif, ataukah sebaliknya, merugikan tenaga² produktif.

Dekon menetapkan bahwa usaha² untuk memulihkan aparat produksi harus pada tingkat pertama dipusatkan kepada memperlantjar kembali persediaan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Sudah diketahui setjara umum betapa sektor industri serta sektor pengangkutan menghadapi kematjetan² jang sangat mendalam pada saat ini karena kekurangan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Walaupun tidak ada suatu angka jang menjeluruh mengenai tingkat produksi disektor industri pada umumnja, saja rasa tidak ber-lebih²an djika diperkirakan bahwa industri dalamnegeri pada saat sekarang hanya bekerdja rata² 25% daripada kapasitas penuhnja.

Adalah suatu kenyataan bahwa negeri kita masih sangat tergantung kepada luarnegeri untuk persediaan² spare-parts dan bahan² baku/penolong, walaupun dapat diketahui pula bahwa bukan hanya persediaan bahan-bahan baku dari luarnegeri jang mengalami kema-

tjetan-kematjetan dewasa ini. Pun bahan² baku jang terdapat didalamnegeri sangat kurang, atau distribusinja matjet karena didjadikan objek spekulasi. Sedangkan dimana telah diambil tindakan² jang dimaksudkan untuk mengatasi kematjetan² dan ketidakberesan itu, seperti misalnja dengan sistim pengawasan ban² jang baru² ini, ternjata mempunjai efek jang djustru sebaliknya, jaitu lebih mematjetkan bidang² jang sudah demikian matjet-nja itu.

Ketergantungan sektor produksi kepada luarnegeri untuk spare-parts tersebut berarti bahwa tugas pokok daripada sektor import pada dewasa ini harus ditekan-kan pada melajani kebutuhan² tersebut. Disamping pem-belian bahan² konsumsi pokok jang masih harus di-import, sektor import harus dikerahkan khususnja untuk mendatangkan kebutuhan² sektor produksi. Dalam hu-bungan ini, Dekon djuga menegaskan bahwa kita harus *„mengurangi sedjauh mungkin import bahan² luar“* (Dekon, fasal 30).

Saja anggap hal ini sangat penting dalam rangka mendjaga kebebasan kita dibidang import bahan² baku dan spare-parts. Telah diketahui bahwa kaum imperialis AS, Belanda dan lain² telah siap untuk „membantu“ kita dalam mengatasi kesulitan² spare-parts tersebut. Misalnja, dalam bulan Februari jbl, telah ditanda-tangani persetudjuan kredit dengan AS sebesar \$ 17 djuta khususnja untuk spare-parts dan bahan² penolong. Kaum imperialis ternjata melihat bidang ini sebagai suatu kemungkinan jang baik untuk mengikat ekonomi kita setjara lebih efektif kepada ekonomi mereka dan untuk mengabadikan posisi mereka sebagai sumber ba-rang-barang keperluan industri. Ini berarti bahwa, lebih² disektor ini, kita harus berusaha untuk membiajai import barang² tersebut dengan penghasilan devisa kita sen-diri dan sedjauh mungkin tidak dengan kredit² dari negara² kapitalis jang disertai sjarat² jang merugikan Indonesia.

Disamping kekurangan import, persediaan bahan² baku/penolong djuga sangat dikatjaukan karena ber-bagai penjelewengan dan korupsi serta manipulasi di-bidang distribusi. Benang mendjadi objek korupsi dan manipulasi, ban mobil mendjadi objek korupsi dan ma-nipulasi, semen mendjadi objek korupsi dan manipulasi. Ja, tak ada satu bahanpun jang tidak dikorupsi dan

dimanipulasi oleh kaum kapitalis birokrat. Ini berarti bahwa tindakan² untuk memberantas korupsi dan me-ritul tukang² salahurus adalah sangat erat hubungannja dengan tugas untuk menaikkan tingkat produksi.

e) DEKONSENTRASI DALAM SOAL MANAGEMENT

Salahsatu ketentuan dalam Dekon jang perlu men-dapat perhatian ialah mengenai akan diadakannja de-konsentrasi dalam management. Hal ini dikemukakan karena dirasakan betapa kurang baik berdjalannja pengurusan atau management pada saat ini khususnja didalam perusahaan² negara, sehingga salahurus itu sangat mengakibatkan kematjetan² disegala lapangan.

Memang dapat dimengerti bahwa djika „sistim ma-nagement“ terlalu terpusat, maka ekonomi kita jang meliputi suatu daerah jang sangat luas dengan djaring-an komunikasi jang pada umumnja sangat kurang, akan menghadapi berbagai kesulitan dan kematjetan. Salah-satu prinsip jang sangat penting dalam hal pengurusan ekonomi sektor negara ialah supaya mereka jang ber-tanggungjawab terhadap satu perusahaan atau dida-lam satu perusahaan terhadap satu bagian, tjabang atau daerah, diberi otoritet atau wewenang serta tang-gungjawab perseorangan jang tjukup karena hanja dengan demikian, perusahaan atau tjabang² jang ber-sangkutan akan bisa berdjalan dengan lantjar. Tentu-nja, tanggungjawab tersebut harus sepenuhnya dilaku-kan sesuai dengan garis² atau kebidjaksanaan umum dan tidak boleh diartikan sebagai ketentuan jang mem-buka kemungkinan bagi orang² untuk setjara se-suka²-nja menentukan langkah² jang bersifat kedaerahan jang sempit atau hanja menguntungkan kepentingan pribadi si-manager sendiri.

Idalam menetapkan perlu adanja dekonsentrasi dalam management, Dekon dengan tepat menekankan bahwa ini harus didjalankan *„dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik“*, bahwa dekonsentrasi itu dimaksudkan berlaku hanja *„mengenai sesuatu hal, jang hanja mengenai daerah atau wilajah tjabang itu sendiri“*, dan bahwa dekonsentrasi ini *„tidak berarti mengorbankan sentralisasi dalam pe-rentjaan (planning) dan pengawasan (control) ter-akhir, jang ada ditangan pihak pusat“*. Djuga ditekan

bahwa „dekonsentrasi dalam management tidak dimasukkan dalam otonomi lokal” (fasal 24).

Syarat² ini memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa dekonsentrasi hanya ditujukan kepada mentjapai efisiensi dalam menjalankan perusahaan² dan dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan² teknis karena keadaan geografis serta kekurangan² perhubungan yang terdapat pada saat ini. Dekonsentrasi samasekali tidak boleh mengurangi kesatuan ekonomi dan politik nasional dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan usaha² kaum separatistis chususnya kaum pemberontak PRRI-Pernesta beberapa tahun yang lalu yang memang sengaja mempergunakan keluh-kesah Rakjat di-daerah² tertentu serta kesulitan² komunikasi antara daerah dan pusat untuk mentjapai maksud²nja yang djahat dalam menghantjurkan Republik Kesatuan kita.

Perlu saja kemukakan pula bahwa penetapan mengenai dekonsentrasi itu tidak berarti bahwa salahurus hanya terdjadi karena management terlalu banjak dipusatkan di Djakarta. Ketentuan Dekon ini samasekali tidak mengurangi konstataasi bahwa faktor terpenting dalam pengurusan ialah manusianja, dan bahwa kesulitan² yang dialami oleh perusahaan² atau bank² negara di-daerah pada pokoknja disebabkan oleh karena banjaknja orang yang salahduduk. Dari pengalaman dapat diketahui bahwa banjak sekali pemimpin² perusahaan² negara di-daerah merupakan orang² yang tidak tjakap, yang tidak djudjur dan tidak Manipolis sehingga mereka mudah diperalat oleh kalangan² tertentu untuk kepentingan²nja sendiri.

Kalau seandainya salahduduk dan salahurus hanya menimbulkan inefisiensi dan kelalaian, mungkin tidak seberapa djelek pengaruhnja terhadap ekonomi. Tetapi yang kita hadapi ialah salahduduk dan salahurus yang mengakibatkan pensalahgunaan kekajaan negara, pen-tjolengan, korupsi dan pemborosan setjara besar²an. Karena itu, salahduduk dan salahurus, apalagi ditempatkan yang djauh dari pengawasan pusat, harus segera diachiri.

Dekonsentrasi pengurusan atau management berarti bahwa lebih daripada sebelumnya, faktor manusia harus diperhatikan. Djika orang² yang tidak tjakap dan tidak djudjur membikin segalanja katjau dalam keadaan dimana pusat mempunyai wewenang yang besar, orang²

itu akan lebih² sangat membahayakan djika mereka diberi wewenang yang luas. Dapat kita bajangkan bahwa dekonsentrasi bisa berarti suatu „zaman emas” untuk tukang² salahduduk dan salahurus itu.

Dekonsentrasi harus berarti bahwa lebih daripada sebelumnya harus segera dilakukan rituling, sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Dekon.

d) PERUBAHAN² DALAM SISTIM PERPADJAKAN

Apa yang ditetapkan dalam Dekon mengenai perpadjakan merupakan suatu kemadjuan yang sangat penting. Dekon menolak sistim perpadjakan yang lama karena sistim itu berpokok kepada padjak² langsung dan tidak langsung yang pada umumnya sangat memberatkan Rakjat. Sistim perpadjakan itu yang sampai saat ini masih tetap berlaku, merupakan satu aspek yang tak bisa dipisahkan dari sifat ekonomi kita sebagai ekonomi yang tergantung, dimana ekspor dan import memegang peranan yang menentukan, dimana keuangan negara masih bersandar kepada padjak² langsung dan tidak langsung se-mata². Malahan perpadjakan masih dianggap oleh ahli² ekonomi tertentu sebagai „instrumen pembangunan yang utama”. Dekon menetapkan tiga prinsip baru mengenai perpadjakan, yaitu „(a) untuk memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka; (b) untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruhan, dan (c) untuk mendapat kepastian supaya perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selanjutnja”. (fasal 27).

Prinsip pertama dalam mengubah sistim perpadjakan harus menetapkan politik padjak yang berpegangan pada prinsip dari Rakjat kembali ke Rakjat dan dengan sendirinja politik fiskal pada umumnya tidak boleh menghambat kegiatan produksi dan menambah berat beban penghidupan Rakjat. Politik keuangan harus mengabdikan pada produksi dan tidak sebaliknya seperti halnja sekarang ini dimana produksi mengabdikan, atau lebih tepat, dikorbankan karena politik keuangan dan fiskal yang keliru. Sampai saat ini, tjara² yang dipergunakan untuk memperoleh kenaikan penerimaan negara ialah melalui kenaikan tarif padjak, kenaikan harga dan djuga me-

lain matjam² pajak baru, seperti komponen harga, *meerwinst* dsb. Tjara² jang demikian itu biasanja di-benarkan, djuga dalam *textbook*² mengenai politik fiskal kapitalis, karena administratif gampang; tetapi segi jang paling gampang dari tjara² itu bisa pindah efeknja kepada para konsumen, jaitu Rakjat, terutama Rakjat pekerdja. Kenaikan pendapatan pajak² langsung dan tidak langsung harus ditjapai bukan dengan tjara itu melainkan melalui perkembangan ekonomi jang sehat. Bertambahnja kegiatan ekonomi dengan sendirinja akan bertambah penerimaan negara dari pajak.

Penegasan Dekon bahwa usaha² untuk menaikkan penghasilan negara harus berpegang pada prinsip untuk *tidak menambah beban Rakjat banyak*" (Dekon, fasal 31) berarti bahwa keputusan jang dikeluarkan oleh Perusahaan Listrik Negara hanya tiga hari sesudah Dekon diutjapkan, jang menaikkan tarif listrik dengan 300%, sangat bertentangan dengan Dekon. Ini memperlihatkan betapa perlu dilakukan perjuangan jang terus-menerus untuk mendjamin supaya Dekon dilaksanakan setjara konsekwen dan untuk melawan setiap tindakan jang tidak sesuai dengan prinsip² Dekon.

Politik perpajakan jang memberikan dorongan kepada inisiatif produsen djuga berarti bahwa bagi mereka (pengusaha² swasta) jang bersedia mempergunakan kekajaannya setjara produktif (dibidang produksi) perlu diberikan kelonggaran² pajak serta lain² fasilitas untuk berkembang, karena kemudian, djika tingkat produksi telah meningkat maka penerimaan dari mereka melalui pajak akan menjadi lebih besar daripada sebelum usaha² produktif itu dimulai. Kelonggaran² itu dapat merupakan dorongan penting bagi kegiatan² produktif setjara umum.

Prinsip kedua jang ditetapkan dalam Dekon, jaitu untuk meratakan akumulasi modal, merupakan prinsip jang sangat penting. Karena pajak² pada saat ini untuk sebagian besar didapat dari Rakjat, maka dengan sendirinja akumulasi modal adalah sangat tidak merata dan sangat memberatkan Rakjat. Orang² jang memperoleh keuntungan² besar dari inflasi bisa menghindari pembayaran pajak bukan hanya karena kelitjikan mereka sendiri tetapi djuga karena sistim perpajakan pada saat ini memang tidak menampung tambahan² besar

dalam kekajaan seseorang. Selain daripada itu, pajak² jang diambil dari Rakjat djustru achirnja lebih memperkaja orang² itu, jaitu uangnya keluar dari kantong Rakjat jang begitu tipis untuk masuk ke-kantong² OKB² jang sudah begitu gemuk. Prinsip, *dari Rakjat pekerdja ke OKB²* harus diganti dengan *dari Rakjat pekerdja kembali kepada Rakjat pekerdja*, dan djuga, selama OKB² masih ada di-tengah² kita, *dari OKB² ke Rakjat pekerdja*. Keadaan inflasi sudah pasti sangat merugikan Rakjat karena harga barang² melondjak dengan tjepat, penghasilan riil Rakjat makin tertekan rendah. Kaum kapitalis birokrat, modal monopoli asing, semuanya bertambah untung dan kaya dalam keadaan inflasi sedangkan Rakjat pekerdja bertambah miskin dan bertambah papa-sengsara.

Dengan demikian Rakjat pekerdja memikul dua beban jang sangat berat, jaitu keadaan inflasi itu sendiri dan disamping itu sistim perpajakan jang sangat tidak merata, sedangkan OKB² samasekali bebas dari beban² itu.

Keadaan jang demikian djuga terdapat di-desa² dimana tuantanah² menerima penghasilan jang semakin besar dengan adanya kenaikan harga hasil bumi, sedangkan penghasilan mereka itu umumnja terlepas dari pajak. Sebaliknya kaum tani bertambah miskin.

Prinsip ketiga dalam Dekon dalam mengubah sistim perpajakan sebenarnya merupakan kuntji bagi politik fiskal didalam sesuatu ekonomi nasional dan demokratis jang mau kita bangun. Sektor ekonomi negara harus menjadi sumber terpenting bagi pendapatan negara. Ini harus ditjapai melalui kenaikan kegiatan atau intensitet perusahaan² negara diberbagai sektor dan tidak melalui kenaikan tarif atau harga. Dengan demikian setingkat demi setingkat sumber pendapatan negara dan pembiayaan pembangunan bisa kita kurangi dari sektor perpajakan jang sekarang meliputi lebih dari 30 djenis matjam pajak dan mengubah prinsip tersebut sehingga pendapatan negara terutama bersumber pada perkembangan ekonomi sektor negara. Ambillah sebagai misal perusahaan seperti DKA. Djika kapasitas operasi DKA dinaikkan maka tanpa adanya kenaikan harga kartjis atau tarif kereta-api, penerimaan negara akan meningkat, dari ini akan memungkinkan pula bertambahnja penanaman modal baru sehingga terdjadi lagi kenaikan

kapasitet, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, dengan memperketat operasi DKA seperti halnya sekarang, perusahaan itu dengan sendirinya tambah mengalami kerugian.

Pada saat ini, perlu dikonstatasi bahwa perusahaan² negara bukannya hanya tidak merupakan sumber penerimaan negara, tetapi malahan sebaliknya, mereka merupakan beban finansial bagi Pemerintah karena banyaknya kredit yang terus-menerus diberikan kepada mereka sedangkan hasilnya samasekali tidak seimbang. Dalam hubungan ini, Dekon menjabarkan bahwa perangsang² (incentives) akan diberikan kepada PN² yang dapat mengurangi penggunaan kredit. Ini tentunya tidak mengurangi perlunya rituling setjara intensif untuk mengachiri salahurus yang sangat meradjalela dibidang perusahaan² negara pada saat ini dan yang menjadi sebab utama daripada pemborosan dan pentjolongan kekajaan perusahaan² itu yang hidup dari kredit bank² negara. Maka dari itu, rituling djuga merupakan sjarat mutlak untuk menjapai prinsip ketiga yang ditetapkan dalam Dekon dalam mengubah sistim perpadjakan.

Mengenai kenyataan bahwa Dekon dalam membitjarkan perangsang² kepada perusahaan² negara, khususnya menjebut perusahaan *dagang* negara (PDN²), ada yang mengartikan ini sebagai usaha untuk meng-anak-mas-kan PDN². Tetapi ini bisa djuga diartikan sebagai tanda bahwa djustru PDN² itu yang paling tidak beres dalam hal memutar modal dengan djumlah kredit yang besar; ini bisa djuga diartikan bahwa djustru PDN² yang perlu diritul!

Bagian yang mengenai perangsang kepada eksportir dalam Dekon tidak boleh disalahtafsirkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lain dalam Dekon yang menolak devaluasi dan tindakan² yang bersifat "moneter konvensional". Pada hakekatnya yang terpenting adalah perangsang kepada produsen barang² eksport dengan menutup kerugian rupiah yang dialami oleh produsen akibat disparitet antara harga pendjualan produsen (ongkos produksi ditambah winstmarge tertentu) dengan harga luar negeri. Disamping itu eksport didorong maju melalui perluasan pasar dunia, upgrading (peningkatan daripada kwalitet), pemberantasan penjelundupan-penjelundupan dengan lebih intensif lagi, perluasan eksport dengan kelebihan barang² djadi hasil

pengolahan sendiri bahan² mentah. Siva yang sekarang ini mengatjaukan harga disemua bidang supaya dihapuskan dan untuk mengatasi keadaan yang sulit sekarang ini Presiden sebagai mandataris MPRS supaya mengambil tindakan² agar Pemerintah menjelenggarakan eksport dan import.

Selanjutnya mengenai politik keuangan, Dekon djuga menetapkan bahwa „menaikkan penghasilan negara ... harus ditjapai dengan menggali sumber² baru serta mengintensifkan penggalian sumber² lama, dan dengan tidak menambah beban Rakjat banjak". Dinjabarkan pula bahwa „penjusunan Anggaran Negara ... ditudjukan untuk mendjamin terlaksananya kebidjaksanaan djangka pendek ini dan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana" (fasal 31). Prinsip² ini berarti bahwa Anggaran Belandja harus benar² di-Manipolkan atau di-Dekonkan. Pokok-pangkal dalam menetapkan anggaran harus terletak pada tingkat pembangunan yang perlu ditjapai dengan memperhitungkan kemungkinan² setjara realistis, dan kemudian anggaran pendapatan disesuaikan dengan pokok itu. Disamping itu, anggaran rutine yang pada saat ini dipisahkan dari anggaran pembangunan harus diabdikan kepada anggaran pembangunan itu, dan tidak sebaliknya, jaitu anggaran rutine menjadi pokok dan anggaran pembangunan hanya memperoleh sisa² sadja atau menjadi émbél² sadja.

Dalam menetapkan usaha² pembangunan yang perlu diberikan prioritas, disamping prioritas² utama yang diberikan kepada kebidjaksanaan djangka pendek seperti ditetapkan dalam Dekon, maka Dekon memperkuat memorandum MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 mengenai hal tersebut. Skema prioritas MPRS memberi prioritas setjara umum kepada usaha² yang pasti akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnya ditetapkan bahwa projek² yang akan mengatasi kemerosotan ekonomi dan keuangan, terutama projek² sandangpangan harus dilaksanakan, dan djuga projek untuk perkembangan industri yang sudah committed. Disamping itu diberi prioritas pula kepada semua projek dasar untuk perkembangan faktor produksi tenaga kerdja serta kepada projek² infrastruktur yang sudah committed dan yang diperlukan untuk mensukseskan projek² lain yang diberi prioritas. Selanjutnya MPRS telah menekankan bahwa projek² B, jaitu projek² yang harus menjadi sumber

pembinaan, harus dieruskan, dengan tidak membatasi proyek² itu kepada 8 jenis proyek yang khusus disebut dalam Pola Pembangunan Semesta. Tekanan pada saat ini harus diberikan kepada quickyielding projects, yaitu proyek² yang bisa menambah pendapatan nasional dalam waktu yang pendek.

c) PRODUCTION-SHARING DAN KREDIT LUARNEGERI

Deklarasi Ekonomi, dalam menyebut kemungkinan² untuk menjalankan "production-sharing", mengulangi kembali prinsip² yang terpenting, yaitu bahwa production-sharing *"pada hakekatnya merupakan kredit dari luar negeri untuk melaksanakan sesuatu proyek, yang akan dibayar dengan sebagian dari hasil yang diperoleh proyek tersebut; milik dan pimpinan harus tetap ditangan pihak Indonesia"* (fasal 23).

Sedangkan mengenai kredit luar negeri, Dekon menyatakan bahwa: *Pembinaan untuk mensukseskan politik ekonomi jangka pendek tersebut diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut: (a) dengan kekuatan funds and forces nasional (termasuk domestik) kita sendiri; (b) bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjariakan kredit luar negeri, dengan syarat² sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II, tahun 1960"* (lihat fasal 32).

Prinsip² production-sharing sudah ditetapkan setjara tegas didalam *"Pernyataan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai Pindjaman atau kredit atas dasar Production-Sharing"* tertanggal 3 Agustus 1962. Pernyataan itu dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II tahun 1960. Djadi, sudah sangat jelas bahwa production-sharing merupakan *kredit atau pindjaman* dimana kekhususannya terletak dalam tjara membayar kembali kredit yang bersangkutan, yaitu dari hasil produksi proyek yang bersangkutan. Ia sama sekali tidak boleh diartikan atau dipraktekkan sebagai *penanaman modal asing* dalam berbagai bentuk dimana pihak yang menanam modalnya bisa setjara diam² main dibelakang layar pimpinan atau management nasional dan malahan merasa lebih aman karena *"sifat nasionalnya"* proyek bersangkutan memberi perlindungan terha-

dap *"bahaja"* akan terdjadinja nasionalisasi atau pengambilalihan yang selalu begitu ditakuti oleh modal monopoli asing.

Usaha² untuk mensalahtafsirkan prinsip² production-sharing sebagai penanaman modal asing bukanlah suatu fantasi atau kekhawatiran yang tak beralasan. Djika kita membatja "Humphrey Report" yang terkenal itu maka ternyata bahwa djustru inilah yang menjadi pegangan kaum imperialis AS serta kalangan² tertentu dinegeri kita yang ternyata telah memberikan pendjelasan² yang sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa: *"Penanaman modal asing diterima (maksudnya, oleh Indonesia) dalam bentuk persetujuan² production-sharing atau kontrak² dengan perusahaan² lokal, baik milik pemerintah ataupun swasta"*. ("Humphrey Report"). Sedangkan yang dengan tegas ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia ialah, bahwa *"pemilikan harus ditangan Indonesia"* diinjatakan didalam "Humphrey Report" sebagai *"dilution of ownership"* atau *"pemilikan tjampuran"*. Demikianlah pengertian AS tentang production-sharing. Demikianlah bahajanya djika persetujuan² production-sharing mau diadakan dengan modal AS ataupun modal dari lain² negara kapitalis!

Dengan adanya Dekon yang mempertegas kembali bahwa hanjalah kredit² luar negeri yang dapat diterima, maka menjadi lebih mendesak lagi supaya Undang² Penanaman Modal Asing tahun 1958 segera dibatalkan sesuai dengan tuntutan² Rakjat. Pembatalan Undang² tersebut sangat dibutuhkan untuk menutupi setiap kemungkinan atau landasan legal bagi kaum reaksi dalam negeri dan kaum imperialis diluar negeri untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk production-sharing.

Penetapan prinsip² production-sharing memang merupakan suatu kemenangan bagi Rakjat Indonesia, dan tidak boleh terdjadi bahwa setjara diam², prinsip² itu disalahgunakan sehingga djustru memungkinkan sesuatu yang paling ditentang, yaitu penanaman modal asing. Baru² ini oleh Pemerintah diumumkan bahwa suatu kontrak telah ditandatangani dengan modal Cathay di Hongkong untuk melaksanakan proyek² berdasarkan production-sharing dalam bidang usaha² yang sangat luas. Berita itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertama-tama, apakah benar bahwa proyek² yang bersangkutan memang masuk dalam prioritas² seperti

jang telah ditetapkan oleh MPRS? Apakah benar bahwa seandainya proyek² itu memang bersifat prioritas, ia tidak dapat dibiayai dengan "funds and forces" nasional dan domestik? Bagaimana sjarat² daripada kredit itu? Apakah sjarat² itu benar² mendjamin bahwa pemilikan dan pimpinan berada ditangan Indonesia?

Timbulnja ke-ragu²an ini memang wajar, karena kaum kapitalis di-negara² asing memperlihatkan reaksi jang begitu antusias mengenai production-sharing. Malahan pernah dirumuskan oleh Ketua Panitia Production-Sharing bahwa tak kurang dari 20 negara telah menunjukkan perhatiannya terhadap production-sharing. Prinsip² production-sharing memang baik dan pada pokoknja sesuai dengan pendirian Rakjat Indonesia dalam hal kredit luarnegeri. Tetapi kita tidak boleh terlalu naif dalam hal ini. Kita tidak boleh melupakan bahwa prinsip² jang baik itu bisa dipergunakan untuk memberi kepada modal monopoli asing suatu kemungkinan untuk menguasai salahsatu bahan eksport kita dan untuk menguasai pimpinan walaupun jang resmi menduduki posisi pimpinan adalah orang² kulit sawomatang.

Karena prinsip production-sharing berarti bahwa pinjaman dibayar kembali dari hasil² proyek jang bersangkutan, dapat diduga bahwa „sipemberi-kredit“ akan berusaha keras untuk memperoleh posisi jang berpengaruh dalam proyek itu dengan dalih untuk mendjamin bahwa modalnja benar² dibayar kembali. Tuntutan sematjam ini merupakan tanda tidak pertjaja kepada fihak Indonesia, oleh karena itu harus ditolak sebagai sesuatu jang bertentangan dengan prinsip production-sharing.

Saja berpendapat bahwa satu²nja djalan untuk menjegah kemungkinan pensalahgunaan production-sharing ialah dengan menempatkan semua persetudjuan mengenai hal jang demikian dalam tangan Dewan Kredit Luarnegeri, dimana Pemerintah serta pimpinan lembaga² negara, chususnja DPRGR, MPRS dan Depernas, harus diikutsertakan, dan dengan Nasakom sebagai porosnja. Dewan tersebut perlu diberi wewenang mengenai semua hal jang bersangkutan dengan kredit luarnegeri, chususnja untuk menetapkan apakah sesuatu kredit memang dibutuhkan dan apakah sjarat²nja sesuai dengan prinsip² jang telah ditetapkan oleh Dekon.

Dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai persetudjuan² baru dibidang kredit, Dewan Kredit Luarnegeri harus melihat bukan hanya bahwa kredit jang bersangkutan benar² dibutuhkan karena "funds and forces" didalamnegeri tidak tersedia, tetapi harus djuga mendjamin supaya persetudjuan² kredit jang telah ditandatangani sudah dipergunakan sebelum mulai mengadakan persetudjuan² kredit baru. Dapat diketahui, misalnja, bahwa berbagai kesibukan sedang didjalkan untuk mengadakan kontrak² baru dengan negara² Barat sedangkan masih ada persetudjuan kredit jang ditandatangani dengan negara² Sosialis jang belum dipergunakan samasekali atau jang hanya sebagian digunakan. Terajata misalnja bahwa instansi² Pemerintah tertentu „kurang antusias“ terhadap kredit dari negara² Sosialis dengan memberikan segala matjam alasan, seperti dalih bahwa harganja terlalu tinggi, barang²nja belum dikenal dsb, sedangkan alasan jang sebenarnya tak lain dan tak bukan ialah karena adanya kepentingan jang sudah bertjokol alias "vested interest" dan komisi² jang menarik dari kredit² jang diperoleh dari negara² imperialis. Dewan tersebut harus mendjaga supaya politik luarnegeri jang bebas dan aktif benar² dilaksanakan dibidang kredit. Djangan sampai, terhadap negara² Sosialis dituntut segala matjam kelonggaran seperti penundaan pembayaran pertama dan lain sebagainya, sedangkan terhadap negara seperti Djerman Barat, misalnja, jang *nota bene* memindjamkan kredit dengan bunga 5-6% jaitu djauh lebih tinggi daripada apa jang diminta oleh negara² Sosialis, jaitu 2-2½%, Pemerintah bersedia menerima sjarat² pembayaran kembali jang djauh lebih berat.

Kredit luarnegeri menjangkut satu segi jang sangat erat hubungannya dengan usaha² untuk menjusun suatu ekonomi nasional jang benar² merdeka atau bersih dari sisa² imperialisme. Kredit luarnegeri merupakan bidang dimana semangat patriotisme harus didjundjungtinggi dan pelaksanaan prinsip² MPRS serta Dekon harus benar² diawasi.

Dalam hubungan dengan persoalan ini, dan chususnja bahajanja modal asing akan menjusup kedalam ekonomi kita, perlu saja menjebut pula Bank Pembangunan Swasta. Mengenai hal ini, Dekon menjatakan: „Perlu terus-menerus berichtiar untuk mentjapai perbaikan

dan penjempurnaan pada lembaga⁸ keuangan, *chususnja Bank² Pembangunan Daerah dan Swasta*". (fasal 34). Sikap hati² ini, jang menekankan pada perlunya perbaikan dan penjempurnaan adalah tepat, djika kita mengingat bahwa pihak modal asing jang, bagaimanapun djuga mereka berusaha untuk setjara tjerdik menjalahgunakan production-sharing, tentu lebih senang dengan tjara² penanaman modal jang klasik dan terbuka, menaruh perhatian dan harapan besar kepada adanja Bank Pembangunan Swasta dan djuga bank² pembangunan daerah. Bank² itu mendapat perhatian khusus didalam "Humphrey Report" karena menurut ahli² ekonomi jang menjusun laporan itu, *„modal swasta belum tjukup efektif dikerahkan sebagai salahsatu sumber jang terpenting*". Modal monopoli AS ternyata sudah siap sedia untuk mempergunakan sumber atau saluran ini setjara *„se-efektif²nja*". Bahaja ini memperkuat kekuatiran jang dikemukakan oleh fraksi PKI didalam DPRGR sewaktu Undang² Bank Pembangunan Swasta dibahas, jaitu tentang adanja bahaja modal imperialis merembes kedalam Bank itu. Lewat Bank Pembangunan Swasta kaum imperialis berusaha mendjadikan kaum swasta sebagai saluran penetrasi modalnja dan dengan demikian memperkuat barisan kapitalis komprador dan kapitalis birokrat. Ini merupakan landasan utama bagi politik reaksioner kaum imperialis.

Memang, ketjuali mereka jang sangat naif, saja rasa tidak ada orang jang tidak mengerti bahwa tudjuan jang sebenarnja daripada modal monopoli imperialis ialah djustru untuk menghidupkan sektor modal swasta sebagai sektor memimpin dan untuk mematikan sektor negara. Sikap ini dengan sangat tegas dinjatakan dalam laporan Djenderal Clay mengenai *„bantuan ekonomi*" AS, jang dikeluarkan dalam bulan Maret jbl. Dalam laporan itu, dikatakan sebagai berikut : *„Kami berpendapat bahwa AS tidak dapat membantu sesuatu pemerintahan asing dalam projek² untuk mendirikan perusahaan-perusahaan industri atau dagang jang dimiliki pemerintahan untuk bersaing dengan perusahaan² swasta*" (lihat *Newsweek*, tanggal 8 April, 1963, hal. 42). Mungkin ada jang merasa kutipan ini sebenarnja kurang berguna karena toh hanja merupakan nasehat kepada Pemerintah AS, sedangkan jang penting ialah sikap resmi pemerintah Kennedy. Dalam mendjawab

ke-ragu²an ini, perlu saja djelaskan bahwa Kennedy tentunja tidak akan mengangkat seorang penasehat jang tidak mewakili pendirian Kennedy sendiri. Disamping itu tidak lain daripada Kennedy sendiri jang sudah memberikan suatu reaksi mengenai Laporan Clay dengan mengatakan bahwa Laporan itu adalah *„sangat membesarkan hati*" atau *„most heartening*" (lihat *Newsweek*, tanggal 8 April, 1963, hal. 42).

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Demikian ulasan saja tentang Deklarasi Ekonomi dan syarat² pelaksanaannya. Berdasarkan fikiran² yang telah saja adjukan diatas, maka dapat kita menarik beberapa kesimpulan sbb.:

Penjusunan Dekon merupakan hasil penting daripada perdjjuangan Rakjat untuk memenangkan gagasan² yang benar dalam menetapkan susunan ekonomi yang harus kita bangun pada tahap pertama Revolusi serta dalam menetapkan tjara² yang tepat guna mengatasi kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Perdjjuangan itu sekarang harus dilandjutkan untuk mentjapai kemenangan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya penjusunan Dekon hanya bisa ditjapai dengan melalui perdjjuangan Rakjat, maka pelaksanaannya djuga tergantung pada perdjjuangan Rakjat. Dalam hal ini, Front Nasional dengan Pantja Program Front Nasional dapat memainkan peranan yang menentukan.

Hal² yang perlu diperdjjuangkan dalam usaha² memenangkan pelaksanaan Dekon adalah sbb.:

Pertama: untuk mentjapai peng-integrasian antara Pemerintah dengan Rakjat haruslah dilaksanakan ritualing disegala bidang dari Pusat sampai ke-Daerah², terutama harus dibentuk Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM. Ini akan membuka kemungkinan seluruh aparat pemerintahan diisi dengan orang² yang bersedia mendjalankan prinsip² Dekon setjara konsekwen, yang bersedia mengorbankan kepentingan² kaum penghisap besar di-kota² dan di-desa², jaitu kaum tuan-tanah, komprador dan kapitalis birokrat, serta membela kepentingan² Rakjat. Orang² yang melawan atau mensabot pelaksanaan Dekon harus dituntut supaya disingkirkan.

Kedua: untuk memenangkan tafsiran² yang tepat mengenai prinsip² Dekon haruslah dilawan tiap² usaha untuk memutarbalikkan prinsip² Dekon dan melaksanakan tindakan² anti-Dekon „atas nama Dekon”.

Ketiga: untuk mengadakan tindakan² yang sesuai dengan prinsip² Dekon dengan tudjuan pokok mening-

katkan produksi, harus diadakan perlawanan yang serius terhadap usaha² sabotase dibidang ekonomi. Perlu pula dilakukan perdjjuangan untuk menolak setiap tindakan yang bertentangan dengan Dekon.

Rakjat harus didjamin hak² demokrasi²nya untuk dapat melakukan perdjjuangan ini, untuk dapat melakukan People's control (pengawasan Rakjat) sebagai landasan guna mentjapai People's support (dukungan Rakjat) yang seluas mungkin bagi setiap usaha dibidang ekonomi. Djika ini tertjapai, maka akan berarti bahwa massa Rakjat bukan hanya ikut langsung dalam menentukan politik ekonomi, jaitu ikut menentukan penjusunan Dekon, melainkan pula turut aktif melaksanakan dan bertanggungjawab atas djalannya politik ekonomi tersebut. Tanpa ini, adalah tidak mungkin untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis, ekonomi progresif.

(Tjeramah dihadapan Himpunan Sarjana Indonesia [HSI], tgl. 11 Mei 1968 di Aula Universitas Indonesia)

DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!

Pertama-tama izinkanlah saya mengutarakan terima-kasih se-besar²nja kepada pimpinan *Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi Veteran Seluruh Indonesia* yang telah mengundang saya untuk memberikan tjeramah tentang Deklarasi Ekonomi. Saya menjambut kesempatan ini, kesempatan untuk mengemukakan fikiran² serta pendapat² kami, kaum Komunis Indonesia, mengenai soal² hangat dinegeri kita. Kenyataan ini sekali lagi membuktikan betapa sudah mendalamnya pengertian masyarakat terhadap kedudukan partai² politik sehingga makin seringlah musjawarah², seminar² ataupun diskusi² besar, baik yang resmi maupun yang tidak, yang mengadakan partai² NASAKOM untuk menguraikan pendapat-pendapat mereka.

Dari kenyataan ini saya mendapat kesan betapa sudah dirasakan, bahwa suatu musjawarah, seminar atau diskusi besar belum lengkap dan belum memuaskan kalau Nasakom belum diikutsertakan dan didengar. Ini merupakan perwujudan yang nyata daripada perasaan kegotongrojongan nasional kita.

Mungkin akan ada yang mengira bahwa dalam menghadapi permintaan² yang begitu banyak untuk mengadakan tjeramah, saya hanya tinggal mengulangi apa yang pernah saya katakan dalam tjeramah² sebelumnya. Tidaklah demikian, Sdr.² Perkembangan keadaan dinegeri kita berdjalan begitu tjepatnja sehingga setiap waktu, biarpun hanya selisih satu minggu, tentu ada soal² baru yang harus dibahas atau pendapat² baru yang kurang tepat yang harus dilempangkan. Saya benar² merasakan, bahwa setiap kali menghadapi tugas memberi tjeramah, tentu persoalan yang diminta kepada saya untuk dibahas harus ditinjau dari segi² yang baru, berdasarkan perkembangan² baru. Djadi bagi saya sendiri, disamping harus bekerdja keras, ini djuga merupakan kesempatan

yang baik untuk terus-menerus mengadakan sikap tentang hal² yang baru timbul. Maka dari itu saja benar² merasa berterimakasih pada setiap kesempatan yang sedemikian ini.

PERSOALAN POLITIK BERESKAN DULU!

Saudara² sedang melangsungkan suatu Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi. Memang sudah sewajarnyalah kalau kaum veteran, seperti halnya golongan² Rakjat lainnya, mentjurahkan penhatiannya setjara intensif kepada persoalan keuangan dan ekonomi.

Persoalan keuangan dan ekonomi adalah persoalan pokok yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia pada saat ini. Kalau saya katakan bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan pokok, ini tidak berarti bahwa persoalan politik menjadi tidak pokok. Djustru dengan menganggap persoalan ekonomi sebagai persoalan pokok, kita akan senantiasa berhadapan dengan persoalan politik, baik politik dalam maupun luarnegeri. Djadi persoalan ekonomi membikin kita berhadapan setjara langsung dan setjara mendesak dengan persoalan politik dalam arti bahwa soal² ekonomi hanya akan bisa diatasi djika soal politik dibereskan lebih dulu. Bangunan politik harus sesuai dengan susunan ekonomi yang mau kita dirikan. Setiap diskusi tentang persoalan² ekonomi harus berdasarkan sikap ini.

Saya ingin memberikan suatu tjontoh. Kaum imperialis Amerika Serikat melalui pers mereka sering melantjarkan tuduhan² kealamat Presiden Sukarno dengan mengatakan bahwa beliau sengadja mengobar-ngobarkan perasaan anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neo-kolonialisme Malaysia dan sebagainya dengan maksud untuk menutupi kesulitan² ekonomi didalam negeri, artinya dengan maksud untuk membelokkan perhatian Rakjat dari kesulitan² didalam negeri. Dengan demikian Presiden Sukarno „mengurangi oposisi“, demikian katanya. Ini adalah suatu pemutarbalikan yang sangat kasar. Sikap anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neo-kolonialisme merupakan sjarat² mutlak djika kita ingin mengatasi kesulitan² ekonomi dalam negeri dan ingin membangun ekonomi yang bersih dari imperialisme. Selama kita tetap berpegang teguh pada sikap² ini, maka ada djaminan bahwa kesulitan² ekonomi dalam negeri

akan teratasi dengan tjara jang sesuai dengan kepentingan-kepentingan Rakjat dan dalam semangat patriotisme jang se-tinggi²nja. Tetapi begitu ada ke-ragu²an dalam sikap anti-imperialis, apalagi menghentikan sikap jang demikian untuk mulai main mata dengan imperialis atau mulai memberi konsesi² kepada mereka, maka pada saat itu timbullah bahaya bahwa kesulitan² ekonomi takkan dapat diatasi, atau dapat „diatasi” menurut tjara imperialis, jaitu membuka se-lebar²nja pintu penetrasi ekonomi oleh kaum imperialis.

Memang tuduhan² kaum imperialis jang sedemikian itu mempunyai maksud jang djelas, jaitu untuk membelokkan perhatian kita dari persoalan melawan imperialisme, supaya kita tidak melawan dan menjerah kepada imperialisme dan dengan demikian kaum imperialis bisa memenangkan konsepsi²nja dibidang ekonomi. Oleh karena itu, semakin memuntjak kesulitan² ekonomi, maka sikap anti-imperialis kita harus mendjadi semakin tajam. Kita harus waspada terhadap mereka jang menginginkan sebaliknya.

DEKON MELIPUTI 3 SOAL POKOK

Sdr.² telah meminta kepada saja untuk berbitjara mengenai Dekon, jaitu dokumen bersedjarah jang diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret jl. dan jang oleh Sidang Umum MPRS jang ke-II dalam bulan Mei jbl, telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan garis² besar haluan pembangunan dibidang ekonomi. Dekon adalah sendjata penting disamping Manipol dalam perjuangan Rakjat Indonesia untuk menyelesaikan tahap pertama daripada revolusinja. Dekon djuga merupakan sendjata penting bagi perjuangan Rakjat Indonesia untuk mengatasi kesulitan² ekonomi jang makin hari makin memuntjak.

Dekon meliputi tiga soal pokok jang sangat penting. *Pertama*, Dekon menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia pada tahap revolusi sekarang ini, jaitu tahap revolusi nasional dan demokratis dimana jang mendjadi tugas pokoknja ialah membersihkan atau mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme. *Kedua*, Dekon menggariskan kebidjaksanaan djangka pendek jang harus segera dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. *Ketiga*, Dekon menetapkan sjarat²

politik jang mutlak perlu bagi pelaksanaan Dekon itu sendiri, jaitu tertjapainja kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom melalui pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi baik dalam bidang administratif maupun eksekutif, atau dengan kata² lain pembentukan Pemerintah Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Tiga pokok ini membikin Dekon mendjadi sebuah program jang dalam dasar²nja boleh dikatakan membahas persoalan ekonomi dalam keseluruhannja. Strategi dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek merupakan satu kesatuan jang tak terpisah-pisahkan. Strategi dasar hanya bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek. Pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek harus sepenuhnya didasarkan pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme sesuai dengan strategi dasar ekonomi. Sedangkan sjarat mutlak untuk mendjamin supaya strategi dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek dapat dilaksanakan benar² sebagai satu kesatuan adalah pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi dibidang administratif dan eksekutif.

RESOLUSI MPRS WADJIB DILAKSANAKAN

Disamping Dekon kita sekarang djuga sudah mempunyai dokumen penting lain, jaitu Resolusi MPRS No. I/1963 jang menetapkan berbagai prinsip tentang pelaksanaan pembangunan disetiap lapangan. Resolusi MPRS ini sangat penting karena ia disusun oleh lembaga negara jang tertinggi dimana diwakili segenap lapisan Rakjat jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional. Resolusi MPRS adalah sangat penting karena ia disusun berdasarkan pembahasan jang benar² menjeluruh daripada berbagai dokumen penting jang merumuskan *pengalaman²* pembangunan, jaitu (1) amanat Presiden Sukarno „Ambeg Parama-Arta” tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS No. I dan II, tahun 1960; (2) kesimpulan Sidang Pimpinan MPRS tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana; (3) memorandum Pimpinan MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 tentang prioritas² pembangunan; dan (4) intisari hasil karya panitia² MPRS Daswati I. Djadi, Resolusi MPRS itu didasarkan pada bahan² jang

lengkap tentang *pengalaman* sehingga dapat melem-
pangkan kesalahan² yang telah timbul dalam pelaksana-
an Pola Pembangunan dan dapat juga menekankan
prinsip² yang harus dipegang teguh dalam menghadapi
berbagai soal pada saat ini. Resolusi MPRS itu perlu
sekali dipelajari dengan se-baik²nja dalam hubungan
dengan pelaksanaan Dekon.

Saja menekankan pentingnja Resolusi MPRS ini
sebab njatnja ada fikiran pada sementara orang bahwa
Resolusi MPRS bisa dianggap sepi, diremehkan, tidak
didjalankan atau malahan dilanggar. Sikap atau per-
buatan yang demikian adalah samasekali bertentangan
dengan Undang² Dasar 1945, dimana dinjatakan bah-
wa : *„Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilaku-
kan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rak-
jat“*. (Fasal 1, ayat 2), dan djuga bahwa : *„Madjelis
Permusjawaratan Rakjat menetapkan undang² dasar
dan garis² besar daripada haluan negara“* (Fasal 3).
Selama belum ada MPR, MPRS ditetapkan sepenuhnya
mendjalankan kedaulatan Rakjat dan oleh karena itu
Rakjat harus berdjuaug supaya Ketetapan² serta Reso-
lusi MPRS benar² didjalankan. Tugas ini sepenuhnya
sedjalan dengan tugas memperdjuaugkan pelaksanaan
sungguh² daripada Dekon itu sendiri.

Memang sudah mendjadi kenjataan dinegeri kita,
bahwa belum tjukup memperdjuaugkan supaya politik²
yang baik diterima sebagai politik resmi. Setelah politik²
yang baik itu diterima maka harus pula dilakukan per-
djuaugan sengit supaya dilaksanakan.

SEKTOR KOPERASI DAN SWASTA HARUS ANTI- IMPERIALIS DAN ANTI-FEODAL

Musjawarah yang sedang diadakan oleh Saudara² ini
tentu dimaksudkan bukan hanya untuk meninjau se-
tjara umum keadaan ekonomi dan keuangan, tetapi di-
samping itu djuga berusaha agar kaum veteran sendiri
bisa memegang peranan, bisa mendapat tempat yang
wajar, bisa mentjuraikan *„funds and forces“*-nja da-
lam pekerdjaan besar yang dihadapi oleh Rakjat Indo-
nesia pada waktu ini. Kaum Komunis Indonesia me-
njambut dengan hangat usaha² yang demikian karena
kita memang sangat menginginkan supaya segenap
„funds and forces“ nasional dan domestik dihimpun dan

dikerahkan. Dalam Dekon ditegaskan, bahwa *„Dalam
perdjuaugan untuk menjelesaikan tahap nasional dan
demokratis ini, maka sudah tibalah waktunya untuk me-
ngerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah
maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan do-
mestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan
untuk meningkatkan produksi dan menambahkan peng-
hasilan Negara“*. (Deklarasi Ekonomi, fasal 5).

Ada fihak yang sengadja ingin menimbulkan kesan
se-akan² kaum Komunis memusuhi swasta, dan se-akan²
kaum Komunis hanya menjetudjui adanya ekonomi sek-
tor negara dan koperasi. Fitnahan demikian memang
dimaksudkan untuk memetjah-belah potensi nasional
kita supaya kemudian masing² potensi bisa dikuasai oleh
kaum imperialis. Menurut PKI, seperti halnja dibidang
politik dibutuhkan penghimpunan segenap potensi na-
sional yang anti-imperialis dan anti-feodal yang diwu-
djudkan dalam bentuk kegotongrojongan nasional ber-
poroskan NASAKOM, demikian pula segenap potensi
nasional dibidang ekonomi yang anti-imperialis dan anti-
feodal harus dihimpun. Tugas untuk menghimpun po-
tensi dibidang politik dan dibidang ekonomi ini, harus
kita kerdjakan sekaligus demi menjelesaikan tahap re-
volusi sekarang ini dimana seperti dikatakan dalam
Dekon : *„kita harus mentjiptakan susunan ekonomi yang
bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa²
imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme“*. (Dekon,
fasal 3).

Sikap PKI ini bukanlah sikap baru yang tjepat² di-
tetapkan untuk menjesuaikan diri dengan alam Manipol
atau alam Dekon. Sikap ini adalah sikap sedjak lama,
seperti dapat Sdr.² lihat sendiri didalam Program
Umum PKI yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V
yang diadakan dalam tahun 1954 dan yang kemudian
diperkuat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (1959)
dengan kalimat sbb. :

*„Ekonomi Indonesia, disamping mengutamakan eko-
nomi sektor negara yang memimpn, tidak seharusnya
menentang industri dan perdagangan yang diselengga-
rakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus
dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis
dan feodal. . . . Proteksi dan fasilitas harus diberikan
kepada kapitalis² nasional, terutama industrialis² nasio-*

nal, untuk berkembang dalam batas² yang tidak dapat menguasai kehidupan Rakyat dan negara, dan disamping itu ekonomi individu² Rakyat pekerja harus dibantu².

Tetapi tidaklah cukup jika kita hanya menekankan perlunya ada tiga potensi (ekonomi sektor negara, koperasi dan swasta). Harus pula diingat perspektif Revolusi Indonesia, yaitu Sosialisme Indonesia. Adanya Sosialisme sebagai perspektif mempunyai konsekuensi yang sangat penting bagi potensi² swasta dan koperasi. Adanya Sosialisme sebagai perspektif revolusi berarti bahwa potensi swasta tidak boleh berkembang sedemikian rupa sehingga dapat menguasai kehidupan Rakyat dan negara, karena jika ini terjadi maka perspektif revolusi akan berubah menjadi kapitalisme. Sektor swasta tidak boleh berkembang setjara „liberal“, setjara sesuka-sukanya. Demikian pula, tidak boleh dibiarkan sektor koperasi menjadi tempat berkembangnya kapitalis-kapitalis baru dan untuk mematikan produsen² yang lebih lemah. Sektor koperasi justru harus menghambat proses diferensiasi antara produsen² kecil supaya dapat membawa mereka langsung menuju ke-koperasi² sosialis setelah tahap pertama Revolusi kita selesai.

Sektor swasta dan sektor koperasi memegang peranan penting dalam membangun ekonomi nasional dan demokratis justru karena mereka aktif ikutserta dalam melawan imperialisme dan feodalisme. Tidak hanya itu. Sektor² koperasi dan swasta yang nasional dan progresif tidak mungkin berkembang kalau mereka tidak konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal. Maka dari itu, susunan ekonomi nasional dan demokratis membutuhkan sektor koperasi dan swasta, sebagaimana halnya sektor koperasi dan swasta membutuhkan susunan ekonomi yang nasional dan demokratis.

SEKTOR NEGARA HARUS MEMEGANG PIMPINAN

Diterimanya Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia, seperti yang tertantum dalam Manipol, mempunyai konsekuensi yang sangat penting bagi ekonomi sektor negara sendiri. Dengan Sosialisme sebagai perspektif, maka berarti bahwa ekonomi sektor negara harus diperkembangkan sehingga dikemudian hari menjadi unsur sosialis yang terpenting dalam ekonomi Indone-

sia. Sektor negara harus memegang pimpinan bukan hanya dalam politik harga atau mengurus soal² ekonomi dalam arti yang sempit, melainkan juga dalam menjalankan politik anti-imperialis dan anti-feodal. Dengan Sosialisme sebagai perspektif, unsur ekonomi yang sudah termasuk sektor negara tidak boleh di-swastakan atau „diliberalkan“. Liberalisasi daripada PTT, DKA dll., dengan menjadikannya PN, artinya dengan sangat melonggarkan kontrol Pemerintah dan Parlemen terhadap perusahaan² tsb, adalah bertentangan dengan penerimaan Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia. Disamping itu, sudah tentu PN dan PDN tidak boleh dijadikan sarang² bagi perkembangan kapitalis² birokrat yang memperkaya diri dengan kekayaan negara, dan melalui kedudukan²nya sendiri ataupun kedudukan² kontjokontjonya dalam aparaturnya akhirnya berhasil menguasai bidang² ekonomi tertentu. Sektor ekonomi negara, atau kongkritnya perusahaan² negara, tidak boleh diserahkan kepada kapitalis² birokrat untuk dijalankan sesuka hatinya. Perusahaan² negara adalah milik negara, dan dengan demikian berarti milik seluruh Rakyat. PN² itu harus dijalankan oleh negara dengan mempergunakan tenaga² yang benar² ahli, tjakap, djudjur, sungguh² dan patriotik, yang berdjaja Manipol, yang bersedia dan mampu menjalankan Dekon setjara konsekwen.

SEKTOR SWASTA STABIL DAN TEPERTJAJA DIBIDANG PRODUKSI

Bagi mereka yang ingin ikut melaksanakan Dekon dengan menjedikan diri baik sebagai potensi swasta maupun koperasi, tentu satu hal yang masih sangat perlu ditegaskan ialah mengenai bidang² ekonomi yang mana yang terbuka dan yang paling baik bagi potensi² itu. Perlu diingat bahwa salahsatu sebab terpenting mengapa sektor perusahaan swasta masih begitu lemah dinegeri kita ialah oleh karena menurut perbandingan masih terlalu banyak yang bergerak dibidang perdagangan, dan masih terlalu kurang yang bergerak dibidang industri. Kenyataan ini membikin sektor swasta lemah bukan hanya setjara ekonomis karena selalu bisa diombang-ambingkan oleh fluktuasi² dibidang ekspor dan impor, tetapi juga setjara politis, yaitu sikap anti-imperialisnya dan anti-feodalisme yang tidak teguh.

Lagipula, harus kita ingat bahwa baik dalam Ketetapan MPRS No. II/1960 maupun dalam Dekon ditegaskan bahwa sektor ekspor dan impor harus dikuasai dan/atau diselenggarakan seluruhnya oleh negara sehingga dengan sendirinya, akhirnya tidak akan ada tempat disitu bagi usaha swasta. Sedangkan dibidang distribusi (perdagangan etjeran) yang harus diberi prioritas menurut Resolusi MPRS No. I/tahun 1963 (fasal 9, ayat 1) ialah koperasi.

Djadi, ditinjau dari segala segi, segi ekonomi maupun segi politik, adalah jelas kiranya bahwa sektor swasta seharusnya menjtjurahkan perhatiannya kepada bidang produksi, chususnja sektor industri. Djustru disini lah diperlukan pengerahan funds and forces progresif se-banyaknja untuk memperkuat daja-produksi ekonomi kita dan djustru disini lah perusahaan² swasta bisa mendapat kedudukan yang stabil dan tepertjaja didalam tata perekonomian negeri kita.

Persoalan ini tentu akan mendapat perhatian Sdr². Untuk mewujudkanja saja berpendapat diperlukan dua hal, jaitu : *Pertama*, pengertian dari mereka yang ingin menjumbangkan funds and forces-nja. Dan *kedua*, langkah² kongkrit dari Pemerintah yang memungkinkan funds and forces itu disumbangkan se-banyaknja. Hal ini dapat ditjapai djika Resolusi MPRS No. I/1963 dilaksanakan. Disitu ditegaskan bahwa : *„Dalam mengerjakan modal dan tenaga swasta nasional dan domestik, harus ditiptakan iklim yang menarik yang mendjamin fasilitas dan keuntungan serta kepastian hukum yang mendorong investasi dibidang produksi“*. (Resolusi MPRS. No. I/1963, bab 10, ayat f). Kalau fasilitas ini tidak diberikan, maka tidaklah mungkin untuk menghimpun segenap funds and forces. Malahan yang sudah dihimpun akan atau sedang mendjadi lesu dan akhirnya mati.

PERATURAN² EKONOMI 26 MEI 1963 BERTENTANGAN DENGAN DEKON

Ja, Sdr², Resolusi MPRS adalah sangat djelas dalam hal ini dan djuga dalam hal² lain. Tetapi kita menghadapi kenyataan bahwa bukan hanya Resolusi yang baik itu (yang nota bene adalah keputusan lembaga negara kita yang tertinggi) tidak dilaksanakan, tetapi malahan

sebaliknya, sudah diambil tindakan² yang djustru bertentangan dengan Resolusi itu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa peraturan² ekonomi tanggal 26 Mei 1963 „men-tjiptakan iklim yang menarik“ dan „mendorong investasi dibidang produksi“, kalau akibatnja tak lain ialah kenaikan harga barang yang keterlaluan. Harga barang² yang harus dibeli oleh industrialis serta djasa² yang mereka gunakan seperti listrik, pelajaran, keretaapi, PTT sudah atau sedang meningkat dengan sangat sebagai akibat peraturan baru dibidang impor dan harga serta sebagai akibat kenaikan² tarif. Akibatnja ialah bahwa pengusaha² yang sudah tjukup sulit memfinanciering berdasarkan peraturan² impor atau tarif² yang lama mendjadi semakin sulit. Disamping itu, barang² sandang-pangan djuga sedang meningkat dengan sangat sehingga dengan sendirinya kaum buruh memerlukan upah yang lebih besar untuk bisa hidup pada tingkat yang paling minimal. Kaum pengusaha sulit karena gadji yang bahaja gulung-tikar. Kaum buruh sulit karena gadji yang sudah tidak tjukup itu mendjadi semakin tidak tjukup, dan mereka diantjam bahaja pengangguran. Seluruh ekonomi negeri mengalami kesulitan yang lebih besar, karena produksi yang sudah begitu matjet akan mendjadi semakin matjet, dan kemungkinan² untuk mengatasi inflasi mendjadi semakin djauh.

Musjawarah yang Sdr² langsung pada saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membahas Dekon bukan hanya sebagai dokumen resmi tetapi djuga dalam rangka perkembangan² yang telah terdjadi sedjak Dekon itu diutjapkan dua bulan jl. Dalam waktu akhir² ini kita banyak mendengar tentang „pelaksanaan Dekon“ dengan keluarnya berbagai Peraturan Pemerintah yang katanja „untuk melaksanakan Dekon“. Tetapi kenjataannya, Dekon disambut hangat oleh Rakjat, sedangkan peraturan² pemerintah yang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon“ itu samasekali tidak disambut, bahkan telah menimbulkan keketjawaan² dan ketjaman² Rakjat. Rakjat yang sangat menunggu pelaksanaan Dekon yang baik itu mulai mengetahui bahwa apa yang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon“ adalah langsung bertentangan dengan Dekon.

Dengan demikian, disamping sekarang ada orang² yang Manipolis munafik atau Manipolis gadungan, se-

karang juga sudah ada Dekonis² munafik atau Dekonis gadungan, yaitu orang² yang „ber-Dekon dalam kata² tetapi anti-Dekon dalam perbuatan”. Inilah satu²nja kualifikasi yang paling tepat, yang harus diberikan kepada orang² yang menjadi konseptor² atau arsitek² peraturan² tanggal 26 Mei serta tukang² menaikkan tarif yang keterlaluan itu.

Salahsatu tugas kaum revolusioner yang sangat penting pada saat ini ialah meratakan pengertian tentang perbedaan Dekon dengan peraturan² 26 Mei 1963 yang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon” itu. Ini sangat perlu, karena jika perbedaan ini tidak dimengerti, maka kemarahan Rakjat terhadap peraturan² tersebut bisa berkembang menjadi kemarahan terhadap Dekon dan selanjutnya terhadap Bung Karno. Ini tidak dapat dihindarkan, karena Dekon adalah program untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia dibidang ekonomi. Melanggar Dekon sama halnya dengan menghambat atau mentjiderai tugas menyelesaikan Revolusi Indonesia.

Dekon sekarang berada dalam bahaya, seluruh potensi nasional harus dikerahkan untuk menyelamatkan Dekon! Menyelamatkan Dekon sama halnya dengan menyelamatkan Manipol, menyelamatkan Ketetapan² dan Resolusi MPRS dan menyelamatkan Revolusi Indonesia.

Dekon menetapkan prinsip² yang sangat penting dan madju, yaitu tentang perlu adanya pengerahan segenap potensi Rakjat, tentang perlu bagi negeri kita untuk berdiri diatas kaki sendiri, untuk tidak *menggantungkan diri* pada bantuan luarnegeri. Prinsip ini harus dijunjung tinggi karena prinsip ini adalah patriotik. Adalah omongkosong tugas membersihkan sisa² imperialisme akan dapat dilakukan tanpa semangat patriotik, dan lebih omongkosong lagi dengan „bantuan” kaum imperialis.

Dekon berbitjara tentang betapa pentingnja usaha² untuk „memperbesar daja-produksi, sehingga dengan demikian didalam waktu jangka pendek itu dapat dijamin bertambahnja peredaran barang didalam masjarakat sebagai imbalan daripada beredarnya uang”. (Dekon, fasal 30).

Dekon juga menetapkan bahwa: „Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh

Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan”. (Dekon, fasal 26).

Dalam semangat yang sama pula, Dekon mengatakan bahwa inflasi dan kekurangan devisa tidak mungkin diatasi dengan tindakan² moneter konvensional belaka melainkan harus diatasi dengan jalan „menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita”. (Dekon, fasal 13).

Peraturan² ekonomi 26 Mei jl., samasekali tidak sesuai dengan tiga prinsip Dekon yang baru saja kutip itu, yaitu prinsip memperbesar daja-produksi, prinsip memperhatikan kepentingan Rakjat dan prinsip mengatasi inflasi dengan menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat. Adalah tidak mungkin untuk memperbesar daja-produksi dengan jalan menaikkan harga disegala bidang. Pd. Presiden Djanda dalam konferensi persnja mengatakan, bahwa didalam Dekon tidak ada larangan untuk menaikkan tarif. Tetapi bagaimana bisa dikatakan bahwa tindakan² menaikkan harga dan tarif itu sesuai dengan Dekon yang mengatakan bahwa tindakan Pemerintah harus „dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan” dan bahwa tindakan² itu ditunjukkan untuk mengatasi inflasi? Djustru sebaliknya. Tindakan² itu akan lebih memerosotkan produksi dan memperhebat inflasi, dan akan dirasakan serta dimengerti oleh Rakjat bahwa „kepentingan mereka tidak diperhatikan”. Ini adalah njata sekali dari protes² yang membandjir dari segala pendjuru. Partai² Nasakom dan organisasi² massa revolusioner sudah dan masih terus menjatakan ketjumannja terhadap kenaikan berbagai tarif.

TINDAKAN² 26 MEI 1963 : KONVENSIONIL !

Tindakan² 26 Mei itu adalah serupa dengan tindakan² yang pernah atau malahan sering diambil dahulu, artinya konvensional, yaitu mengabdikan segala sesuatu pada penyelesaian ketidak-seimbangan atau disparitet yang timbul dibidang ekspor dan impor dengan perubahan² transaksi-kurs. Sedjalan dengan itu, kehidupan Rakjat menjadi lebih berat lagi karena kenaikan² yang keterlaluan dalam pungutan² terhadap impor. Satu²nja segi yang „non-konvensional” ialah bahwa belum pernah di-

lakukan serangan langsung dan demikian hebatnya terhadap kehidupan Rakjat. Belum pernah Rakjat kita menghadapi kenaikan² harga dan tarif sebesar 300% atau lebih dalam satu kali pukul.

Lagipula, tindakan² menaikkan harga sangat bertentangan dengan Resolusi MPRS No. I/1963 yang dengan tegas menetapkan bahwa „politik harga harus ditundukkan untuk menjegah kenaikan harga dan tarif.... dan menjamin peningkatan daya-beli Rakjat pekerdja, termasuk petani-produsen”. (Resolusi MPRS No. I/1963, bab 9, ayat 7).

Kesulitan² ekonomi yang diakibatkan oleh peraturan² 26 Mei disatu pihak telah membikin Rakjat menderita, tetapi di pihak lain telah membikin Rakjat bertambah mengerti hal² ekonomi, bertambah pandai dalam menju-sun konsepsi²nja sendiri, dan bertambah teguh dalam memperjuangkan konsepsi²nja itu. Kenyataan ini harus diperhatikan oleh mereka yang mendjadi konseptor² peraturan² 26 Mei dalam menghadapi bandjir protes dan tuntutan² supaya peraturan² itu ditinjau kembali untuk diganti dengan yang sesuai dengan Dekon.

Mengenai hal devaluasi, Dekon djelas se-djelas²nja mengatakan bahwa „tidak akan diambil tindakan² moneter yang drastis, seperti umpamanja devaluasi”. (Dekon, fasal 31). Baru sebulan yang lalu, sewaktu saja memberikan teramah dimuka Himpunan Sardjana Indonesia (HSI), saja telah berkata sebagai berikut: „Djangan² misalnja, devaluasi sudah resmi ditolak, tahu² masih terus sadja diadakan perubahan² dalam peraturan² ekspor dan impor dengan berbagai matjam transaksi-kurs yang pada hakekatnja tidak lain daripada devaluasi yang diselimuti”. Seperti kita sama² tahu, peraturan-peraturan 26 Mei memang setjara efektif telah mengubah kurs rupiah terhadap dolar dari Rp. 45,— menjadi kurang lebih Rp. 450,— (djika kita menghitung setjara kasar keuntungan² rupiah dari hak retensi sebesar 5% dari penghasilan devisa ditambah hak mendapat alokasi devisa sebanyak 10% bagi exportir dan 15% bagi exportir-produsen). Dalam sistim SIVA yang baru sadja dihapuskan dan yang djuga mengandung devaluasi, kurs dasar Rp. 45,— toh masih memegang peranan tertentu. Dalam sistim baru berdasarkan Perpres no. 5/1963, boleh dikatakan kurs Rp. 45,— samasekali tidak memegang peranan lagi.

Dengan demikian, peringatan saja ternyata masih kurang kena, karena devaluasi yang telah dilakukan itu ternyata samasekali tidak diselimuti. Yang terdjadi ialah suatu devaluasi de facto dan terbuka. *Hanja sadja, nama devaluasi tidak dipakai. Itulah satu²nja konsesi kepada Dekon! Devaluasi dijalankan tetapi tidak dinamakan devaluasi!*

BAHAJA KAPITALISME BIROKRATIS SEMAKIN BESAR

Saja ingin pada kesempatan ini membahas pula peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei jbl. mengenai Perusahaan² Dagang Negara, jaitu Perpres No. 7 tahun 1963. Saja anggap peraturan itu sangat perlu diperhatikan karena menjangkut hal susunan ekonomi yang mau kita bangun dalam tahap pertama Revolusi kita, jaitu tahap nasional dan demokratis. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan wewenang yang luas kepada PDN, sehingga mereka telah ditetapkan sebagai perusahaan² komersil biasa dengan BPU-PDN² sebagai sematjam Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. PDN boleh dikatakan tidak terikat lagi pada sesuatu kebidjaksanaan resmi, dan hanja dijalankan untuk mengedjar keuntungan². Disamping itu, didalam peraturan tanggal 26 Mei tentang apa yang dinamakan „kebidjaksanaan harga” (lebih baik dinamakan „tentang tidak adanya kebidjaksanaan harga”!) setiap usaha untuk mengendalikan harga barang² yang dijual oleh Pemerintah samasekali dibatalkan. *Jang berkuasa dan memimpin didalam ekonomi kita sedjak saat itu ialah harga pasar bebas alias kaum spekulan dan tukangjtjut². PDN malahan diwadajibkan mendekati harga pasar dan tidak boleh mendjual dengan selisih lebih besar dari 30% dengan harga pasar bebas setempat (lokal). Dapat dibayangkan bahwa akan terdjadi kongkalikong antara tukang² salahduduk dan salahurus didalam PDN dengan kaum spekulan dan tukangjtjut² dipasar bebas untuk mendjamin terus adanya „keuntungan² luar” bagi mereka sendiri.*

Saja anggap hal ini sebagai hal yang sangat penting, karena disamping mengakibatkan kerugian² yang sangat besar bagi Rakjat, ia djuga berarti melanggar prinsip yang telah lama ditekankan, jaitu tentang peranan komando atau peranan memimpin yang harus dipegang

oleh sektor negara. Perusahaan² yang menjadi milik negara sebagai hasil perjuangan kaum buruh dan Rakjat yang mengambilalih perusahaan² Belanda 5 tahun yang lalu, telah dijadikan perusahaan² komersial biasa yang dapat pula dibebaskan dari kewajiban menjumbang kepada Dana Pembangunan. Kredit yang begitu banyak yang mereka peroleh dari Pemerintah untuk sebagian akan dijadikan modal perusahaan.

Dengan adanya peraturan² baru tersebut kita menghadapi bahaya bahwa ekonomi akan semakin dikuasai oleh kaum kapitalis birokrat, terutama mereka yang berkaliber besar. Mereka akan bisa memperoleh keuntungan-keuntungannya (namanya yang resmi sekarang bukan keuntungan melainkan „perangsang“!) seperti kapitalis biasa, tetapi berbeda dengan kapitalis biasa mereka tidak mengambil risiko apapun karena modalnya seluruhnya dari Pemerintah! Itulah bedanya antara kapitalis biasa dengan kapitalis birokrat! Itulah sebabnya mengapa kaum Komunis bisa menjetudjui adanya kapitalis² atau pengusaha² nasional pada tahap revolusi nasional dan demokratis sekarang, tetapi melawan dengan keras adanya kaum kapitalis birokrat. Pantas saja, djustru suara sikap kapitalis birokrat yang „sok-sosialis“ adalah satu²nya suara yang menjambut baik peraturan² 26 Mei dan kenaikan tarif² sehingga menjadikan dirinya tertawaan seluruh Rakjat.

REVISIONISME MODERN MENIKAM „PERUT NEGARA“

Tjara² mengatur perusahaan² milik negara seperti yang kita lihat sekarang ternyata diilhami oleh apa yang sedang terjadi di Jugoslavia. Dengan demikian revisionisme modern yang sudah lama dilawan oleh kaum Komunis dalam berbagai bentuk kongkrit, seperti misalnya kegiatan mereka mengatjau perjuangan Rakjat² Asia-Afrika melawan imperialisme, Konferensi Kolombo, Konferensi Buruh Asia-Afrika dan lain² sebagainya, ternyata sudah mendjalar sehingga menjadi persoalan kongkrit bagi Rakjat Indonesia dalam hubungan dengan susunan ekonomi yang mau dibangun. *Revisionisme modern telah menikam „perut negara“ atau perekonomian negara Republik Indonesia.*

Walaupun kita di Indonesia sekarang belum menghadapi persoalan pembangunan Sosialisme, namun oleh

karena perspektif Revolusi Indonesia adalah Sosialisme, maka dalam membangun susunan ekonomi nasional dan demokratis kita tidak boleh melakukan hal² yang bertentangan dengan pembangunan Sosialisme.

Tjara² mengatur ekonomi sektor negara di Jugoslavia dalam kenjataannya melepaskan perusahaan² milik negara dari kebidjaksanaan negara dan dari perentjanaan sentral sehingga menimbulkan klas kapitalis yang baru dan akhirnya memperhebat anarki di bidang ekonomi. Inilah yang mau dipraktekkan dengan Perpres 7/1963. Saja tidak berkeberatan orang beladjar atau mengambil tjontoh dari luarnegeri, malahan ada baiknya, tetapi lakukanlah dengan kritis dan tudjukanlah untuk memperkuat Republik dan memperbaiki penghidupan Rakjat Indonesia.

DJUGA KAUM PENGUSAHA NASIONAL HARUS MELAWAN KABIR

Kapitalisme birokrat (kabir) membahayakan ekonomi sektor negara karena menghilangkan samasekali sifat²nya yang progresif. Ia membahayakan bagi kaum buruh karena penghisapan terhadap buruh ditutupi dengan kata² yang muluk² mengenai „kerjasama“ antara pimpinan dan buruh sebagai „karyawan“. Ia membahayakan bagi kaum tani karena persekutuaannya dengan kaum tuantanah di-desa² yang berkepentingan untuk meneruskan penghisapan terhadap kaum tani. Tetapi tidak hanya itu. Kapitalisme birokratis juga membahayakan bagi pengusaha² nasional, bagi sektor ekonomi swasta progresif, karena tjara²nya yang berdasarkan pensalahgunaan wewenang, tjatut, korupsi dan sebagainya. Di-mana² kaum pengusaha nasional menghadapi rintangan² yang mudah disingkirkan kalau „semir²“nya tjukup. Untuk dapat izin perusahaan, harus ada „semir“. Untuk membeli bahan bangunan perusahaan harus ada „semir“. Untuk dapat alokasi bahan², harus ada „semir“. Dan banyak lagi matjam² „semir“.

Dimana ada tjatut, korupsi, spekulasi, salahurus dan tjara² lain yang menjadi kelaziman kaum kapitalis birokrat, disitu tidak mungkin bagi pengusaha nasional untuk berkembang dengan sehat. Resolusi MPRS mengharuskan adanya fasilitas² bagi perusahaan² nasional, tetapi kapitalisme birokratis bukan hanya tidak memberikan fasilitas tetapi malahan menambah rintangan².

Lagipula, kapitalisme birokratis juga bersekutu dengan kaum imperialis yang memang sengadja berusaha mendorong kapitalisme birokratis itu untuk menjele-wengkan kita dari ril yang benar yang menudju kearah ekonomi nasional dan demokratis, dengan Sosialisme Indonesia sebagai perspektifnja.

Oleh karena itu, kapitalisme birokratis dan pemberan-tasannya merupakan soal besar bagi seluruh Rakjat Indonesia dalam menjelesaikan revolusinja. Djuga kaum pengusaha yang sungguh² nasional harus ambilbagian dalam perdjuaan yang besar ini, perdjuaan melawan kaum kabir (kapitalis birokrat).

Demikianlah, Sdr.² hal² yang ingin saja sampaikan dalam tjeramah ini. Sekali lagi, saja mengutjapkan ban-jak-banjak terimakasih kepada Sdr.² yang mengundang saja untuk berbitjara disini atasnama PKI sebagai salah-satu partai Nasakom.

Mudah²an Musjawarah yang sedang Sdr.² langsung-kan ini akan mentjapai sukses se-besar²nja. Sukses bagi kaum veteran sendiri dalam memberi sumbangannya ke-pada pekerdjaan besar yang sedang dihadapi oleh negeri kita, maupun bagi seluruh Rakjat dalam lebih memper-kuat tekad untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini, untuk menjelamatkan Dekon dan menjelesaikan revolusi kita dibidang ekonomi.

Hanja dengan demikian tanahair kita bisa mendjadi negeri yang benar² merdeka, baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi.

*(Pokok² tjeramah dihadapan Musja-
warah Besar Keuangan dan Ekonomi
Veteran Seluruh Indonesia di Taman
Tjibogo, Bogor, tgl. 6 Djuni 1963)*

KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH!

Pertama-tama saja ingin mengutjapkan banjak terima-kasih kepada pimpinan Departemen Perburuhan, chusus-nja J.M. Menteri Perburuhan, Sdr. Ahem Erningpradja, yang telah mengundang saja untuk memberi tjeramah dihadapan pegawai² Departemen Perburuhan.

Ini bukan untuk pertama kalinja saja, sebagai Ketua Comite Central PKI, memberi tjeramah dihadapan pe-gawai² negeri atas permintaan departemen yang ber-sangkutan. Ini sudah mendjadi tradisi, ja, sudah men-djadi salahsatu tjiri kepribadian bangsa kita yang dalam segala sepakterdjangnja mengutamakan kegotongrojong-an nasional berporoskan NASAKOM. Ini telah dimulai dalam tahun 1961 ketika saja diminta oleh Departemen Luar Negeri untuk memberi tjeramah dimuka Konfe-rensi Diplomat² RI di Asia, Afrika dan Australia. Tje-ramah itu kemudian disusul dengan seri tjeramah ten-tang Marxisme, yang saja berikan dimuka Latihan Ke-militeran Pegawai Sivil Departemen Luar Negeri. Dan setelah itu, semakin sering permintaan kepada PKI untuk memberi tjeramah² dihadapan pegawai² dari berbagai departemen. Disamping itu banjak pula permintaan dari berbagai organisasi pemuda, sardjana, veteran, univer-sitas dll. yang semuanya dimaksudkan untuk mendengar pandangan kaum Komunis mengenai hal² yang dianggap hangat atau perlu dibahas.

Ini merupakan salahsatu bukti dari sekian banjak bukti yang ada, bahwa kehidupan kepartaian yang sehat telah berhasil melawan berbagai usaha untuk merong-rongnja dan ingin mematahkanja. Kehidupan kepartai-an yang sehat telah berkembang selama beberapa tahun ini dan telah merupakan kemenangan besar bagi Rakjat Indonesia. Tjeramah² sematjam ini ikut mengkonsolida-sikan kemenangan itu.

Saja merasa gembira dapat memberi tjeramah diha-dapan pegawai² Departemen Perburuhan, PKI adalah

Partainya klas buruh sehingga dengan sendirinya mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kaum buruh Indonesia. Djika Sdr.² sebagai petugas² yang mengurus hal² yang berhubungan dengan kaum buruh, merasa perlu mendengar pendapat dari Partainya klas buruh, maka ini adalah tanda baik tentang tjara kerdja Sdr.² sendiri. Memang ada orang yang suka „mengurusi“ kaum buruh sedangkan dia sendiri anti-buruh atau buruh-phobi. Apa yang bisa diharapkan oleh kaum buruh dari orang² sematjam itu? Ja, apa yang dapat diharapkan oleh Republik kita, Republik yang ber-Pantjasila, ber-Manipol dan ber-NASAKOM dari orang² sematjam itu?

REVOLUSI DAN KAUM BURUH

Saja diminta untuk memberi tjeramah mengenai hubungan kaum buruh dengan Dekon. Tema ini memang merupakan tema yang baik sekali untuk dibahas. Dekon adalah program untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia dibidang ekonomi pada tahap pertama, jaitu tahap nasional dan demokratis daripada revolusi kita. Kaum buruh, seperti dikatakan didalam Manipol, merupakan soko-guru Revolusi Indonesia, disamping kaum tani. Dengan sendirinya, hubungannya soko-guru revolusi atau tenaga pokok revolusi dengan program revolusi adalah erat sekali. Pembahasan² tema ini perlu didengar oleh siapa saja yang sungguh² ingin menjalankan program itu, yang sungguh² ingin menyelesaikan revolusi kita. Samasekali tidak mungkin melaksanakan program revolusi dengan mengabaikan kepentingan² soko-guru revolusi, apalagi dengan ber-phobi terhadapnya. Berbitjara kemak-kemik tentang Revolusi, tentang Manipol, tentang Dekon dan sebagainya, sambil berbuat yang merugikan kaum buruh atau melanggar hak² kaum buruh adalah kemunafikan yang keterlaluan, yang tidak bisa diampuni.

KAUM BURUH DAN DEKON

Sewaktu Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret jhl. kaum buruh berdiri dibarisan paling depan dalam menjambutnya. Bahkan lebih dari itu. Djauh sebelum Dekon diumumkan, berbagai golongan kaum buruh telah aktif membahas dan mengu-

pas kesulitan² ekonomi melalui seminar² dan diskusi² produksi yang diadakan oleh serikatburuh². Ini semua terdjadi terutama sedjak pidato Tahun Kemenangan dimana Bung Karno telah menjatakan kesanggupan untuk memberi perhatian khusus kepada persoalan ekonomi.

Melalui seminar² itu, kaum buruh telah mengajukan berbagai usul kongkrit tentang tjara² yang sebaiknya ditempuh untuk mengatasi kesulitan² yang timbul selama beberapa tahun belakangan ini, seperti misalnja dibidang pengangkutan, terutama kereta-api, dibidang perkebunan, dibidang pekerdjaan umum dsb. Melalui seminar² itu, kaum buruh telah djuga mengutuk salah-urus yang meradjalela di-mana² dan mulai menundjuk hidung dari mereka yang bertanggungdjawab. Melalui seminar² itu, kaum buruh setjara aktif telah menegakkan pendirian yang kemudian ternjata mendjadi pokok pendirian didalam Dekon, jaitu bahwa soal mempertinggi produksi merupakan kuntji dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini.

Ini mendjadi djelas dari fasal 5 dan 6 Dekon dimana dikatakan sebagai berikut: „Dalam perdjuaan untuk menyelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunya untuk mengerahkan segenap potensi . . . dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambahkan penghasilan Negara. . . . Karena itu, yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar² untuk industrialisasi“.

Dengan demikian djelaslah bahwa sumbangan kaum buruh dalam penjusunan Dekon sungguh besar. Kenjataan ini membuktikan betapa bohong dan keliru anggapan sementara orang bahwa kaum buruh tidak tahu apa², tidak perlu diadjak untuk mengatasi kesulitan², dan malahan tidak usah didengar pendapatnja. Djustru sebaliknya yang benar. Kaum buruh mengetahui banyak sekali dari pengalamannya sehari². Mereka mengikuti dari dekat pengurusan didalam perusahaan dimana mereka bekerdja dan mereka bisa setjara tadjam dan tepat melandjangi sebab² pokok dari segala kematjetan. Malahan saja merasa bahwa sebab pokok mengapa kaum buruh tidak diadjak, tidak didengar, ialah djustru karena mereka mengetahui „terlalu banyak“ sehingga

dianggap bisa membahayakan kedudukan orang² tertentu.

Tak bisa disangkal bahwa kaum buruh dalam kerdjasama dengan para ahli dan pegawai² lainnya mampu mendobrak segala kematjetan yang timbul di bidang industri. Tentang ini sudah banjak buktinja, misalnja di-fabrik semen Gresik yang telah berhasil mentjatat kenaikan produksi yang terus-menerus sebagai akibat diadjaknja kaum buruh serta adanja kerdjasama yang baik antara mereka dengan pimpinan management dan dengan para ahli.

Kaum buruh adalah salahsatu tenaga produktif yang pokok didalam ekonomi Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat memegang peranan yang besar sekali dalam melaksanakan Dekon chususnya di bidang kenaikan produksi. Tanpa kaum buruh, tidak mungkin bagi negeri kita untuk mentjapai tudjuan itu.

Djika hal ini sudah disadari, maka kita menghadapi dua konsekwensi dalam pelaksanaan Dekon yang berhubungan dengan kaum buruh; *pertama*, kepentingan² mereka harus diperhatikan, jaitu seperti ditekankan didalam Dekon, dan *kedua*, kaum buruh harus diikutsertakan setjara aktif dalam pengurusan proses produksi dan bahwa mereka harus diikutsertakan setjara terorganisasi, jaitu melalui dewan² perusahaan, dewan² produksi, dewan-dewan pengangkutan, dewan² pertimbangan di departemen² dan djawatan², dsb.

Mari kita mengupas kedua hal ini setjara lebih terperinci.

I. PERHATIAN KEPADA KEPENTINGAN² KAUM BURUH DAN RAKJAT PEKERDJA PADA UMUMNJA

Dalam menjambut hangat Dekon tempo hari, seluruh lapisan Rakjat termasuk kaum buruh memberi tekanan khusus pada hal *pelaksanaan*, karena djustru itulah yang dinanti-nantikan.

Beberapa minggu yang lalu Pemerintah telah mengeluarkan „peraturan² ekonomi 26 Mei 1963”, yang dikatakan sebagai peraturan² „untuk melaksanakan Dekon”. Tak usah kiranja saja djelaskan disini betapa peraturan² yang dikatakan „untuk melaksanakan Dekon” itu telah menimbulkan protes² dan tjelaan² yang luas sekali. Ke-

naikan-kenaikan tarif dan harga yang terdjadi sedjak beberapa minggu yang lalu djuga dilakukan „atasnama Dekon”. Devaluasi didjalankan „atasnama Dekon”, walaupun semua orang tahu bahwa Dekon menolak devaluasi. Pengendalian harga dilepaskan dan anarki pasar dibiarkan berkuasa penuh, semuanya „atasnama Dekon”. Perusahaan² Dagang Negara (PDN²) diliberalisasi dan diberi fasilitas² dan perlakuan² istimewa atau privileges yang keterlaluan „atasnama Dekon”. Untung sadja, bahwa kesedaran politik Rakjat Indonesia termasuk kaum buruhnja sudah tjukup tinggi, pengalaman² serta pengetahuan ekonomi Rakjat Indonesia sudah lumajan, sehingga mereka dapat segera melihat bahwa tindakan² ini bertentangan dengan Dekon, meskipun dikatakan „atasnama” Dekon.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Politbiro CC PKI pada tanggal 3 Djuni jbl, telah diuraikan setjara terperinci tentang pengaruh² peraturan² 26 Mei terhadap daja-beli Rakjat pekerdja. Sebagai akibat kenaikan² yang tinggi dalam pungutan² impor dan bea-masuk, harga² barang impor akan meningkat dengan melondjak-londjak. Ada barang² impor yang mengalami kenaikan sampai 700% atau 900%, termasuk barang² essensiil atau setengah essensiil, ataupun bahan² baku/penolong yang sangat diperlukan industri. Maksud Pemerintah untuk membandjiri pasaran dengan barang² impor djustru mengingatkan kita pada politik Sumitro yang djuga membuka lebar kraan impor setjara tak terbatas. Politik itu berarti meng-hambur²kan devisa negeri kita, mematikan industri nasional kita dan membikin kita semakin tergantung pada kredit luarnegeri.

TEROR KENAIKAN HARGA

Penghapusan pengendalian harga barang² sudah dan sedang membawa bentjana besar bagi Rakjat pekerdja dalam bentuk kenaikan harga. Ini betul² memberi angin kepada kaum tukang tjatut dan spekulan untuk dengan kongkalikong bersama kaum kapitalis birokrat leluasa melantjarkan teror kenaikan harga terhadap Rakjat.

Ja, demikianlah keadaan dinegeri kita pada saat ini. Disatu fihak teror dilantjarkan oleh kontra-revolusi dalam bentuk teror rasial yang sangat merusak aparat ekonomi dan penghidupan Rakjat kita. Difihak lain,

Rakyat menghadapi teror harga yang mengancam seluruh kehidupan ekonomi. Kedua matjam teror ini merupakan antjaman besar bagi terlaksanaja Dekon. Oleh karena itu, tugas untuk melawan dua matjam teror itu merupakan tugas yang mendesak bagi seluruh Rakyat Indonesia, untuk menjelamatkan Dekon.

Serangan langsung terhadap kehidupan Rakyat merupakan satu hal prinsipil djika dihubungkan dengan pelaksanaan Dekon. Tidak ada gunanja untuk mengatakan, seperti dikatakan setjara resmi dalam konferensi pers Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl., bahwa Dekon tidak melarang adanya kenaikan tarif dan harga. Apalagi, bersamaan dengan itu dikatakan pula bahwa peraturan² ekonomi dan kenaikan harga serta tarif memang pahit bagi Rakyat. Apakah Dekon menjuruh membikin penghidupan Rakyat yang sudah pahit menjadi lebih pahit lagi? Saja anggap pendirian ini tidak dapat dipertahankan. Dekon menjatakan dengan tegas: „Sesuai dengan pertumbuhan kesedaran sosial dan kesedaran ekonomi Rakyat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakyat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan”. (Dekon, fasal 26). Perlu diperhatikan bahwa kedua perkataan „kepentingan mereka” digarisbawahi. Siapa yang akan dapat membantah bahwa Dekon melarang, dan melarang dengan keras, kenaikan² harga dan tarif yang keterluluan? Siapa yang akan dapat membantah, bahwa Dekon melarang Pemerintah membikin kehidupan Rakyat bertambah pahit?

SEPENUHNJA TANGGUNGJAWAB PEMBANTU² PRESIDEN

Tetapi disamping itu, kalau kita mempelajari penjelasan Pemerintah tentang peraturan² 26 Mei yang dibatjakan oleh Sdr. Slamet Sutikno dalam konferensi pers tersebut, disitu dikatakan bahwa „peraturan² dalam bidang impor (yang dimaksudkan ialah pungutan² impor yang amat tinggi itu) memang sangat dipengaruhi oleh keperluan keuangan negara”, jaitu untuk „mendapat penghasilan sekedarnya dari impor”. Tentu Sdr. Slamet Sutikno sendiri tidak akan membantah bahwa yang memikul beban pungutan² impor itu tak lain tak bukan ialah Rakyat sebagai konsumen. Tetapi, apa yang dikatakan

di Dekon mengenai hal demikian? Dekon tidak ragu² sedikitpun mengatakan bahwa usaha² untuk mentjapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara „harus ditjapai . . . dengan tidak menambah beban Rakyat”. (Dekon, fasal 31). Bukankah ini larangan yang sedjelas-djelasnya terhadap apa yang disusun oleh konseptor² peraturan² 26 Mei?

Konfrontasi² sematjam ini membikin saja menjadi ragu apakah para konseptor itu pernah membuat dan mempelajari Dekon sehingga mengerti isinja, apalagi setjara sungguh² mau melaksanakan Dekon kita yang begitu baik itu. Saja memang gigih melawan peraturan ekonomi 26 Mei dan kenaikan harga serta tarif, karena saja sebagai anggota MPN (Musjawarah Pimpinan Negara) adalah salahseorang yang ikut aktif menjiapkan Dekon dan saja yakin bahwa Dekon dengan peraturan² tersebut, ditjiderai. Selain daripada itu, dalam melawan peraturan² tersebut saja menunjukkan sasarannya, jaitu konseptor²nja. Djika tidak demikian, kemarahan Rakyat akan ditujukan pada Dekon dan pada Presiden Sukarno. Padahal, Dekon adalah baik dan Presiden Sukarno sendiri sering berkata dengan djujur bahwa beliau „tidak mengerti soal² ekonomi”. Djadi, mengenai soal² ekonomi dinegeri kita sepenuhnya tanggungjawab dari pembantu² Presiden Sukarno. Djadi, saja bertitiktolak dari satu kejakinan yang taktergojahkan dalam melawan peraturan² tersebut.

BERTENTANGAN DENGAN RESOLUSI MPRS

Disamping itu, peraturan² tersebut bertentangan dengan Resolusi MPRS yang antara lain mengatakan bahwa „Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tarif menudju terlaksanaja Ketetapan MPRS No. II/1960, Lampiran B, Bab V, ayat 5, yang harus dilaksanakan setjara berentjana berdasarkan pada tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan daja-beli Rakyat pekendja, termasuk petani produsen”. (Resolusi MPRS No. I, 1963, fasal 9, ayat 7). Djadi, selain bertentangan dengan Resolusi MPRS, djuga bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. II/1960, Lampiran B, Bab V, ayat 5.

MPRS adalah lembaga negara tertinggi yang memegang kedaulatan Rakyat. MPRS bukanlah suatu

debatang-club atau warung-kopi dimana anggota²nja berkumpul sekedar untuk bertukar pikiran. MPRS adalah lembaga negara yang oleh Undang² Dasar 1945 diserahkan tugas menyusun haluan Negara. Pendapat² yang terdapat dikalangan orang² yang bertanggungjawab untuk menganggap enteng MPRS, untuk samasekali tidak menggubris MPRS, sangat menusuk hati Rakjat dan berlawanan dengan Undang² Dasar.

PERATURAN 26 MEI PAHIT BAGI RAKJAT

Mungkin Sdr.² akan tertarik oleh kenyataan bahwa saja dalam membahas soal ini, banjak sekali mengutip. bahkan mungkin ada yang merasa terlalu banjak mengutip. Saja sengadja berbuat demikian, karena kalau kita mau memberitarkan sesuatu dokumen resmi, apalagi untuk menentukan tjarat² pelaksanaannya, kita harus kongkrit, kita harus terus-menerus berpegang kepada jiwa maupun kepada kata² dokumen itu. Konseptor² „peraturan² 26 Mei“ selalu menekankan bahwa peraturan-peraturan itu ialah untuk „melaksanakan Dekon“ tapi tidak pernah menjelaskan fasal Dekon yang mana yang mau dilaksanakan itu. Tjara² yang demikian adalah sangat berbahaya, apalagi mengingat bahwa nama Dekon sudah demikian dikenal dinegeri kita.

Oleh karena itu, kalau berbitjara mengenai Dekon, sebagaimana juga mengenai Manipol dan pedoman² pelaksanaannya, sebaiknya kita menggunakan kutipan². Tjara ini adalah tjara yang paling terdjamin. Djika tjara yang tepat ini ditempuh, maka mudah membuktikan setjara objektif bahwa peraturan² ekonomi 26 Mei langsung bertentangan dengan Dekon, sebab Dekon bukan hanya tidak membenarkan devaluasi, liberalisasi perusahaan² negara, kenaikan² harga dan tarif, tetapi tegas² melarangnja. Demikian pula Resolusi MPRS.

Tjara kongkrit dalam membahas sesuatu adalah memang tjara kaum buruh, tjara proletar, oleh karena itu tjara inilah yang ditempuh oleh PKI.

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl. antara lain dikatakan bahwa peraturan² 26 Mei 1963 adalah *pahit bagi Rakjat*. Djuga dikatakan bahwa „pembangunan semesta memang memerlukan pengorbanan yang tidak ringan“. Djadi, diusahakan untuk membenarkan kenaikan² harga dan tarif karena, katanja, kita

harus „berkorban“! Mungkin pendjelasan ini diberikan berhubung dengan fasal 26 Dekon dimana perkataan „pengorbanan“ dipergunakan. Tetapi kalau kita meneliti fasal Dekon itu, menjadi jelas bahwa maksud Dekon berlainan sekali. Sebaiknja kalau saja memberi kutipan yang setjukupnja :

„Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari Rakjat, baik dalam arti menambahkan keperluan materiil atau membangkitkan perasaan patriotisme dan pengorbanan seperlunya“. (Dekon, fasal 26).

TENTANG PATRIOTISME DAN PENGORBANAN

Dari kutipan ini jelas sekali bahwa Dekon mengharuskan supaya kepentingan Rakjat diperhatikan justru oleh karena dengan demikian perasaan patriotisme dan pengorbanan akan dapat dibangkitkan. Saja anggap sikap ini memang sangat tepat. Keharusan untuk memperhatikan kepentingan² Rakjat dengan demikian mempunyai satu tudjuan nasional yang sangat penting, jaitu untuk „menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat“ (Dekon, fasal 13).

Tidak ada Rakjat dimanapun didunia yang bersedia berkorban kalau mereka belum yakin bahwa kepentingan-kepentingan mereka diperhatikan. Rakjat Indonesia, termasuk kaum buruhnja tidak menolak untuk berkorban. Bahkan mereka telah lama berkorban. Setiap kemerosotan dalam penghasilan riil tak bisa diartikan lain daripada pengorbanan, dan justru inilah nasibnja kaum buruh, pegawai dan seluruh Rakjat, pekerdja sedjak tahun 1950 dan terutama selama beberapa tahun ini.

Rakjat pekerdja memang selamanya siap untuk berkorban tapi djanganlah hendaknja hal ini disalahgunakan untuk keuntungan kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah. Yang dimaksudkan Dekon tentang pengorbanan ialah bekerja keras untuk menaikkan produksi. Kesanggupan ini sudah dinjatakan dengan tegas didalam Pantja Program Front Nasional, dimana kaum buruh memegang peranan yang aktif, jaitu : „Me-

nanggulangi kesulitan² ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi". Sedangkan Pantja Program Front Nasional telah ditetapkan sebagai bagian integral pula daripada Dekon (lihat Dekon fasal 34).

Ini adalah kesanggupan berkorban yang bersifat menentukan, dan jika dipimpin dengan baik dapat membuka kemungkinan bagi negeri kita untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang meradjalela. Maka dari itu, lebih² diperlukan tindakan² dari Pemerintah yang „memperhatikan kepentingan Rakjat“, agar dengan demikian mendapat kepertajaan Rakjat. Kepertajaan Rakjat akan lenjap, jika Pemerintah mengadakan tindakan² yang justru tidak memperhatikan atau mengabaikan kepentingan² mereka, yang justru bertentangan dengan Dekon.

II. PENGIKUTSERTAAN KAUM BURUH DALAM PENGURUSAN EKONOMI

Hal yang kedua yang saya sebutkan diatas yang harus dijadikan pegangan dalam melaksanakan Dekon dalam hubungannya dengan kaum buruh, ialah mengenai pengikutsertaan kaum buruh dalam mengawasi management atau pengurusan perusahaan. Hal ini ditegaskan didalam Dekon (fasal 34), dimana dikatakan supaya „diadakan penegasan tentang tugas² Dewan Perusahaan sebagai alat social support dan social control“. Ini dikembangkan lebih lanjut didalam Resolusi MPRS No. I, 1963 dimana dikatakan sbb.: „Hak dan tugas Dewan² tersebut harus kongkrit, jaitu memusyawarahkan djatah-produksi, rehabilitasi alat² produksi, masalah² bahan baku/penolong serta spare-parts, ongkos produksi, penegakan maupun retooling organisasi, personalia dan mental, pentjegahan salah-urus/pentjolengan/manipulasi, dan lain² untuk management yang baik dan peningkatan produksi“. (fasal 8, ayat 5).

Hal ini merupakan hal yang menentukan dalam mengatasi kesulitan² dewasa ini dan dalam mentjapai kelanjutan dalam usaha² pembangunan. Didalam Resolusinya yang telah beberapa kali saya kutip disini, MPRS meninjau sebab² dari ketidak-lanjutan pelaksanaan projek-projek pembangunan dan dengan tepat menundukkan bahwa salahsatu sebab ialah: „Belum tjukupnja dilakukan usaha² memperhebat pengerahan segenap po-

tensi nasional (funds and forces), terutama kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani, dan potensi daerah sehingga terdjamin social participation, social support dan social control, untuk turut mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan“. (Resolusi MPRS No. 1, 1963, fasal 4, ayat 3h).

Tentu Sdr.² akan setuju bahwa penetapan² ini mempunyai arti yang penting terutama bagi mereka yang berkdja dibidang perburuhan. Kesulitan² dalam membentuk Dewan² Perusahaan yang, seperti pernah dikatakan oleh Bung Karno, berdjalan seperti keong, serta dalam memberikan kepadanya wewenang yang sesuai harus segera diatasi agar supaya Dekon dan Resolusi MPRS bisa dilaksanakan.

DEKON DAN RESOLUSI MPRS No. I/1963

Apa yang baru saja kutip ini, disamping mempunyai arti penting dalam rangka pembahasan tema yang menjadi pokok pembijtaraan dalam tjeramah sekarang ini, juga merupakan tjontoh yang baik tentang hubungan erat antara Dekon dan Resolusi MPRS No. I, 1963 itu. Kedua dokumen itu memang saling melengkapi. Resolusi MPRS itu harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Dekon. Resolusi MPRS itu menjuarakan kehendak Rakjat. Hanja jika suara itu didengar dan dilaksanakan, bisa dikatakan bahwa yang menjadi tuanrumah dinegeri kita ialah Rakjat dan bukan elemen² yang samasekali tidak memahami kehendak Rakjat, yang samasekali menutup telinganya terhadap Amanat Penderitaan Rakjat.

Dekon dan Resolusi MPRS memberi gambaran yang sungguh jelas mengenai tjara memobilisasi kaum buruh dalam mendjamin management yang baik. Ini juga merupakan kongkritisasi dari apa yang dikatakan didalam Dekon mengenai „pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi“. (fasal 34), termasuk pengintegrasian kaum buruh yang terorganisasi didalam proses produksi dan management.

Dalam hubungan ini, saya ingin menjebut satu gejala yang kita hadapi sekarang dalam dunia perburuhan yang kiranya perlu mendapat perhatian setjukupnja terutama dari Sdr.² yang bertugas dibidang perburuhan.

SERIKATBURUH DAN „SERIKAT MADJIKAN“

Tak usah kiranja saja tekankan kepada Sdr.² betapa sedjak saat² permulaan gerakan kemerdekaan nasional kita, jaitu pada awal abad ini, kaum buruh melalui organisasi² mereka jaitu serikatburuh² telah memegang peranan aktif dalam melawan kolonialisme Belanda, kemudian dalam melawan pendudukan Djepang, dan kemudian dalam melawan agresi² Belanda dan membela Republik. Kisah kepahlawanan pengambilalihan perusahaan² Belanda pada akhir tahun 1957 dan permulaan tahun 1958 djuga ditulis oleh kaum buruh yang terorganisasi ber-sama² dengan Rakjat pekerdja umumnya. Dan pengambilalihan itu dengan sekaligus menumpas kekuasaan Belanda atas ekonomi kita serta memberi dasar bagi penegakan ekonomi nasional. Sedjarah memang membuktikan bahwa kaum buruh benar² merupakan soko-guru Revolusi Indonesia seperti dinjatakan didalam Manipol. Sumbangan kaum buruh sungguh besar sekali dalam menjediakan dasar² bagi pelaksanaan strategi dasar ekonomi seperti yang ditetapkan dalam Dekon, jaitu membangun susunan ekonomi yang nasional dan demokratis, yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Tetapi dalam alam Manipol dan Dekon, dimana disamping melandjutkan tradisi² anti-imperialisme yang heroik, kaum buruh djuga sanggup memberi sumbangannya untuk lebih memperkuat ekonomi nasional kita dengan peningkatan produksi, kita sekarang menghadapi usaha² kaum reaksioner untuk menjdiakan gerakan buruh kita. Kalangan² tertentu mau menjingkiikan perkataan buruh yang berdjalin erat dan tak terpisahkan dengan tradisi² yang paling militant dalam gerakan kemerdekaan nasional kita. Perkataan itu mau diganti dengan karyawan yang sengadja membikin samasekali kabur garis pemisah antara peranan buruh dan peranan management. Lebih dari itu, dengan perkataan karyawan, dengan apa yang dinamakan persatuan karyawan atau organisasi² karyawan, kalangan² itu ternjata berusaha untuk mematahkan serikatburuh yang merupakan bentuk organisasi militant dari kaum buruh. Mereka berusaha mengobrak-abrik serikatburuh dengan mengintimidasi kaum buruh supaya meninggalkan serikatburuhnya dan memasuki organisasi karyawan. Dengan

demikian mereka lebih mendiskreditkan istilah „karyawan“ dimata Rakjat.

Gedjala ini telah menimbulkan reaksi jang keras dari kaum buruh sendiri jang telah memberi nama „serikat² madjikan“ kepada bentuk² organisasi² karyawan sematjam itu. „Serikat² madjikan“ adalah gedjala jang paling dikutuk dan paling dibentji oleh kaum buruh dinegeri manapun, sehingga penamaan itu memang sepatutnja mendapat perhatian dari siapa sadja jang bertugas dibidang perburuhan. „Serikat madjikan“ adalah pendjelmaan baru dari „Sarekat Hedjo“ dizaman kolonial dulu.

Pada pokoknja, serikat² madjikan mempunyai dua maksud, jaitu pertama menutupi penghisapan terhadap kaum buruh, dan kedua, mematahkan serikat² buruh militant jang tugas pokoknja ialah memperkuat kemerdekaan nasional, membela kepentingan kaum buruh dan melawan penghisapan.

PERUSAHAAN NEGARA DAN PENGHISAPAN

Didalam ekonomi kita sekarang, sudah banjak terdapat perusahaan² negara diberbagai bidang, dibidang produksi, pengangkutan, perbankan, perdagangan dsb. Apakah dengan adanya perusahaan² negara, maka dengan sendirinja bisa disimpulkan bahwa disitu sudah tidak terdjadi penghisapan lagi terhadap kaum buruh? Saja kira tidak demikian. Pada saat ini, nilai lebih jang dihasilkan oleh kaum buruh di-perusahaan² negara pada prinsipnja menjadi milik negara sedangkan kaum buruh sendiri, atau Rakjat pekerdja pada umumnya belum mempunyai kedudukan jang bisa menentukan penggunaan daripada nilai lebih itu. Lebih², kalau kita menghadapi gedjala dimana dalam kenjataan nilai lebih itu malahan tidak menjadi milik negara melainkan masuk kantong kaum kapitalis birokrat, maka tentunja kaum buruh tidak akan merasa bahwa mereka tidak dihisap lagi.

TJARA KERDJA KAUM BURUH

Djika saja menjelaskan hal ini, bukanlah maksud saja untuk mengatakan bahwa kaum buruh jang bekerja di-perusahaan² negara akan menghadapi management atau pimpinan perusahaan dengan tjara jang sama

seperti mereka menghadapi madjikan didalam perusahaan kapitalis yang dimiliki oleh swasta, terutama oleh modal monopoli asing. Kaum buruh Indonesia sepenuhnya didjivai oleh Manipol dan Dekon dan mereka menuntut segenap usaha dan tenaga kepada tugas memperkuat kemerdekaan nasional dengan ikut membangun ekonomi nasional dan demokratis. Sjarat mutlak dalam membangun ekonomi yang demikian ialah bahwa sektor negara harus memegang peranan yang memimpin. Perjuangan untuk memperkuat ekonomi sektor negara yang berkedudukan memimpin adalah perjuangan patriotik. Sesuai dengan pokok pendirian ini, maka perjuangan kaum buruh di-perusahaan² negara, disamping membela kepentingan² kaum buruh sendiri dalam arti seluas-luasnya, harus ditudjukan untuk memperkuat ekonomi sektor negara, yang berarti memperkuat Republik Indonesia yang ber-Manipol.

Ini berarti bahwa tugas² kaum buruh, disamping membela kepentingan² mereka sendiri ialah : *pertama*, berusaha melalui Dewan² Perusahaan supaya perusahaan² negara dijalankan dengan baik; *kedua*, menentang penjolengan kekajaan negara oleh kaum kapitalis birokrat; dan *ketiga*, berusaha melalui lembaga² negara supaya kekajaan materiil yang mereka hasilkan benar² menjadi modal yang diakumulasi oleh negara dan dipergunakan untuk membangun ekonomi nasional dan demokratis, dipergunakan untuk mengikis habis sisa² imperialis dan feodal. Dekon mengharuskan perjuangan demikian. Selama perjuangan ini belum berhasil sepenuhnya, maka selama itu nilai-lebih yang dihasilkan oleh kaum buruh dipergunakan dengan tjara² yang tidak sesuai dengan kepentingan kaum buruh dan Rakjat pada umumnya, atau malahan dengan tjara² yang bertentangan dengan kepentingan²nya. Dan ini adalah penghisapan dan penghisapan oleh musuh² revolusi.

PERATURAN² 26 MEI LANGKAH MUNDUR

Dalam hubungan ini, perlu saja tegaskan bahwa Perpres No. 7, 1963 tentang PDN² yang termasuk dalam 14 peraturan tanggal 26 Mei, 1963 merupakan satu langkah mundur bagi ekonomi sektor negara. Wewenang terlalu luas diberikan kepada PDN² dan boleh dikatakan perusahaan² itu sudah berada diluar pengawasan

an Pemerintah apalagi DPR-GR. Tugas mereka dalam ikut memimpin ekonomi sesuai dengan kebidaksanaan negara dan sesuai dengan perentjanaan yang berpusat boleh dikatakan samasekali ditjairkan. Malahan djika kita mempelajari Perpres No. 7 itu, tak bisa lain kita memperoleh kesan yang mendalam bahwa perusahaan² diserahkan kepada managers-nya untuk diurus sesuka hati. Mereka diberi kemungkinan, malahan disuruh, bersaing mati²an diantara mereka sendiri sehingga dapat dibayangkan betapa akan terdjadi rebutan pasaran seperti dalam alam "free-fight liberalism" yang terkutuk itu. Ini akan menambahkan kesulitan² bagi Rakjat sebagai konsumen.

Melihat kenyataan² ini semua disamping penghapusan pengendalian harga, siapa akan pertjaja pada penjelasan Pemerintah yang diberikan dalam konferensi pers tanggal 5 Djuni jbl. bahwa peraturan² itu tidak berarti liberalisme. Siapa yang tidak akan heran melihat usaha itu untuk mejakinkan kepada kita bahwa langkah² itu „memperkembangkan Sosialisme“. Sosialisme yang nota bene belum ada, karena memang tugas kita belum untuk membangun Sosialisme.

„EKONOMI PDN“

Wewenang terlalu luas yang diberikan kepada PDN² menimbulkan perasaan tjemas dikalangan kaum buruh. Bukankah kaum buruh itu sendiri yang mengambilalih perusahaan² tersebut dan, dalam semangat patriotisme yang sangat tinggi, menjerahkannya tanpa ragu² kepada Pemerintah untuk diurus oleh Pemerintah guna kepentingan seluruh Rakjat? Liberalisme yang sedang dijalankan disektor ekonomi negara benar² menjakiti hati kaum buruh yang melihat tindakan ini sebagai pelanggaran yang kasar terhadap strategi dasar ekonomi seperti yang ditetapkan didalam Dekon. Djika ini diteruskan tidak bisa diartikan lain ketjuali menghadihkan milik nasional kepada segenggam kapitalis birokrat, kaum penjoleng dan tukang tjatut. Dengan demikian, unsur E (Ekonomi Terpimpin) dalam USDEK menjadi bujar samasekali.

Tetapi tidak hanya kaum buruh yang tjemas melihat perkembangan² itu. Perasaan itu ternyata djuga meliputi semua pihak yang bekerdja di-sektor² lain terutama sek-

tor produksi, termasuk pula perusahaan² negara disektor produksi, pengangkutan dsb. Sudah timbul perasaan setjara luas bahwa Dekon disalahgunakan untuk menganakmas-kan PDN² dan meng-anaktiri-kan sektor² lain.

Peraturan yang saja sebut diatas berarti bahwa PDN² mendapat kedudukan istimewa, baik karena mereka akan bisa setjara diam² mengumpulkan keuntungan² yang berlimpah², maupun karena mereka djustru berkepentingan untuk mempertahankan dan terus-menerus memupuk anarki pasar dan spekulasi. Dekon yang benar² produksi-sentris „dilaksanakan“ dengan peraturan yang seratus persen dagang-sentris. Tidak heran bahwa sudah banyak orang suka menamakan ekonomi kita bukan lagi „ekonomi terpinpin“ melainkan „ekonomi PDN“.

Sedjak detik pertama perusahaan² bekas Belanda diserahkan kepada Pemerintah, kaum buruh telah menjatakan perlawanannya terhadap setiap usaha untuk men-swastakan perusahaan itu. Gejala yang selalu disinjalir itu ternjata telah mulai mendapat wujud kongkrit dalam Perpres No. 7, 1963.

RITULING DAN KOMPETISI PRESTASI

Tidak dapat dibenarkan kalau dikatakan bahwa pengurusan oleh negara menimbulkan kelemahan² birokrasi dan administrasi yang berlebihan. Kesalahannya tidak terletak kepada peranan negara melainkan pada orang² yang ditugaskan untuk menjelenggarakan peranan negara itu. Disinilah letak pentingnya tuntutan² luas supaya segera diadakan retuling yang terutama menjadi tuntutan kaum buruh sendiri. Tuntutan itu sepenuhnya dibenarkan didalam Dekon, fasal 34. Malahan djalan keluar sudah ditunjukkan oleh Dekon fasal 30 yang antara lain menjatakan: „Untuk efisiensi dan peningkatan produksi selanjutnya perlu diadakan sistim kompetisi prestasi antara perusahaan² (dagang) Negara, antara bagian² dalam perusahaan dan antara para pekerdja, dalam suatu rentjana produksi“. Kompetisi prestasi yang diadakan untuk membangun ekonomi nasional yang progresif samasekali tidak boleh disamakan dengan "free fight competition" atau "free fight liberalism" alias persaingan bebas. Kompetisi prestasi yang dimaksudkan oleh Dekon ialah kompetisi yang berwatak patriotik untuk meningkatkan produksi dan untuk mengabdikan ke-

pentingan tanahair dan Rakjat. Djadi tidak ada hubungannya dengan "free fight competition" atau "free fight liberalism" yang bertudjuan mengedjar keuntungan perseorangan yang merupakan tjiri pokok atau hukum ekonomi pokok daripada ekonomi kapitalis. Ekonomi PDN² sekarang ini djauh lebih dekat kepada "free fight liberalism" daripada kepada kompetisi prestasi seperti yang dimuat dalam Dekon.

Dulu, perusahaan² milik modal Belanda berdjalan „baik“ dalam arti tidak ada salah-urus, pemborosan dan inefficiency sehingga menghasilkan keuntungan yang berlimpah² bagi kaum kapitalis Belanda. Ini adalah oleh karena mereka yang diserahi tugas untuk menjalankan perusahaan² itu (para managers-nya) memang membela kepentingan² pemiliknya, yaitu kaum monopolis Belanda. dan pada umumnya mengabdikan diri kepada kaum monopolis itu. Kalau sekarang, perusahaan² negara diing-gapi oleh salah-urus, pemborosan yang luarbiasa dan inefficiency, ini adalah oleh karena terlalu banyak orang yang memegang pimpinan disitu bukannya membela dan mengabdikan kepada kepentingan² pemiliknya, yaitu negara, melainkan membela dan mengabdikan kepada kepentingan² mereka sendiri sehingga mereka sendiri menjadi kapitalis² birokrat yang kekajaannya berlimpah² sedangkan negara dan Rakjat tinggal menanggung segala kerugianja.

SALUT KEPADA ORANG² PDN YANG BAIK

Saja tidak bermaksud samasekali memberi kesan akan² semua orang yang bekerdja atau memimpin di perusahaan² negara berbuat yang demikian. Saja tahu bahwa ada diantara mereka yang memang didjwai oleh semangat patriotisme, dan saja yakin bahwa mereka sendiri akan paling keras mengutuk „kolega²“ mereka yang sangat merugikan kepentingan² kita bersama itu. Malahan mungkin mereka itu paling tahu tentang kebobrokan „kolega²“ mereka itu. Saja menjampaikan salut kepada orang² itu. Yang saja kutuk bukan mereka tetapi sistim „Ekonomi PDN“ yang liberal dan menjoba menggantikan sistim „Ekonomi Terpinpin“. Yang saja kutuk ialah konseptor² „Ekonomi PDN“ dan kaum kapitalis birokrat serta pentjoleng² dan tukang tjatut² yang menjadi pelaksana.

Dengan dilantjarkannya serangan terhadap susunan ekonomi yang mau kita bangun dalam tahap nasional dan demokratis ini, melalui liberalisasi disektor ekonomi negara, maka menjadilah tugas bersama dari para pegawai didalam aparatatur Pemerintah dan disektor ekonomi negara pada umumnya, termasuk para pemimpin perusahaan² negara yang patriotik, ber-sama² dengan kaum buruh, untuk melawan kaum kapitalis birokrat, menuntut retuling yang sungguh² dan melawan usaha² untuk meliberalisasi atau men-semi-swastakan sektor negara itu.

III. SELAMATKAN DEKON DAN LAKSANA- KAN SETJARA KONSEKWEN!

Dalam tjeramah ini saja telah banjak mentjurahkan perhatian kepada soal² yang timbul sedjak diumumkan-nya Dekon, terutama langkah² yang diambil yang dengan jelas sekali melanggar Dekon.

Dalam bagian terahir ini, saja ingin setjara singkat menguraikan pokok² daripada Dekon terutama untuk menundukkan apa yang menjadi sjarat² mutlak bagi pelaksanaannya setjara konsekwen. Saja kira saja mempunyai otoritet untuk berbitjara tentang ini, karena sebagai anggota MPN saja ikut aktif menjusun Dekon.

Dekon terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menentukan strategi dasar ekonomi Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia seperti ditetapkan didalam Manipol. Strategi dasar ekonomi Indonesia menetapkan bahwa kita sekarang berada didalam tahap pertama daripada revolusi kita, dimana kita harus mentjiptakan *„susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme“*. Djuga ditetapkan bahwa tahap pertama ini *„adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia“* (Dekon, fasal 3).

Strategi dasar ekonomi ini mempunyai dua konsekwen- si yang amat penting, yaitu pertama, bahwa tugas kita dalam tahap pertama memang bukan untuk membangun Sosialisme, dan kedua, bahwa oleh karena perspektif daripada Revolusi kita adalah Sosialisme, maka tidak

boleh terdjadi hal² dalam tahap pertama yang berlawan- an dengan perspektif itu.

Djadi, yang harus kita bangun, sekarang ialah ekonomi progresif, bukan ekonomi reaksioner; ekonomi progresif yang perspektifnya adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme.

Bagian kedua daripada Dekon ialah mengenai kebi- djaksanaan jangka pendek. Bagian ini pada pokoknya menentukan bahwa harus dilakukan usaha² dalam waktu singkat untuk menjukupi sandang-pangan, terutama pangan, serta merehabilitasi sektor industri, pengang- kutan, pertanian dan lain² sektor produktif dengan memberi tekanan khusus pada persediaan bahan² baku/ penolong dan spare-parts. Kebidjaksanaan jangka pendek djuga menetapkan berbagai hal yang penting sekali dalam hubungan dengan politik perpajakan, po- litik fiskal, pembiajaan, penjempurnaan pengurusan per- usahaan² negara, ekspor-impor, transport dan komuni- kasi, dsb.

Kebidjaksanaan jangka pendek tidak bisa dipisahkan dari strategi dasar ekonomi, atau dengan kata lain, ke- dua bagian ini merupakan satu kesatuan. Ini berarti baha- wa strategi dasar dilaksanakan melalui kebidjaksanaan jangka pendek dan bahwa kebidjaksanaan jangka pendek harus dilaksanakan dengan tjara² yang sepenuh- nya sesuai dengan strategi dasar itu yang berpokok pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Prinsip² pokok dalam melaksanakan strategi dasar serta kebidjaksanaan jangka pendek ialah dengan menggerakkan segenap kekuatan dan potensi Rakjat, dengan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, dengan membangun ekonomi yang tegak berdiri diatas dua kaki sendiri.

Bagian ketiga daripada Dekon adalah bagian menge- nai sjarat² pelaksanaannya. Disitu ditetapkan bahwa *„agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi, dalam bidang adminis- tratif maupun eksekutif, dipusat maupun di-daerah², be- gitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah² Daerah dengan badan² legislatif“*. Bagian ini djuga menegaskan perlu di-intensifkan *„retuling disegala bi- dang dan dari Pusat sampai ke Daerah²“*. (Dekon, fa-

sal 34) yang harus dilakukan dibawah pimpinan Presiden sendiri.

Kalau strategi dasar telah ditetapkan, kalau kebidjaksanaan jangka pendek telah digariskan, maka soal yang pokok yang harus diselesaikan ialah untuk mentjiptakan sjarat² pelaksanaannya, dan kuntji daripada sjarat² itu, seperti digambarkan dalam fasal 34 dari Dekon ialah mentjiptakan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM dibidang administratif dan eksekutif dipusat maupun di-daerah². Pada saat ini Rakjat pekerdja negeri kita, termasuk kaum buruhnja, termasuk kaum taninja, termasuk para pegawainja, termasuk semua lapisan Rakjat, menghadapi hal² yang pahit sekali dalam hubungan dengan apa yang dinamakan „pelaksanaan Dekon“. Oleh karena itu, lebih² dari sebelumnya, kebutuhan untuk mentjiptakan sjarat² pelaksanaannya sudah menjadi sangat mendesak. Kegandjilan dalam „pelaksanaan Dekon“ ini dimungkinkan karena alat eksekutif dipusat belum disesuaikan dengan prinsip kegotongrojongan berporoskan Nasakom, sehingga tidak semua pertimbangan tertjakup didalamnya.

Demikianlah pokok² yang ingin saja sampaikan kepada Sdr.² mengenai hubungan kaum buruh dengan Dekon. Djelaslah dari uraian diatas, bahwa kaum buruh bukan hanya menjambut Dekon dengan hangat, tetapi juga membelanja dengan gigih dan menuntut pelaksanaannya yang konsekwen.

Mudah²an tjeramah ini akan berguna dalam memperkuat kerdjasama diantara Sdr.² sendiri dan para pegawai pada umumnya dengan kaum buruh dan dengan demikian ikut memperkuat kegotongrojongan nasional dari semua lapisan Rakjat dinegeri kita.

(Tjeramah di depan para pejabat dan pegawai Departemen Perburuhan pada tanggal 17 Djuni 1963)

LAMPIRAN

- Pernyataan Politbiro CC PKI

- Deklarasi Ekonomi

Pernyataan Politbiro CC PKI :

SELAMATKAN DEKON !

**Bersamaan Dengan Itu Ringkus Dan Ganjang
Kontra-Revolusi !**

Pada saat ini Rakjat Indonesia sedang mentjurahkan perhatian dan kekuatannya untuk melaksanakan instruksi Presiden Sukarno menghanturkan kontra-revolusi yang baru^a ini mengambil bentuk teror rasial, membakar alat^a produksi, pengangkutan, distribusi dll. Bersamaan dengan itu, Rakjat-pun sedang mengambil bagian aktif dalam menanggulangi kesulitan^a ekonomi dengan melaksanakan Deklarasi Ekonomi setjara konsekwen. Dalam suasana yang demikian ini, tiba^a Rakjat dikedjutkan oleh pengumuman Pemerintah pada tanggal 26 Mei 1963 tentang dikeluarkannya 14 Peraturan yang dinjatakan untuk melaksanakan Dekon, dan tentang kenaikan tarif^a listrik, kereta-api, PTT, GIA, serta kenaikan harga barang^a seperti kertas untuk surat kabar, dsb. Semuanya ini dilakukan tanpa setahu DPR atau Musjawarah Pimpinan Negara (MPN) yang menjusun Dekon. ✓

Dari 14 peraturan tersebut 9 diantaranya mengenai soal ekonomi, 4 mengenai soal kepegawaian dan 1 mengenai koordinasi pelaksanaan peraturan^a tersebut. Mengenai kenaikan-kenaikan tarif diumumkan antara lain, bahwa tarif listrik dinaikkan rata^a menjadi 300%, tarif kereta-api menjadi 300%-500%, tarif PTT menjadi 400%, tarif GIA menjadi rata^a 500%. ✓

Yang sangat mencedjutkan dan menimbulkan ketjemasan dikalangan Rakjat ialah bahwa konseptor^a atau perentjana^a daripada peraturan^a ekonomi tersebut „atasnama“ dan „untuk melaksanakan Dekon“ djustru menetapkan ketentuan^a yang setjara langsung memberikan beban berlipatganda beratnja kepada penghidupan Rakjat yang sudah amat sangat beratnja itu. Adalah kewadjaban Rakjat Indonesia dari segala lapisan untuk mempeladjar peraturan^a tersebut dengan teliti dan menjatakan pendapatnja. ✓

Chusus pendapat mengenai kenaikan tarif yang luarbiasa tingginya itu kini telah mulai dinjatakan oleh pemimpin^a partai^a NASAKOM dan organisasi^a massa buruh dan tani yang demokratis. Hanja satu-dua orang Manipolis munafik sadja seperti tokoh^a yang berlagak „sok-sosialis“, umumnja elemen^a Soska dan Masjumi dengan badju baru, yang sudah berani menusuk perasaan Rakjat dengan menjatakan setudju kenaikan tarif dan harga. Kaum Manipolis gadungan ini menjatakan bahwa kaum tani tidak terkena dengan kenaikan^a tarif dan harga dan mendorong Pemerintah supaya tidak ✓

menekan harga, melainkan mengikuti saja harga pasar yang spekulatif dan anarkis sekarang ini yang praktis dikendalikan oleh kaum spekulan. Kaum Manipolis munafik ini pada hakekatnya menjadi djurubitjara daripada tukang tjatut dan kaum kapitalis birokrat yang merupakan kaum penghisap besar dikota dan kaum tuantanah yang merupakan kaum penghisap besar didesa.

Peraturan Ekonomi 26 Mei 1963 Memerosotkan Dajabeli Rakjat

Diantara peraturan ekonomi itu yang pokok adalah peraturan mengenai ekspor dan impor, penetapan harga resmi, distribusi bahan pokok, dan mengenai PDN. Yang mengenai kepegawaian mengatur soal kenaikan tundjangan kemahalan umum dengan 100% dan pensiun dengan 50%.

Dengan peraturan impor-ekspor dan harga itu dapat diperhitungkan setjara pasti bahwa harga barang sandang-pangan pada umumnya rata akan meningkat paling sedikit dengan 300%. Dengan demikian, walaupun diadakan kenaikan tundjangan kemahalan umum pegawai dengan 100% atau bersihnya dengan kurang dari 100% karena ada tundjangan lain yang tidak dinaikkan, namun akan terjadi kemerosotan dajabeli upah disekitar 50% daripada keadaan sebelum adanya peraturan ekonomi baru itu. Oleh karena itu, akan dibuktikan dalam praktek bahwa peraturan ekonomi tersebut, yang dinjatakan oleh konseptornya „untuk melaksanakan Dekon“, bertentangan samasekali dengan Dekon fasal 26 yang menjatakan „tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan“. Peraturan ekonomi tersebut bukan saja bertentangan dengan Dekon tetapi juga dengan Pantja Program Front Nasional dan dengan Resolusi MPRS No. I/1963 yang baru ini disahkan oleh Sidang Umum II MPRS dan telah disambut hangat oleh segenap golongan Rakjat, yang antara lain menjatakan bahwa: „Politik harga harus ditundjukkan untuk mentjegah kenaikan harga dan tarif menadju terlaksananya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1966 lampiran B Bab V ayat 5, yang harus dilaksanakan setjara berantjana berdasarkan pada tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan dajabeli Rakjat pekerdja termasuk petani-produkser“. (Resolusi MPRS fasal 9, ayat 7)

Sekedar untuk mendjelaskan kesimpulan tersebut diatas mengenai peraturan ekonomi dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Perpres No. 5 tahun 1963 yang mengatur soal ekspor, maka exportir akan mendapat keuntungan rupiah dan devisa (matauang asing seperti dolar Amerika Serikat misalnja) yang lebih besar daripada waktu masih berlakunya peraturan SIVA. Untuk tiap dolar dari hasil ekspornja, seorang exportir akan menerima kuranglebih Rp. 600,— (jaitu 95% dari Rp. 270,— plus Rp. 45,—) ditambah dengan

nak retensi 5% daripada hasil devisa yang dapat dipergunakan „sebebas-bebasnja“, serta hak menggunakan 10% dari hasil devisa itu untuk mengimpor barang. Dengan demikian exportir dapat memperoleh kl. Rp. 450,— atau lebih untuk setiap dolar, maka peraturan itu berarti devaluasi rupiah terhadap matauang asing sebesar kuranglebih 1000% (Rp. 450,— adalah 1000% daripada koers dasar Rp. 45,—). Dengan peraturan SIVA berdasarkan koers 30 sudah berarti devaluasi rupiah terhadap tiap dolar yang dihasilkan oleh ekspor kuranglebih sebesar 500% dibandingkan dengan koers dasar. Djadi, walaupun Dekon menjatakan dalam fasal 31: „tidak akan diambil tindakan moneter yang drastis, seperti umpamanja devaluasi,“ tetapi Perpres No. 5/1963 djustru mendevaluasi rupiah kita sampai 1000% atau dua kali daripada devaluasi berdasarkan peraturan SIVA. Ini adalah suatu tindakan memerosotkan nilai rupiah yang paling besar semendjak tahun 1950.

II.

Dengan Perpres No. 6/1963 mengenai impor, yang menentukan pungutan atas impor berupa Hasil Perdagangan Negara (HPN), dan HPN-tambahan, ditambah lagi dengan tarif bea masuk baru yang lebih besar, maka barang essensial, jaitu barang pokok kebutuhan dalam negeri seperti tekstil, obat,an, kertas koran, benang tenun, buku, pelajaran dsb. akan mengalami kenaikan harga luarbiasa. Barang essensial yang masuk Golongan I, meskipun hanya dikenakan HPN Rp. 270,—, disamping koers dasar Rp. 45,— dan bebas dari HPN-tambahan serta bea masuk, akan mengalami kenaikan harga kl. 35%, sedangkan beras dan pupuk yang dulu sama sekali dibebaskan dari pungutan komponen harga akan mengalami kenaikan harga sebesar 700% jika dibandingkan dengan sebelum adanya peraturan baru.

Diantara barang impor Golongan II yang djuga meliputi barang essensial dan yang dulu masuk dalam Golongan I, akan ada barang yang mengalami kenaikan tak kurang dari 900%, misalnja sadja, susu baji, sedangkan barang baku/penolong penting yang dulu masuk dalam Golongan II akan meningkat dengan kuranglebih 300%. Sebaliknja barang yang dulu diimpor berdasarkan SIVA (barang mewah) dan yang sekarang masuk Golongan II tidak akan mengalami kenaikan harga, dan barang mewah yang sekarang masuk Golongan III hanya akan mengalami kenaikan kuranglebih 60%. Pembatasan terhadap impor barang mewah tidak ada, ketjuali mengenai 10% hasil devisa yang boleh digunakan oleh exportir hanya untuk mengimpor barang Golongan I dan II.

Kenaikan harga yang demikian itu dihitung berdasarkan kenaikan pungutan impor, dan belum memperhitungkan kenaikan yang disebabkan liberalisasi politik harga. Misalnja sadja, harga kertas koran telah dinaikkan 700% (dari Rp. 7,— per Kg. menjadi Rp. 50,—), walaupun perhitungan kenaikan berdasarkan pungutan impor bisa kurang daripada itu. Barang baku dan penolong untuk produksi dalam negeri

dengan harga yang sedemikian tingginya akan menyebabkan ongkos produksi makin meningkat, yang semuanya harus dipikul akibatnya oleh Rakjat. Bagi kaum pengusaha nasional yang terbatas modal kerjanya akan menjadi lebih merosot kemampuannya untuk meningkatkan kapasitas kerja perusahaannya sehingga pengangguran sudah tentu akan menjadi lebih luas. *Semua kenaikan biaya impor yang dibayar oleh importir pada akhirnya harus dipikul oleh Rakjat sebagai konsumen, karena harus membeli harga barang dengan harga yang lebih tinggi.*

III

Peraturan Pemerintah 20/1963 tentang kebidaksanaan di bidang harga pada pokoknya menetapkan agar harga resmi selalu mendekati dan mengikuti harga pasar bebas setempat dengan tidak boleh berbeda lebih besar daripada 30% dengan harga itu. Perbedaan harga resmi sekarang dengan harga pasar bebas mengenai barang sandangpangan bergerak antara 300% sampai 500%.

Djadi menurut peraturan baru ini harga resmi harus dinaikkan dengan rata-rata lebih dari 300%. Harga tekstil kasar yang resminya sekarang Rp. 60,— per meter harus dinaikkan menjadi Rp. 210,— per meter karena dipasar bebas harganya Rp. 300,—. Kalau kaum spekulasi menaikkan harga pasar bebas, maka harga resmi Pemerintah akan segera mengedjarkannya, untuk memelihara perbedaan 30%. Ini adalah politik harga yang sangat liberal, yang samasekali tidak mengandung unsur pengendalian harga oleh Pemerintah dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan politik harga yang ditetapkan dalam Resolusi MPRS No. I/1963 sbb.: „Politik harga harus ditundukkan untuk menjegah kenaikan harga dan tarif. . . . yang harus dilaksanakan setjara berentjana berdasarkan tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan daya-beli Rakjat pekerdja termasuk petani produsen”.

IV

Perpres No. 10/1963 menetapkan antara lain pembagian beras untuk pegawai negeri setiap jiwa 8 Kg. sebulan. Tetapi peraturan ini juga menetapkan bahwa Pemerintah akan membagikan pengganti berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas dengan harga beras menurut harga distribusi Pemerintah, apabila Pemerintah ternyata tidak mampu memberikan distribusi beras. Kalau sudah ada bajangan demikian, bagaimana nasib Dekon yang menandakan perlunya ada „iron stock beras” untuk mendjamin keperluan hidup dan menjegah kenaikan harga beras?

V

Perpres No. 7/1963 mengenai aktivitas PDN lebih lagi memberikan keleluasaan kepada PDN untuk bekerja tanpa pengawasan. Selama ini PDN telah banyak memboroskan dan merugikan keuangan negara. Sebabnya ialah karena

Badan Pemeriksa Keuangan, yang berwenang untuk memeriksa keuangan PDN dan PN, berhubungan dengan kekurangan syarat yang diperlukan oleh Badan tersebut, belum dapat melaksanakan tugasnya setjara efektif. Disamping itu, karena putusan DPRGR yang menghendaki disampaiannya Laporan Tahunan dari masing-masing PDN dan PN kepada DPRGR belum dilaksanakan. Djika Perpres No. 7/1963 ini dipadukan dengan peraturan mengenai kebidaksanaan harga, maka syarat ekonomi perusahaan yang lazim untuk melaksanakan efisiensi dalam management guna menjegah kerugian dan mendapatkan keuntungan bagi PDN dan PN menjadi dihapuskan samasekali. Dengan kekuasaan yang ada pada BPU-PDN dan wewenang yang luas yang diberikan kepada pemimpin PDN, mereka hanya menempuh jalan yang paling mudah saja untuk menambah penghasilan PDN dengan menaikkan harga barang dan mengikuti harga pasar bebas. Kredit yang telah diperolehnya dari Pemerintah sebagai pinjaman sebagai modal perusahaan dan kewajiban menjetor kepada Dana Pembangunan Pemerintah dapat sewaktu-waktu dibebaskan. Ini samasekali berlawanan dengan garis agar PDN betul-betul memegang peranan sebagai ekonomi sektor negara yang memegang posisi komando dalam melantarkan peredaran barang dan mengendalikan harga. Dengan ini sudah lebih sulit diharap PDN dan PN akan memberi iuran yang besar kepada negara. Ini semua bertentangan pula dengan Dekon yang menyatakan: „perusahaan negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selanjutnya”.

Tindakan Moneter Konvensional Terulang Lagi

Dari uraian di atas jelas bahwa konseptor atau arsitek daripada peraturan ekonomi tersebut merupakan sumber bahaya bagi pelaksanaan Dekon. Peraturan ekonomi itu makin memperbesar penderitaan Rakjat karena ongkos hidup makin meningkat sedangkan nilai penghasilan riil Rakjat pekerdja sangat merosot. Tindakan ekonomi yang akan dilakukan dengan peraturan negara tersebut pada hakekatnya adalah „tindakan moneter konvensional” yang justru ditolak oleh Dekon dalam pasal 13.

Pada exportir diberikan perangsang besar. Tetapi apakah produsen yang bukan exportir yang banyak jumlahnya itu juga mendapat perangsang? Ini tandatannya besar. Yang sudah terang, kaum buruh, pegawai, anggota Angkatan Bersendjata, pendeknya semua yang hidup dari upah dan gaji, dibunuh semangat kerjanya, jadi samasekali tidak dirangsang untuk bekerja keras, dengan adanya kenaikan harga yang keterlaluan.

Soal lain, pasti akan timbul kontradiksi baru antara produsen dan pedagang ekspor serta makelarnya dimana produsen, karena juga menderita akibat kenaikan harga, akan menetapkan ongkos produksi yang lebih tinggi. Dengan begitu akan timbul disparitet baru antara harga dalam negeri dengan harga luar negeri yang akan menyebabkan penghalang bagi perkembangan ekspor. Tanda kenaikan harga karet

dalam negeri sekarang sudah nampak kearah itu, sedangkan harga karet diluar negeri masih tetap menghadapi bahaya kemerosotan sebagai akibat krisis ekonomi yang masih menimpa dunia kapitalis. ✓

Selanjutnya tindakan moneter konvensional yang bertentangan dengan Dekon ini digunakan juga untuk mengadakan keseimbangan anggaran belanda negara atau setidaknya tidaknya memperketat jumlah defisit dengan jalan yang sangat memberatkan Rakjat. Jika kemampuan mengimpor dengan hasil ekspor setahun sama dengan tahun 1962, maka pungutan atas impor saja yang bisa diperoleh dari HPN-tambahan dan bea masuk dapat diperkirakan lebih dari 10 kali daripada anggaran pendapatan 1962 dari sektor perdagangan luar negeri. Diatas kertas nampaknya baik. Tetapi ini semua harus dipikul oleh Rakjat yang sudah demikian berat beban hidupnya, yang akhirnya akan memukul ekonomi negeri atau "perut negara" karena kenaikan harga yang terus-menerus. Apalagi uang Rakjat yang masuk kas negara itupun penggunaannya tidak terjamin berdasarkan satu prinsip prioritas pembangunan yang efektif sebagaimana ditetapkan dalam Memorandum Pimpinan MPRS. ✓

Antusiasme Rakjat dalam pembangunan tak dapat dibandingkan dengan jalan menjerang kepentingan ekonomi Rakjat yang sudah berat, tetapi dengan jalan mentijptakan sjarat materiil yang diperlukan untuk hidup lajak sebagai manusia. ✓

Konseptor peraturan ekonomi tersebut justru menempuh jalan yang dikehendaki oleh kaum imperialis Amerika Serikat dengan apa yang mereka namakan "program stabilisasi ekonomi", yang isinya tidak lain ialah devaluasi, liberalisasi perusahaan negara dan kenaikan harga. Inilah hakekat dan jiwa daripada konseptor peraturan ekonomi 26 Mei 1963. Rakjat yang tinggi kesadaran politiknya tidak mudah ditipu dengan peraturan tersebut sekalipun dengan sembojan "untuk melaksanakan Dekon".

Selamatkan Pelaksanaan Dekon !

Pada waktu ini tidak ada jalan patriotik yang lain bagi Rakjat Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi ketjuali menjelamatkan dan melaksanakan Dekon dengan memperjuangkan hal sbb. :

- 1) Membentuk Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM sekarang juga, sebagai jaminan politik agar Dekon tidak mudah disalahtafsirkan, dan mengadakan rituling disemua bidang khusus dibidang ekonomi-keuangan, terutama sekali rituling personalia, sehingga tidak terdapat lagi konseptor ekonomi yang liberal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi terpimpin berdasarkan Manipol dan Deklarasi Ekonomi.
- 2) Peraturan kenaikan tarif dan kenaikan harga harus ditinjau kembali untuk dibatalkan.
- 3) Distribusi barang pokok dengan harga rendah harus diperlancar dan diratakan dikalangan Rakjat, dan tidak

diganti dengan sistim memberi pengganti dalam bentuk uang.

- 4) Mempertinggi produksi dalam negeri dengan mengadakan pengurusan yang efisien, memberantas salah-urus dan salah-duduk, melaksanakan manajemen terbuka, memperbaiki nasib kaum buruh dan kaum tani sebagai tenaga produktif yang pokok, mengerahkan funds and forces swasta nasional dan domestik dan terutama sekali mengembangkan daya produksi dan daya kerja perusahaan negara agar dapat merealisasi peranannya dalam memegang posisi komando. Harus didjamin persediaan spare parts, barang baku dan penolong.
- 5) Perangsang kepada exportir harus mengandung sjarat bagi peningkatan produksi barang ekspor, perbaikan kwalitet, pengurangan kerugian produsen akibat disparitet, perluasan pasaran ke-negeri the new emerging forces.
- 6) Segera menyelesaikan pembentukan dan mengaktifkan semua Dewan Perusahaan, Dewan Pertimbangan Departemen dan Djawatan, Dewan Kredit Luar negeri, Dewan Ekspor-Import, Dewan Produksi, Dewan Distribusi, Dewan Pengangkutan, dll. sebagai alat social control dan semuanya harus berkomposisi representatif dan menjerminkan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM.
- 7) Pemasukan keuangan negara harus bersandar pada perkembangan kapasitas kerja perusahaan negara dan pengurusan yang efisien.
- 8) Memberantas penjelundupan dalam perdagangan luar negeri, dan memasukkan semua hasil devisa kedalam kas negara, termasuk hasil devisa dari perusahaan minjak asing.
- 9) Transport darat dan laut harus dilancarkan dan mendapat prioritas.
- 10) Harus diadakan import planning yang menjamin kebutuhan pokok dalam negeri untuk melancarkan pembangunan dengan menggunakan persediaan devisa seefektif mungkin. Impor barang mewah harus dihentikan.
- 11) Peraturan ekonomi baru tanggal 26 Mei 1963 supaya ditinjau kembali dan diganti dengan yang sesuai dengan Dekon, sehingga tidak menambah berat beban Rakjat dan tidak lebih merusak ekonomi negeri.
- 12) Melaksanakan Undang Perdandjian Bagi Hasil dan Undang Pokok Agraria dengan lebih sungguh.

Achirnya, dengan ini Politbiro CC PKI menjerukan kepada Rakjat Indonesia untuk lebih mendalami Deklarasi Ekonomi, Perintjan Pantja Program Front Nasional dan Resolusi MPRS No. I/1963. Disamping itu peraturan tanggal 26 Mei 1963 supaya dipeladjar sungguh sehingga dapat diketahui seberapa jauh konseptor peraturan tersebut sudah menjimpang dari Deklarasi Ekonomi, Pantja Program Front Nasional dan Resolusi No. I MPRS tahun 1963 dan sampai dimana peraturan yang mengenai ekonomi, terutama yang

mengenai ekspor-impor, harga dan distribusi akan makin memberatkan beban Rakyat. Semuanya ini ditunjukkan untuk memperoleh pengertian dan kesadaran yang lebih tinggi lagi sehingga dapat ditijptakan kekuatan dan tekad yang lebih bulat guna menjelamatkan Pelaksanaan Dekon.

Njatakanlah perasaan dan fikiran mengenai Peraturan² 26 Mei 1963 !

Perkuat Persatuan Nasional untuk meringkus dan mengganjang kontra-revolusi !

Dengan persatuan nasional yang lebih kuat, selamatkan Dekon !

Politbiro CC PKI

Djakarta, 3 Djuni 1963.

DEKLARASI EKONOMI

Saudara-saudara sekalian,

1. Sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia saja menjadari sedalam-dalamnja, seperti djuga telah saja utarakan dengan kata-kata yang djelas dalam pidato 17 Agustus 1962, tekad bangsa Indonesia untuk menanggulangi setjara keseluruhan dengan kekuatan sebulat-bulatnja persoalan ekonomi nasional kita.

2. Disamping itu, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, untuk keselamatan pertumbuhan Revolusi setjara keseluruhan, saja tidak dapat melepaskan diri daripada hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita.

Hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita menentukan prioritas-prioritas yang mutlak perlu bagi Revolusi kerakjatan dalam abad ke-20.

3. Perlu disadari dan difahami bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia.

Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannja telah menetapkan strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, yang mendjadi bagian mutlak daripada strategi umum Revolusi Indonesia.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus mentijptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa „exploitation de l'homme par l'homme". Dalam masyarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap orang didjamin akan pekerdjaan, sandang-pangan, perumahan serta kehidupan kulturil dan spirituil yang lajak. Susunan ekonomi yang demikian inilah yang harus mendjadi tudjuan segenap kegiatan ekonomi kita, yang harus mendjadi tudjuan tiap-tiap putera Indonesia.

4. Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama Revolusi kita. Kewadajiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini ialah mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan sisa-sisa feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan suatu ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menudju ke masyarakat Sosialis Indonesia.

5. Dalam perdjongan untuk menyelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunya untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik) ✓

dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Negara.

6. Karena itu yang harus diselenggarakan sekarang ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk industrialisasi. Dalam tingkatan sekarang ini harus disadari bahwa modal terpenting bagi pembangunan nasional ialah tenaga dan mengolah kekayaan alam kita itu.

Ini berarti bahwa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan, yang tentunya hanya dapat memberikan hasil sebesar-besarnya jika dikerdjakan atas dasar kegotong-rojongan antara massa rakyat dan Pemerintah, sebagai syarat untuk menimbulkan dan menjalankan daya kerja dan daya kreatif rakyat setinggi maksimal.

7. Untuk mentjapai kegotong-rojongan itu saja peringatan bahwa dimasa lampau *potensi dan kekuatan rakyat merupakan tulang-punggung* dari alat perdjongan dan alat Revolusi Indonesia. Hal ini terbukti umpamanya :

- a. Dalam melaksanakan Revolusi fisik, menghadapi kekuatan dan kekuasaan Belanda, kita menang karena melandaskan perdjongan kita pada potensi dan kekuatan rakyat;
- b. Dalam menghadapi pemberontakan dan subversi-asing yang setjara simultan berlangsung dengan politik konfrontasi terhadap Belanda, kita menang juga karena melandaskan perdjongan kita pada potensi dan kekuatan rakyat;
- c. Dalam menemukan kembali Revolusi kita yang dapat melahirkan Manipol/Usdek sebagai ideologi nasional progresif, kita juga memakai sumber potensi dan kekuatan rakyat sebagai landasan;
- d. Tri-Komando Rakyat, sebagai tingkat terakhir dalam perdjongan merebut Irian Barat, berhasil dengan gemilang juga karena kita melandaskan perdjongan kita pada potensi dan kekuatan rakyat.

8. Perdjongan-perdjongan tadi *menghasilkan kelengkapan* dari alat-alat Revolusi Indonesia yang berupa :

- a. kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,
- b. ideologi nasional progresif Manipol/Usdek,
- c. satu pimpinan Revolusi, Re-So-Pim,
- d. keamanan dan
- e. kekuatan Angkatan Bersendjata yang kokoh, bersatu dan bermutu tinggi.

Alat-alat ini merupakan syarat mutlak bagi kelanjutan Revolusi Indonesia, untuk menjaga kesatuan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar dan bagi segala pembangunan ekonomi selanjutnya.

9. Dalam melaksanakan Revolusi dibidang sosial dan ekonomi selanjutnya, maka — sesuai dengan hukum Revolusi — kita harus mempergunakan sepenuhnya semua alat Revolusi yang sudah kita miliki itu, dengan selalu melandaskan perdjongan kita pada potensi dan kekuatan rakyat.

10. Dalam menghadapi masalah ekonomi, kita sadar bahwa sisa-sisa kolonial dan sisa feodal dan demikian pula sifat-sifat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar masih juga memberikan rintangan dalam pertumbuhan kearah Sosialisme Indonesia. Khususnya blok-blok ekonomi menimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar negara, dan dengan demikian memperkuat dominasi ekonomi dari "the old established forces". Berhubung dengan itu maka Pemerintah berusaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, yang tidak hanya menghambat kelantjaran perdagangan internasional, akan tetapi yang disamping itu terlebih-lebih menekan perkembangan pembangunan ekonomi dinegara-negara yang baru saja memasuki alam kemerdekaan.

11. Dalam melandjutkan pertumbuhan-pertumbuhan dibidang sosial dan ekonomi, maka kita harus bertitik-pangkal pada modal yang sudah kita miliki ialah :

- a. Aktivitas ekonomi Indonesia dewasa ini kurang lebih 80% sudah berada ditangan Bangsa Indonesia. Dalam tahun 1950 boleh dikatakan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagian terbesar masih dikuasai oleh bangsa asing sehingga, baik Pemerintah maupun rakyat, tidak dapat mengadakan perentjanaan setjara pokok bagi pertumbuhan ekonomi setjara revolusioner.
- b. Pada waktu-waktu belakangan ini Pemerintah sudah mulai dapat setjara aktif menjusun aktivitas ekonominya dalam arti konsepsional, organisatoris dan struktural.
- c. Meskipun demikian kita belum dapat berkembang setjara mendalam, oleh karena perhatian Pemerintah dan kekuatan rakyat masih dititik-beratkan kepada penjusunan alat-alat Revolusi, yang baru pada waktu sekarang ini dapat dikatakan lengkap.

Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa baru sekarang kita dapat menggerakkan segala usaha dan perhatian rakyat dan Pemerintah untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara konsepsional, organisatoris dan struktural dalam arti keseluruhan.

Usaha-usaha Pemerintah dan rakyat yang sudah ditempuh setjara konsepsional, organisatoris dan struktural ialah misalnya :

- 1) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama yang sudah disahkan oleh MPRS,
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjandjian Bagi-Hasil,
- 3) peranan Pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional, dan
- 4) penjusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS. Koperasi dsb.

12. Semua ini merupakan modal bagi kita untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara integral. Dengan modal itu maka baru sekaranglah kita dapat menggerakkan segala potensi dan kekuatan rakyat.

Disamping itu perlu diperhatikan sedalam-dalamnya, bahwa kita harus menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman dimasa yang lampau, khususnya pengalaman-pengalaman yang tidak memberikan hasil seperti yang ditjita-tjitakan. Selanjutnya

djuntamente perlu diperhatikan pengalaman-pengalaman dari negara² dan bangsa² lain, yang djuga menempuh djalan pertumbuhan kearah sosialisme setjara revolusioner.

13. Disamping modal positif ini, sebagai akibat dari perdjoaangan untuk menanam setjara teguh alat-alat Revolusi, kita sekarang menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomis yang agak mendesak seperti inflasi, kekurangan devisa yang mengakibatkan pembatasan impor bahan-bahan baku sehingga kegiatan alat-alat produksi menurun. Keadaan yang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah yang berdiri sendiri, lebih-lebih tidak mungkin kita atasinja hanja dengan tindakan moneter konvensional belaka. Sebaliknya, tidak ada djalan mudah yang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuaht atas dasar menggerakkan segenap potensi dan kekuatan rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita.

14. Ini berarti bahwa segala perhatian, segala usaha dan segala aktivitas untuk memetjahkan persoalan ekonomi sekarang ini harus berlandaskan pada kelengkapan konsepsi, organisasi dan struktur setjara integral, dalam rangka kewadjaiban kita menumbuhkan Revolusi yang perspektifnja tidak ada lain jalah Sosialisme Indonesia.

15. Potensi rakjat yang telah saja sebutkan beberapa kali dan yang selalu tumbuh dan meningkat itu antara lain berupa :

- a. kesadaran sosial yang sangat mendalam,
- b. kesadaran akan pentingnja dilaksanakan prinsip-prinsip ekonomi,
- c. penambahan ketrampilan dan keahlian,
- d. keradjaan dan tjinta-kerdja rakjat serta
- e. semangat patriotisme.

16. Pada hakekatnja dasar ekonomi terpinpin jalah menjajurkan dan memperkokoh potensi rakjat tsb. agar supaja dapat berkembang sepenuhnya, berdasarkan perentjaan dan pelaksanaan setjara teratur dan perhitungan (kalkulasi) yang seksama. Segala tindakan, baik dari fihak-fihak Eksekutif dan Legislatif maupun dari fihak alat-alat Negara, harus ditjdjukan kepada perkembangan potensi rakjat sesuai dengan sifat ekonomi terpinpin menudju ke Sosialisme Indonesia.

17. Berhubung dengan keadaan dan titik dari perdjoaangan kita maka dimasa yang lampau sebagian besar dari bimbingan ekonomi terdesak oleh ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat. Pada waktu itu diberikan prioritas setinggi-tingginja kepada tindakan-tindakan untuk menghadapi bahaya-bahaya terhadap kesatuan Negara dan bahaya-bahaya terhadap keamanan politis dan fisik bangsa kita.

18. Dalam menilai aktivitas ekonomi nasional kita yang meliputi aktivitas Pemerintah, aktivitas koperasi dan aktivitas swasta, perlu disadari bahwa peranan rakjat pada waktu ini, rakjat sebagai tani, rakjat sebagai buruh, pendieknja rakjat sebagai produsen, yang merupakan potensi dan kekuatan riil dan materiil. Dalam garis besarnya a.l. dapat

diambil tjontoh, bahwa 60% dari penghasilan karet jalah karet rakjat, kopra dan produksi padi 100% dihasilkan oleh rakjat, 60% dari transport bermotor bersifat swasta. Selanjutnja perlu diketahui bahwa pengangkutan inter-insuler untuk 50% dilaksanakan dengan perahu-perahu dan kapal-kapal rakjat sederhana.

Disamping itu, adalah kenjataan pula bahwa dilapangan perdagangan ketjil dan menengah, rakjat mendjalankan peranan besar, baik berupa swasta modern maupun berupa usaha rakjat sederhana. Pun perlu diterangkan bahwa koperasi djuga sudah mulai bergerak dilapangan produksi.

Dilapangan industri, impor dan ekspor, kita mengenal pengusaha-pengusaha yang kita sebut golongan swasta.

19. Semua aktivitas ini membangkitkan dikalangan rakjat setjara keseluruhan tuntutan-tuntutan yang makin meningkat (rising demands) dalam arti konsumtif dan produktif, serta memperkokoh kesadaran sosial dan memperdalam pengertian rakjat tentang persoalan-persoalan ekonomi. Ini berarti bahwa tiap "exploitation de l'homme par l'homme" oleh siapapun, apalagi djika dilakukan oleh alat-alat Negara, akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, yang paling sedikit akan ditjerminkan sebagai sifat pasif atau atjauh ta' atjauh, dan dengan demikian mengurangi aktivitas ekonomi setjara nasional.

20. Teranglah, Saudara-saudara, bahwa djalan kearah Sosialisme Indonesia harus ditempuh setjara gotong-rojong antara Pemerintah dan rakjat. Khususnja dalam keadaan sekarang soal pembangunan di Indonesia tidak berlangsung hanja melalui modal Pemerintah akan tetapi djuga modal yang dikumpulkan oleh rakjat, baik modal materiil maupun modal pengalaman, dan lebih-lebih modal dalam arti semangat dan patriotisme merupakan sjarat mutlak bagi kemandjuaan kita semuanya. Pertumbuhan selanjutnja kearah Sosialisme Indonesia akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia setjara kreatif, disesuaikan dengan tjiri-tjiri kepribadian nasional dari bangsa Indonesia sendiri.

21. Dalam melaksanakan kegotong-rojongan ini yang meliputi semua "funds and forces", Pemerintah memegang pimpinan kearah tudjuan Sosialisme Indonesia. Pimpinan dimasa yang lampau, oleh karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan kegiatan administratif (bureaucratisme) dan peraturan serta kegiatan dilapangan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat, menekan dan menghambat potensi dan daja kreatif rakjat untuk berkembang.

22. Dalam keadaan sekarang, maka sifat tegas dari pimpinan pemerintahan seharusnya adalah sebagai berikut :

- a. memiliki perentjaan pembangunan nasional dan memimpin pelaksanaannja;
- b. memperkembangkan segala aktivitas dan daja kreatif rakjat;
- c. memberikan pelayanan sepenuhnya kepada keperluan-keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang;
- d. memberikan perhatian sepenuhnya kepada landasan-landasan ekonomi, agar supaja dengan demikian menguasai

pengemudian hukum-hukum ekonomi, sehingga dapat dihindari kerugian-kerugian nasional seperti kita alami di waktu jang lampau.

23. Dalam hubungan ini diterangkan bahwa perhatian akan hukum ekonomi setjara umum dan pelajaran kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan :

- a. dalam penanaman modal dan penentuan nilai dari pertumbuhan ekonomi (rate of economic growth);
- b. dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk memperkuat politik bebas dan aktif serta terus-menerus memperdjoangkan keseimbangan antara harga-harga bahan mentah dan harga-harga bahan terolah;
- c. dalam penentuan oleh Pemerintah mengenai sifat management, pengawasan dan perangsang (incentives);
- d. dalam penentuan aktivitas ekonomi jang setjara mutlak harus dipegang oleh Pemerintah;
- e. dalam menentukan bahagian dari aktivitas ekonomi jang diberikan oleh Pemerintah kepada pihak swasta, jang dilaksanakan sebagai bagi-hasil atau "production sharing" antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Koperasi atau Swasta difihak Indonesia dengan Pemerintah atau Swasta difihak asing, perlu ditegaskan bahwa production sharing pada hakekatnja merupakan kredit dari luar negeri untuk melaksanakan sesuatu proyek, jang akan dibayar dengan sebagian dari hasil jang diperoleh proyek tsb.; milik dan pimpinan harus tetap ditangan pihak Indonesia.

24. Mengingat luasnja Indonesia setjara geografis, dan untuk memenuhi tudjuan kita untuk menggali potensi rakjat disemua daerah Indonesia, lagi pula mengingat bahwa perhubungan pada waktu ini, baik didalam satu pulau maupun perhubungan antar pulau, masih sangat sederhana, serta mengingat pengalaman-pengalaman negara-negara lain jang menempuh djalan kearah sosialisme, maka dirasakan bahwa konsentrasi pimpinan (management) dalam suatu pusat di Djakarta tidak akan memberikan hasil jang ditjita-tjitakan. Ini berarti bahwa kita harus mengadakan *dekonsentrasi dalam soal management* dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik. Misalnja : sesuatu tjabang dari sesuatu bank Negara harus dapat memberi keputusan mengenai sesuatu hal, jang hanya mengenai daerah atau wilayah tjabang itu sendiri tanpa minta persetujuan dulu dari pusat bank itu di Djakarta.

Ini tidak berarti mengorbankan sentralisasi dalam perencanaan (planning) dan pengawasan (control) terachir, jang ada ditangan pihak pusat. Hal-hal ini dengan sendirinja tidak mengurangi usaha-usaha jang dilakukan oleh Daerah-daerah Otonom.

Dekonsentrasi dalam management tidak dimasukkan dalam otonomi lokal, sebagaimana halnja dengan beberapa urusan Pemerintah Pusat jang telah diserahkan kepada daerah-daerah otonomi.

Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, maka selandjutnja perlu diberikan kekuasaan selajaknja kepada management untuk berfikir dan bertindak setjara efisien dan efektif.

25. Untuk mendapat dukungan masyarakat atau "social support", maka perlu golongan karyawan dalam arti rakjat pekerdja diikutsertakan dalam kebidaksanaan dan pengawasan. Ini akan menghilangkan kontradiksi antara pimpinan diatas dengan para pekerdja. Dan selandjutnja tiap perusahaan harus dapat dirasakan oleh masyarakat sekelilingnja sebagai suatu usaha kegotong-rojongan dalam memperbaiki taraf kehidupannja. Achirnja, pertumbuhan perekonomian daerah setjara mutlak merupakan bagian dari suatu perekonomian nasional jang tak dapat terpisah-pisah, sehingga pengawasan terachir setjara keseluruhan tetap ditangan Pemerintah Pusat.

26. Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakjat, bahwa *kepentingan mereka* diperhatikan.

Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari rakjat, baik dalam arti menambah keperluan materiil atau membangkitkan perasaan patriotisme dan pengorbanan seperlunja. Selain perangsang atau "incentive" setjara umum ini perlu djuga diperhatikan sepenuhnya perangsang setjara khusus dalam bentuk pelajaran jang sebaik-baiknya bagi produsen dan pengusaha.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau melaksanakan pengawasan bagi pertumbuhan kearah itu.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa segala tindakan tadi tidak menghambat atau mematjetkan kelantjaran dalam produksi dan lalu-lintas barang; peraturan-peraturan jang dibuat dalam hal ini harus luwes (flexibel), tidak boleh kaku. Selandjutnja perlu diperhatikan bahwa perangsang tidak hanya perlu difikirkan bagi perseorangan atau golongan, akan tetapi djuga sebagai gandingan setjara khusus oleh Pemerintah untuk kegiatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, maka akan dirasakan oleh daerah bahwa kegiatan untuk menambah penghasilan Negara djuga mengakibatkan perkembangan jang baik dalam arti sosial-ekonomis bagi kehidupan masyarakat didaerah itu.

27. Berhubung dengan pertumbuhan ekonomi nasional kita, maka terasa keperluan untuk merobah sistim perpajakan. Pada umumnja sistim pajak sekarang ini masih melandjutkan sistim pajak jang lama, jaitu mendjadikan pajak-pajak sebagai sumber penghasilan Negara jang utama. Karena itu perlu diadakan perobahan dalam sistim perpajakan :

- a. untuk memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka;
- b. untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruhan, dan
- c. untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selandjutnja.

28. Dalam memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi harus disadari selanjutnya bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga kita harus mementingkan penjelenggaraan lalu-lintas barang antar pulau dan kita harus berdagang dengan dunia luar guna pembangunan dan penghidupan sehari-hari. Berhubung dengan itu maka kita harus memperhatikan perhubungan, baik dalam satu pulau maupun antar pulau. Karena itu maka soal perhubungan menempati fungsi ekonomis yang maha penting. Selama ini belum diatur setjara rapi, maka hasil usaha kita tidak akan memuaskan.

29. Setelah menguraikan strategi dasar ekonomi Indonesia, saya sekarang akan memberi keterangan mengenai *kebidjaksanaan djangka pendek* yang hendak ditempuh oleh Pemerintah.

30. Dalam Amanat saja pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul „Tahun Kemenangan” telah saja tandaskan, bahwa pada dewasa ini harus diutamakan penyelesaian pasal 1 dari Tri-program Pemerintah, yaitu program sandang-pangan.

Untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi-keuangan sekarang maka titik-berat politik-ekonomi djangka pendek harus diletakkan pada soal sandang-pangan itu.

Didalam kebidjaksanaan djangka pendek ini, soal memenuhi keperluan pangan harus mendapat prioritas utama, karena rakyat yang diharuskan ikut-serta didalam gerakan produksi sehebat-hebatnya itu, harus ada djaminan pangan, chususnja „beras”.

Buat djaminan itu Pemerintah perlu mempunyai dan menguasai persediaan beras yang tjukup, yang berarti bahwa Pemerintah harus mempunyai dan menguasai „iron stock” beras.

Berhubung dengan itu kebidjaksanaan djangka pendek harus berpangkal pada :

- penyelesaian soal sandang-pangan sampai pada tingkat yang lajak;
- menjempurnakan aparat produksi yang ada, untuk mempertahankan dan mempertinggi tingkat produksi masa sekarang ini.

Penyelesaian kedua hal ini sudah dapat dilakukan dengan kekuatan masyarakat yang telah ada pada kita, djika terdjamin :

- adanya persediaan beras yang tjukup;
- adanya persediaan bahan baku/penolong dan spare-parts yang tjukup. Maka dari itu mengenai „iron stock” beras dan persediaan bahan baku/penolong serta spare-parts dalam 2 (dua) tahun harus diberi prioritas utama.

Semua kegiatan harus di-konsentrir pada kedua usaha tersebut, sehingga usaha-usaha itu mempengaruhi bidang dan tindakan-tindakan lainnya.

Pembiasaan untuk kedua usaha itu ditjapai :

- dengan kekuatan kita sendiri;
- bilamana itu tidak mentjukupi, maka barulah ditjarikan kredit-kredit luar negeri dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960.

Disamping mengadakan djaminan pangan itu, maka alat-alat produksi, yang sudah kita miliki, harus mendapat djaminan bahan-bahan baku dan penolong serta spare-parts, supaya dapat memperbesar daya-produksinya, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjamin bertambahnya peredaran barang didalam masyarakat sebagai imbalan daripada beredarnya uang.

Paralel dengan penjediaan „iron stock” beras tersebut, maka dalam djangka waktu yang bersamaan (± 2 tahun), harus digerakkan penambahan produksi bahan makanan (beras, djagung dsb.), setjara besar-besaran dengan djalan :

- meng-estensifkan pertanian dengan menambah areal dan transmigrasi.
- meng-intensifkan pertanian dengan mekanisasi dan memperbaiki tjara-tjara bertjotjok-tanam.
- mempergunakan Civic-missions Angkatan Bersendjata.
- menjempurnakan penjelenggaraan Landreform, agar dapat diselesaikan pada waktunya sebagaimana ditetapkan oleh M.P.R.S.
- mendjamin supaya proyek-proyek yang berhubungan langsung dengan usaha mempertinggi produksi pangan (seperti proyek Djatiluhur dan proyek-proyek pabrik pupuk) selesai pada waktu yang direntjanakan.
- mengurangi sedjauh mungkin impor bahan-bahan lux.

Front Nasional harus segera melaksanakan social support-nja dan social control-nja untuk men-sukseskan politik-ekonomi djangka pendek ini, dengan pengertian bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk itu.

Selanjutnya transport dan komunikasi, sebagai urat-nadi perekonomian umumnya, chususnja per-edaran barang, harus diperbaiki dan dipelihara dengan baik, guna melantjarkan distribusi.

Ekspor dan impor dalam masa kebidjaksanaan djangka pendek tsb. diatas, harus diselenggarakan sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 pasal 6 ayat 3. Dalam melaksanakan ketentuan ini Presiden/Mandataris M.P.R.S., dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mendjamin berhasilnya garis politik ekonomi ini untuk menguasai dan menjelenggarakan semua impor dengan mempergunakan pengalaman dan keahlian pengusaha-pengusaha swasta.

Buat sementara untuk mendjamin kelantjaran ekspor dalam djangka pendek ini, perlu para eksportir diberi djaminan incentive yang menarik. Dengan mengingat pengalaman pada tahun-tahun terakhir ini, maka dirasa perlu mengadakan de-konsentrasi dalam pengurusan administrasi impor dan ekspor dari instansi-instansi pada tingkat pusat kepada instansi-instansi pada tingkat daerah, segala sesuatu sesuai dengan politik dan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Produksi sandang menurut kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek tsb. diatas harus dititik-beratkan kepada produksi didalam negeri lebih dulu dalam waktu ± 2 tahun, dengan mendjamin bahan-bahan baku pertununan dan merasionalisir bahan-bahan baku tsb. serta mendjamin arus bahan-bahan

baku dan spare-parts, untuk menghemat devisa maka impor tekstil-djadi harus dibatasi.

Dalam rehabilitasi alat-alat produksi pada umumnya, maka rehabilitasi dan pengurusan penggilingan beras harus mendapat perhatian yang khusus.

Dalam rangka menaikkan produksi, maka penjemputan manajemen perusahaan-perusahaan Negara diarahkan kepada keadaan, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Negara itu bergerak dengan bebas (otonomi) dalam garis-garis kebijaksanaan Menteri-menteri yang bersangkutan, dengan disertai sistem kontrol yang efektif.

Kepada perusahaan-perusahaan (dagang) Negara diberikan incentives berupa jasa produksi, bonus dsb, untuk efisiensi, segala sesuatu menurut ukuran yang objektif, misalnya untuk ketepatan „omzet“ dan ketajilannya jumlah kredit Bank yang digunakan, dengan menjempurnakan tjara-tjaranya yang berlaku hingga sekarang dengan mengadakan retooling.

Untuk efisiensi dan peningkatan produksi selanjutnya perlu diadakan sistem kompetisi prestasi antara perusahaan-perusahaan (dagang) Negara, antara bagian-bagian dalam perusahaan dan antara para pekerdja, dalam suatu rentjana produksi.

31. Berhubung dengan uraian saja tadi maka penjurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus diadakan pada kebijaksanaan ekonomi jangka pendek ini, disamping mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, yang harus ditjapai dengan menggali sumber-sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber-sumber lama, dan dengan tidak menambah beban rakjat banjak. Dengan demikian maka dasar pokok pemikiran dalam penjurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah, bahwa Anggaran Negara harus merupakan alat untuk mensukseskan kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi tersebut tadi.

Itulah sebabnya bahwa penjurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sekarang ini harus disesuaikan dengan politik ekonomi jangka pendek seperti sudah saja uraikan.

Berhubung dengan itu maka penjampai Rantjangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1963 kepada D.P.R.-G.R. ditunda untuk memberikan kelonggaran kepada Pemerintah guna mengadakan peninjauan kembali, dengan tjatatan bahwa penjurusan Anggaran Negara itu ditujukan untuk mendjamin terlaksananya kebijaksanaan jangka pendek ini dan pelaksanaannya Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

Dalam pada itu untuk menjaga ketertiban didalam pengeluaran uang Negara, maka Pemerintah dengan bantuan Panitia Anggaran D.P.R.-G.R. menjusun pedoman-pedoman tertentu yang mengikat untuk penertiban tersebut. Sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 13 Maret j.b.l. maka Pemerintah telah menegaskan bahwa untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi sekarang *tidak akan diambil*

tindakan-tindakan moneter yang drastis, seperti umpamanya devaluasi, pengguntingan uang, pengeluaran uang nilai baru dsb., karena mengadakan tindakan-tindakan seperti itu pada waktu ini, didalam keadaan seperti sekarang, akan menimbulkan kegontjangan dan kegelisahan tidak saja dibidang ekonomi, tetapi juga dikalangan rakjat luas.

Untuk menghadapi kenyataan bahwa nilai uang rupiah sudah merosot dan bahwa ada berbagai ketentuan mengenai nilai uang rupiah terhadap mata-uang asing dan kegandjilan dalam pembentukan harga, maka perlu diadakan tinjauan kembali terhadap segala Peraturan Negara dan Daerah dibidang ekonomi-keuangan untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan jangka pendek tsb. diatas guna keseragaman dalam pembentukan harga, kelantjaraan produksi maupun distribusi.

32. Pembiajan untuk mensukseskan politik ekonomi jangka pendek tsb. diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut :

- a. dengan kekuatan funds and forces nasional (termasuk domestic) kita sendiri.
- b. bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjajikan kredit luar negeri, dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960.

33. Didalam iktiar untuk menjehatkan ekonomi-keuangan sekarang ini, usaha-usaha pembangunan akan terus dilanjutkan berdasarkan Memorandum Pimpinan M.P.R.S. tanggal 5 Djanuari 1963 dengan menetapkan prioritas² yang lebih tjermat.

Dalam pembangunan itu perlu segera dilaksanakan inzeptensi Angkatan Bersendjata guna membantu pembangunan „infra structure“ terutama didaerah-daerah terpencil, seperti perbaikan/pembukaan djalan-djalan, djembatan dan pembukaan tanah tanpa mengurangi kesempatan bekerdja bagi buruh dan menghindarkan dua kali untuk sesuatu proyek.

34. Agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi, maka perlu diadakan peng-integrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun eksekutif, dipusat maupun didaerah-daerah, begitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah³ Daerah dengan badan-badan legislatif.

Peng-integrasian tsb. harus pula ditjapai dengan melaksanakan Pantja Program Front Nasional dalam rangka penyelesaian Tri-program Kabinet Kerdja.

Peng-integrasian seperti yang dimaksudkan selanjutnya dapat ditjapai dengan meng-intensifkan retooling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah⁴, menurut persjajaran yang lebih sempurna yang ditentukan lebih dulu, dibawah pimpinan saja sendiri.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan jangka pendek ini, harus segera dimulai dengan segala keberanian untuk merombak struktur dan kebiasaan yang hingga kini merupakan

hambatan-hambatan, sambil meratakan dan meng-amalkan indoktrinasi dibidang pembangunan mental nasional. Berhubung dengan uraian saja tadi, maka Pemerintah selanjutnya akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

P e r t a m a :

Akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan organisasi dan management Perusahaan Negara, dan diadakan penegasan tentang tugas-tugas Dewan Perusahaan sebagai alat social support dan social control.

Untuk dapat mentjapai maksud pengerahan funds and forces, maka berbagai matjam organisasi pengusaha swasta akan ditertibkan oleh Pemerintah.

Badan Musjawarah Nasional Swasta yang representatif perlu segera dibentuk, diharapkan supaya badan ini a.l. dapat menggerakkan modal dalam masyarakat dan „domestic capital” kepunjaan bangsa asing untuk pembangunan (jang terakhir ini tidak diberikan fasilitas memindahkan keuntungan keluar negeri).

K e d u a :

Perlu meninjau kembali dan dimana perlu mengubah berbagai peraturan, proses serta prosedur administratif jang kompleks untuk dapat mentjapai efisiensi, menghindarkan pemborosan dan doubleures.

K e t i g a :

Perlu terus-menerus berichtiar untuk mentjapai perbaikan dan penjempurnaan pada Lembaga-lembaga Keuangan, seperti aparatur fiskal, perbankan, chususnja Bank-bank Pembangunan Daerah dan Swasta.

K e e m p a t :

Usaha penjempurnaan labour forces harus terus-menerus dilakukan dengan menjempurnakan statistics, technical dan managerial skill, serta berbagai matjam job-training.

K e l i m a :

Perlu diperhatikan, bahwa didalam bidang-bidang operasi-onil diperlukan koordinasi jang baik untuk mengkonsentrir segala usaha dan fikiran dalam menaikkan kegiatan ekonomi dan keuangan.

Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonomi harus tetap ada.

Karena prosedur, proses dan administrasi jang bertalian dengan ekspor dan impor ternyata sangat kompleks, maka kepada Komando Operasi Ekonomi akan diberikan tugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mentjapai perbaikan/penjederhanaan prosedur-prosedur jang bersangkutan.

Komando Operasi Ekonomi harus memberikan djasa-djasa baiknja kepada Badan Pemeriksa Keuangan didalam melakukan tugas di Pusat maupun di Daerah-daerah, agar supaya pedjabat-pedjabat Badan Pemeriksa Keuangan dapat mela-

kukan tugasnja dengan leluasa, tanpa halangan dari setiap aparatur Negara sipil maupun militer jang keuangannja akan diperiksa.

Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan akan diperbaiki, sedang keperluannja akan tenaga-tenaga ahli dan alat-alat akan dipenuhi.

Selanjutnja Komando Operasi Ekonomi akan diberi tugas untuk mengadakan research pada Perusahaan-perusahaan Negara dan Lembaga-lembaga Negara lainnja untuk kepentingan menambah efisiensi.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek jang segera akan ditempuh oleh Pemerintah.

Djakarta, 28 Maret 1963.

Presiden Republik Indonesia,
ttd.

SUKARNO.

ISI

	hlm.
Pengantar Penerbit	3
DEKON DAN SJARAT ² PELAKSANAANNJA	5
I. <i>Prinsip² pokok Deklarasi Ekonomi</i>	6
a. Strategi dasar ekonomi dan kebidjaksanaan djangka pendek merupakan satu kesatuan	9
b. Arti tugas membersihkan ekonomi Indone- sia dari sisa ² imperialisme dan feodalisme	15
c. Mengikis habis sisa ² feodalisme	22
d. Peranan sektor koperasi dan sektor swasta	25
II. <i>Hal² jang perlu diperhatikan dalam melaksana- kan kebidjaksanaan djangka pendek</i>	30
a. Tentang „Iron Stock” beras	32
b. Usaha ² untuk memulihkan kembali aparat produksi	37
c. Dekonsentrasi dalam soal management ...	39
d. Perubahan ² dalam sistim perpadjakan	41
e. Production-sharing dan kredit luarnegeri	46
Kesimpulan-kesimpulan	52
DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!	54
KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH!	71
I. Penhatian kepada kepentingan ² kaum buruh dan Rakjat pekerdja pada umumnja	74
II. Pengikutsertaan kaum buruh dalam pengurusan ekonomi	80
III. Selamatkan Dekon dan laksanakan setjara kon- sekwen!	88
LAMPIRAN:	
Selamatkan Dekon!	93
Deklarasi Ekonomi	101

